

**KONSTRUKSI SOSIAL
KOMITE SEKOLAH ATAS
MUTU PENDIDIKAN**

Bina Andari Nurmaning
Jabal Tarik Ibrahim
Fauzik Lendriyono
Mohammad Roziq A

KONSTRUKSI SOSIAL KOMITE SEKOLAH ATAS MUTU PENDIDIKAN

Copyright ©2023, Bildung
All rights reserved

Konstruksi Sosial Komite Sekolah atas Mutu Pendidikan

Bina Andari Nurmaning
Jabal Tarik Ibrahim
Fauzik Lendriyono
Mohammad Roziq A

Desain Sampul: Ruhtata
Layout/tata letak Isi: Tim Redaksi Bildung

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Konstruksi Sosial Komite Sekolah atas Mutu Pendidikan/Bina Andari Nurmaning, Jabal Tarik Ibrahim, Fauzik Lendriyono, Mohammad Roziq A/Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2023

xix + 170 halaman; 15,5 x 23 cm
QRCBN: 62-2578-3586-213

Cetakan Pertama: Desember 2023

Penerbit:

Bildung

Jl. Raya Pleret KM 2
Banguntapan Bantul Yogyakarta 55791
Email: bildungpustakautama@gmail.com
Website: www.penerbitbildung.com

Anggota IKAPI

Bekerja sama dengan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari Penerbit dan Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga buku monograf ini bisa terselesaikan dengan lancar dengan mengangkat judul *Konstruksi Sosial Komite Sekolah Atas Mutu Pendidikan*. Adanya disfungsi peran komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, akan tetapi adanya disfungsi ini tidak meruntuhkan sistem sosial yang dalam hal ini di dalamnya yaitu perangkat sekolah sebagai peningkat mutu pendidikan. Dalam kondisi disfungsi ini, peran komite sekolah terpulihkan karena komite sekolah merupakan bagian dari sistem sosial yang memiliki kemampuan untuk mereproduksi “sel” yang rusak sehingga peran komite sekolah sesuai dengan amanat undang-undang yaitu sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator bisa berjalan dengan harmonis bersama pengelola sekolah, wali siswa, masyarakat dan pemerintah. Hasil dari penelitian ini yaitu menghasilkan temuan, di antaranya:

Pertama, konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan berorientasi pada pengembangan visi dan misi dari kesepakatan yang telah disepakati oleh komite sekolah dan pengelola sekolah. Pengembangan potensi dimaksud adalah pengembangan minat dan bakat siswa sampai dengan rencana kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta. Perbedaan pandangan antara wali siswa dan pengelola sekolah harus dipudarkan dengan adan-

ya peran serta komite sekolah di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Meskipun yang sebenarnya terjadi adalah pengelola sekolah lah yang secara pasti mengetahui situasi dan kondisi dalam sebuah lembaga pendidikan. Komite sekolah mengetahui situasi dan kondisi sekolah dari pemberitahuan pihak pengelola sekolah. Terkadang pemberitahuan itu menimbulkan komunikasi yang kurang harmonis, di mana komite sekolah apabila mengetahui ada permasalahan di sekolah, beranggapan bahwa adanya permasalahan yang muncul adalah kesalahan dari pengelola sekolah yang kurang mampu untuk memilih baik itu metode pembelajaran ataupun kesigapannya menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Yang sebenarnya dari permasalahan yang muncul antara pengelola sekolah dan wali siswa, harus diikuti dari peran komite sekolah sebagai mediator. Di sinilah titik awal mula bagaimana peran serta komite sekolah atas peningkatan mutu pendidikan.

Kedua, implementasi konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan adalah bagaimana komite sekolah menyalurkan aspirasinya atas program yang telah tersusun bersama pengelola sekolah, dengan memperhatikan faktor musyawarah. Sehingga peran komite sekolah sebagai badan pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator bisa terlaksana melalui proses komunikasi yang harmonis. Di mana dalam pelaksanaan proses tersebut, komite sekolah yang telah duduk bersama membicarakan program sekolah dan adanya kesepakatan bersama, maka komite sekolah memberikan dukungan baik materil maupun immateriil dengan melangkah sebagai penyambung lidah pada saat sekolah membutuhkan sumbangan untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah dan membantu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa yang terutama memiliki bakat dan minat baik akademik maupun non akademik. Di sini komite sekolah haruslah mempunyai hubungan baik dengan pengelola sekolah, wali siswa, pemerintah maupun swasta apabila sewaktu-waktu ada kompetisi khususnya yang mandiri dan membutuhkan dana un-

tuk mengikuti kompetisi tersebut. Nilai-nilai hubungan yang baik dengan pihak diluar pengelola sekolah inilah yang seharusnya selalu dijaga sepanjang masa atau dijadikan sebuah budaya positif atas peran komite sekolah sehingga keberlangsungan hubungan itu tetap terjaga.

Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah budaya positif ini bisa tetap terjaga mengingat pengurus komite sekolah mempunyai batas waktu kepengurusan.

Secara teoritik, beban penelitian ini terletak pada batasan budaya atas keberlangsungan mempertahankan peran serta komite sekolah dalam pelaksanaan program yang telah disepakati. Kajian ini menarik untuk dibaca, dikritik dan diberikan masukan karena dengan membaca pemikiran Berger dan Luckman bahwa realitas adalah hasil dari ciptaan manusia yang kreatif. Di mana institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Di mana Pemikiran Berger dan Luckman terpengaruh oleh pemikiran Husserl tentang fenomenologi, weber tentang makna subyektif dan Durkheim tentang struktur serta Marxian tentang dialektika.

Bagaimanapun penelitian ini tetap memiliki kekurangan dan keterbatasan dan dapat memicu peneliti lain untuk berkarya atau menambah proposisi baru dalam teori Berger dan Luckmann dalam kajian konstruksi sosial pada level mikro.

Dr. Bina Andari Nurmaning

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah pada akhirnya buku ini berhasil diterbitkan dan dibaca oleh masyarakat luas terutama dari kalangan akademisi atau sesama peneliti. Terbitnya buku ini tidak lepas dari beberapa orang yang telah membantu, mulai dari awal hingga penelitian ini selesai. Kepada Prof. Dr. Jabal Tarik Ibrahim, Dr. Fauzik Lendriyono, dan Dr. M. Abdul Roziq A., SH., MSi., saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya ikut berkontribusi dalam penulisan buku monograf ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Tim Penguji dari Universitas Muhammadiyah Malang. Tak lupa ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Kaprodi Pascasarjana bersama Bapak Sekretaris Prodi yang selalu mendorong dan memberikan semangat untuk segera menyelesaikan buku monograf ini.

Kemudian ayahanda Drs. H. Luckman Sukadji, MM sekaligus sebagai guru masa depan saya, dan ibunda saya Almarhumah Dra. Hj. Sri Nurmi yang selalu memberikan *support* dan motivasi kepada saya dalam menempuh pendidikan S1-S3 saat beliau masih hidup dan ini merupakan hadiah terindah yang saya persembahkan untuk almarhumah ibu. Terima kasih juga saya ucapkan untuk bapak ibu mertua yang selalu mendoakan saya. Juga kepada suami terkasih, Endang Saifudin Anshari, SSTP., MM, terima kasih tiada henti memberikan *support* dan sabar ketika saya proses menem-

puh studi S3, dan teruntuk anak-anakku tercinta, Pranaseta Hananta Wahyu Wibowo, S.Pd., Dyah Merina Saputri, S.Kep., Hanum Fara Ashari, dan Kenzie Zain Maulana Khalil yang selalu memberikan senyum keikhlasan dan kebahagiaan di keluarga kecil kami. Kemudian saudara kandung saya, Avia Febta Nurmaning, SE., Cahya Luckita Nurmawan, ST., MM, dan Doni Luckita Nurmawan, ST., MM, , serta kakak ipar saya, Dr. Agus Muharyanto, adik ipar saya, Ariyani, ST., S.Pd., MM, Zainul Mustaqim, Atik Wijayanti, S.Pd., bersama seluruh keponakan, Devan, Lala, Selma, Marsya, Rizki, Dafa, Rimbi.

Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Alm. Dr. Sunjoto, SH. M.Si, sekaligus sebagai lawan diskusi ketika melaksanakan penelitian ini dan selalu mengobarkan semangat untuk segera menyelesaikan penelitian ini kala beliau masih hidup, bapak/ibu komite sekolah bersama kepala sekolah yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini, sehingga karya ini bisa menjadi salah satu *work of all the best work*. Rekan-rekan kerja yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi juga selalu memberikan *support* untuk segera menyelesaikan tugas yang sangat berat ini.

Ketua Tim Penulis

Bina Andari Nurmaning

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Permasalahan Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
 BAB II KAJIAN TEORI	 7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Pemahaman Konstruksi Sosial	11
1. Manusia sebagai Realitas Objektif	13
2. Manusia sebagai Realitas Subjektif (Internalisasi)	14
C. Pemahaman Komite Sekolah dan Mutu Pendidikan.....	22
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 39
A. Paradigma Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian	41

C. Jenis Penelitian	42
D. Lokasi dan Subjek Penelitian	42
E. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Wawancara (<i>interview</i>)	44
2. Observasi.....	45
3. Dokumentasi	46
F. Metode Analisis Data	47
G. Uji Keabsahan Data	51
1. Kredibilitas	51
2. Transferabilitas.....	53
3. Dependabilitas.....	53
4. Konfirmabilitas.....	54
H. Tahapan Penelitian	54
 BAB IV HASIL DAN DISKUSI PENELITIAN	56
A. Deskripsi Objek Penelitian	56
1. SDN 1 Kampungdalem Ketua Komite Bapak Imam Suyadi..	56
2. SDN 4 Kampungdalem Ketua Komite Bapak Kamirin	57
3. SDN 7 Kampungdalem Ketua Komite Bapak Wahyu.....	58
4. SDN 1 Kepatihan Ketua Komite Bapak Suwarsono.....	58
5. SDN 2 Kepatihan Ketua Komite Bapak Suwarsono	59
6. SDN 1 Jepun Ketua Komite Bapak Sugeng.....	60
7. SDN 1 Karangwaru Ketua Komite Ibu Siti	60
8. SDN 1 Tretek Ketua Komite Bapak Tolib.....	61
9. SDN Sembung yaitu Bapak Bambang.....	61
10. SDN 1 Botoran yaitu Bapak M Sururus	62
B. Hasil Penelitian	62
1. Konstruksi Sosial Komite Sekolah atas Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.....	63
2. Implimentasi Konstruksi Sosial Komite Sekolah atas mutu pendidikan SDN di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.....	92

C. Hasil Diskusi	137
1. Konstruksi Sosial Komite Sekolah atas Mutu Pendidikan SDN di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.....	137
2. Implimentasi Konstruksi Sosial Komite Sekolah atas Mutu Pendidikan SDN di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.....	142
D. Proposisi Penelitian	148
 BAB V PENUTUP	158
 DAFTAR PUSTAKA	163
GLOSSARIUM	169

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2	Kisi-kisi wawancara penelitian	45
Tabel 3.2	Kisi-kisi observasi penelitian	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian.....	55
Gambar 4.1 Eksternalisasi komite sekolah atas mutu pendidikan	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan otonomi daerah harus diartikan sebagai upaya pemberdayaan daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan, diperlukan wadah yang dapat mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas. Salah satu wadah tersebut adalah Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan (Haryati, 2017).

Komite sekolah menjadi wadah adanya komunitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) yang mempunyai peran penting. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh semua pihak yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, tokoh masyarakat stakeholder, pemerintah dan pihak swasta yang menjadi komunitas komite sekolah yang mempunyai kontribusi atas kesuksesan pendidikan (Hakim, 2020).

Dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 Bab I Pasal I komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh mas-

yarakat yang peduli terhadap pendidikan. Wadah komite sekolah ini diharapkan para *stakeholder* pendidikan yang mengambil peran yang maksimal, sehingga sekolah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi *customer*-nya. Peran komite sekolah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan, namun juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah (Nelliraharti, 2018). Oleh karena itu sekolah harus meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya dan mendukung terhadap program-program yang dicanangkan sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Komite sekolah merupakan organisasi masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Komite sekolah dibentuk dan dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai karakteristik daerah secara kolektif. Artinya, komite sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagai kewenangan (*power sharing and advocacy model*) dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan di daerah.

Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan

suatu sekolah. Selain itu komite sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam membantu dan meningkatkan mutu pendidikan (Ramli, 2021).

Terbentuknya komite sekolah pada setiap sekolah atau kelompok sekolah merupakan langkah penyebaran tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan pendidikan sehingga perkembangan pendidikan bukan saja menjadi otoritas mutlak unsur internal sekolah di bawah komando kepala sekolah akan tetapi komite sekolah dapat berkontribusi untuk mendorong para tenaga pendidik dan kependidikan agar dapat bersama-sama dan berkonsentrasi memajukan pendidikan yang dikelolanya (Majir, 2018).

Partisipasi komite sekolah ini sangat bergantung pada cara dan kreativitas sekolah dalam menggunakan pendekatan yang relevan kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, tingkat partisipasi dan pendekatan yang dilakukan pihak sekolah dapat berdampak pada keikutsertaan anggota komunitas komite sekolah dalam setiap kegiatan sekolah. Keterkaitan partisipasi dalam sebuah organisasi dibutuhkan wadah yang baik. Salah satu yang sangat penting adalah wadah yang besar. Wadah ini dapat menampung segala kehendak positif masyarakat yang merupakan bagian penengah antara internal dan eksternal sekolah. Dengan demikian, posisi eksternal sangat urgen bagi keberlangsungan sebuah sistem pendidikan, hal demikian tidak bisa dianggap sebagai bayang-bayang semata dalam tataran lembaga. Komite sekolah diposisikan *eksternal feedback loops*, yakni umpan balik eksternal yang muncul dari interaksi sekolah dengan lingkungan eksternal sekolah (Hakim, 2020).

Banyak penelitian yang telah mengkaji tentang pentingnya komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Seperti pada penelitian Kilewo & Frumence (2015) masyarakat di daerah pedesaan memiliki sikap negatif terhadap pendidikan anak-anak

mereka dan beranggapan bahwa pendidikan dasar kurang memiliki posisi penting dalam menentukan kehidupan anak-anak. Lain halnya pandangan Godfrey (2016) bahwa masyarakat terlibat dalam menyediakan pendidikan dasar melalui persiapan anak-anak untuk sekolah dengan menyediakan makanan, seragam sekolah dan alat tulis. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pandoyo & Wuradji (2015) menyimpulkan bahwa kerja komite sekolah dasar negeri se-kecamatan Mlati sudah memiliki nilai yang cukup tinggi dalam berpartisipasi menjalankan program pendidikan di sekolah.

Fenomena yang ada di Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tulungagung merupakan bagian dari satuan pendidikan sekolah dasar yang memiliki potensi berupa input peserta didik, proses pembelajaran dan output berupa lulusan sekolah dasar dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun disisi lain masih ditemukannya berbagai masalah antara lain: kurangnya partisipasi masyarakat dalam menunjang peningkatan mutu pelayanan pendidikan terutama dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Peneliti memperoleh informasi bahwa Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Tulungagung keberadaan komite sekolah cukup berpengaruh terhadap pembelajaran siswa. Komite Sekolah sudah bekerja dalam melakukan perannya untuk membuat lembaga pendidikan ini bisa lebih baik dari lembaga pendidikan lainnya dalam hal mutu pendidikannya. Hal ini bisa dilihat dari jumlah kelulusan siswanya yang semakin meningkat yang memperoleh prestasi dalam segala bidang. Dalam hal ekstrakurikuler di lembaga pendidikan ini bisa dikatakan lebih unggul dari lainnya. Dengan adanya kemauan siswa dan dorongan dari pihak Komite untuk belajar menjadi salah satu faktor meningkatnya mutu pendidikan, akan tetapi peran serta guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan pada lembaga pendidikan yang menjadi objek dalam pene-

litian ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan juga diperlukan. Berdasarkan hasil temuan sementara, maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam berkenaan dengan “Konstruksi Sosial Komite Sekolah Atas Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung”.

B. Permasalahan Penelitian

Komite sekolah di sekolah dasar negeri memiliki beberapa masalah seperti pemilihan dan pengangkatan pengurus, kemitraan dan kemauan politik kepala sekolah, prosedur keterlibatan komite sekolah, dan peningkatan partisipasi komite sekolah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Masalah berikutnya kurangnya dukungan dana dari masyarakat baik secara individu, kelompok maupun organisasi dan masih belum optimalnya mutu pendidikan disebabkan oleh kurangnya evaluasi dan pengawasan sekolah. Masalah yang berkembang dan mendesak untuk dicarikan solusi dalam tulisan ini adalah penguatan hubungan sinergitas antara komite sekolah dan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tulungagung, pemilihan dan pengangkatan komite sekolah dengan melibatkan peran komite sekolah dan berpartisipasi dalam program peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tulungagung. Pertanyaan penelitiannya adalah:

1. Bagaimana konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implimentasi konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan implimentasi konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini, adanya penjelasan dari penelitian terdahulu yang memiliki kesusangutan dengan topik penelitian. Di mana pada penelitian terdahulu menuliskan bahwa sebuah kerjasama yang telah terjalin antara beberapa pihak masih terdapat hambatan meskipun sudah dicari solusi dari hambatan tersebut. Pada penelitian terdahulu, keikutsertaan Wali peserta didik dalam anggota pengurus komite sekolah mempunyai kepentingan pribadi yang juga menimbulkan permasalahan dengan wali peserta didik.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Herawati, dkk, (2021) mengenai *School Committee Support for Improving the Quality of Education Services*. Hasil penelitiannya komite sekolah memiliki empat peran: peran lembaga penasihat, peran lembaga pendukung, lembaga pengendali, dan mediator. Jika komite sekolah diberdayakan secara optimal, maka akan memberikan dukungan positif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekolah.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh (Herwan, Aswandi, & Chiar, 2018) mengenai *The Role of School Committee in Supporting The Fulfillment of Education Facilities and Infrastructure*. Hasil penelitiannya 1) Komite Sekolah SMKN 1 Teluk Keramat telah menjalankan perannya sebagai lembaga penasihat, sebagai lembaga

pendukung, sebagai lembaga pengendali, dan sebagai lembaga mediator; 2) Faktor pendukung komite sekolah antara lain a) Kerjasama sekolah yang baik; b) Wewenang yang diberikan sekolah kepada komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya; c) Tanggung jawab wajib menyelesaikan wajib belajar 12 tahun peserta didik; d) Melaksanakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 75 tentang Komite Sekolah; 3) Faktor penghambat komite sekolah adalah a) Kurangnya koordinasi antara sekolah dengan komite sekolah; b) Lebih mementingkan urusan pribadi daripada tugas komite sekolah; c) kurangnya penghargaan yang diperoleh sebagai komite sekolah; d) Pengurus komite yang tidak efektif karena jarak dari sekolah; 4) Tidak semua anggota komite sekolah terlibat secara aktif.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Halik et al., (2019) mengenai *Empowerment of School Committee in Improving Education Service Quality at Public Primary School in Parepare City*. Hasil penelitian ini adalah pemilihan strategi yang mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dan dilakukan secara demokratis; kepala sekolah menjalin komitmen bersama dengan komite sekolah untuk memajukan mutu, merancang wewenang dan tanggung jawab masing-masing, mengembangkan sistem administrasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis TIK, serta mengembangkan standar mutu dan standar operasional prosedur pelayanan pendidikan bermutu.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh (Wardiah, Murniati, & Djailani, 2015) mengenai “Strategi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 Lhoknga”, dalam penelitiannya menguraikan program komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan, strategi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan dan kendala peningkatan mutu pendidikan.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Kilewo & Frumence (2015) mengenai *Factors that hinder community participation in developing and implementing comprehensive council health plans in Manyoni District, Tanzania*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor yang menghambat partisipasi masyarakat antara lain kurangnya kesadaran, komunikasi yang buruk dan berbagi informasi, tidak ditentukan peran dan tanggung jawab, kurangnya kapasitas manajemen di antara anggota, dan kurangnya sumber daya keuangan untuk melaksanakan kegiatan.

Penelitian keenam yang dilakukan oleh Septiana, Bafadal, & Kusumaningrum (2018) mengenai Pelibatan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa yaitu: (1) kekuatan komite berasal dari keaktifan, kesiapan menindaklanjuti masalah, pembagian kerja yang jelas, dan koordinasi yang baik; (2) bentuk-bentuk pelibatan komite yaitu: mengadakan pertemuan, menggalang dana, mengontrol keuangan, mengarahkan dan melibatkan orang tua dalam program, melaporkan hasil kegiatan kepada orang tua; (3) strategi kepala sekola melibatkan komite yaitu berkoordinasi, melakukan pendekatan-pendekatan, dan kepala sekolah menjadi tauladan; (4) kendala-kendala komite sekolah di antaranya pengurus komite jarang lengkap saat pertemuan, wali murid keberatan saat sumbangan sukarela; (5) alternatif pemecahan masalah yakni pengurus yang tidak hadir digantikan dengan pengurus lainnya, melakukan pendekatan secara personal.

Penelitian ketujuh yang dilakukan oleh (Umam, 2019) Komite sekolah dalam Konteks Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kegiatan manajemen mutu terpadu dari komite sekolah tersebut mampu memuaskan bagi pihak-pihak lain yang terlibat atau terkait untuk berperan-serta dalam suatu kesempatan pada manajemen mutu terpadu, baik untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), kesadaran

(*awareness*), upaya pemenuhan selera (*pleasure*), dan menarik simpati atau empati sehingga mampu menumbuhkan saling pengertian bagi semua pihak.

Penelitian kedelapan yang dilakukan oleh Majir (2018) mengenai Rekonstruksi Hubungan Komite Sekolah dan Sekolah Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hubungan komite sekolah dan sekolah era pendidikan abad 21 saat ini, merupakan suatu keharusan, mengingat setelah lebih dari tiga belas tahun terbitnya kebijakan yang berkaitan dengan komite sekolah, yakni sejak dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Keberadaan komite sekolah di sebagian besar sekolah mulai dari jenjang PAUD sampai jenjang menengah atas belum menunjukkan kinerja sebagai mitra dan pendamping sekolah dalam mewujudkan capaian peningkatan mutu pendidikan. Walaupun ada, itupun sebagian kecil dari sekolah dan komite sekolah.

Penelitian kesembilan yang dilakukan oleh (Hakim, 2020) mengenai Peningkatan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Melalui Pendekatan Partisipasi Komite Sekolah. Hasil penelitiannya pendekatan partisipasi komite sekolah berperan sebagai pusat komunitas di lingkungan sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dasar di Kota Mataram.

Penelitian kesepuluh yang dilakukan oleh Qohar (2018) Manajemen Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency) Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di SLB Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang. Hasil penelitiannya SLB Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang menerapkan peran pendukung sebagai agen pendukung, tetapi untuk mendapatkan solusi dan pengaturan yang bertanggung jawab.

Penelitian kesebelas, yang dilakukan oleh Carlson (2020) *The Social Construction of the Progressive Era: A Critical Historiographical Case Study in Vocationalism*. temuan menunjukkan bahwa kejuruan di Milwaukee dibangun secara sosial dalam menanggapi empat tema (a) ketegangan yang muncul antara sekolah kejuruan dan pendidikan akademik; (b) ideologi altruisme dalam menanggapi penurunan ekonomi; (c) wacana reformasi akar rumput; dan (d) munculnya pendidikan demokrasi, egaliter yang bertujuan untuk mengembangkan pemuda dalam persiapan untuk bekerja.

Penelitian kedubelas, yang dilakukan oleh Kamau, Rambo, & Mbugua (2021) *Influences of Community Participation on School Infrastructure Policy Implementation and Performance of Construction Projects*. Hasil penelitiannya Partisipasi masyarakat tidak hanya membawa pengaruh positif terhadap proyek tetapi juga pengaruh negatif. Partisipasi masyarakat memiliki pengaruh moderasi parsial rendah dan negatif yang signifikan terhadap hubungan antara implementasi kebijakan infrastruktur sekolah dan kinerja proyek konstruksi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, secara garis bes konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan akan berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan pada peneliti sebelumnya atau pada penelitian terdahulu. Secara garis besar dapat peneliti simpulkan bahwa dalam penelitian ini yang rencananya akan difokuskan pada konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan yang meliputi pemahaman konstruksi sosial (eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi) komite sekolah atas mutu pendidikan dan implimentasi konstruksi sosial (eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi) komite sekolah atas mutu pendidikan.

B. Pemahaman Konstruksi Sosial

Peter Ledwig Berger merupakan sosiolog asal Amerika yang mengambil benang merah antara aliran Emil Durkheim (1858-

1917), Max Weber (1864-1920), dan Karl Marx (1818-1883). Berger memiliki pandangan sendiri dalam menyikapi pertarungan aliran positivis Durkheim, humanis Weber, dan juga teori kritik Marx. Berger mengambil sikap tegas bahwa sosiologi merupakan suatu disiplin yang humanistik (Poloma, 2010).

Berger dalam perspektifnya, menekuni makna yang menghasilkan watak ganda masyarakat, yakni masyarakat sebagai kenyataan subjektif seperti pandangan Weber dan masyarakat sebagai kenyataan obyektif menurut Durkheim yang terus berdialektika (Marx). Perspektif Berger mendapat sumbangan besar dari Alfred Schutz (1899-1959) tentang makna dan pembentukan makna atau bagaimana makna membentuk struktur sosial Poloma (2010). Schutz mengatakan tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberikan arti atau makna tertentu terhadap tindakannya itu sebagai sesuatu yang penuh arti Ritzer (2007).

Gagasan Berger dan Luckmann bertumpu pada makna realitas dan pengetahuan. Kenyataan adalah suatu kualitas yang terdapat dalam fenomena-fenomena yang memiliki keberadaan (*being*) yang tidak tergantung kepada kehendak individu manusia (yang kita tidak dapat meniadakannya dengan angan-angan). Pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena-fenomena itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik-karakteristik yang spesifik Poloma (2010).

Keterkaitan hubungan individu dan dunia sosiokulturalnya disusun dalam gagasan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketiganya ini merupakan proses dialektika antara individu dengan masyarakatnya atau masyarakat dengan individu. Eksternalisasi dan objektivasi merupakan proses di mana masyarakat merupakan realitas objektif, sedangkan proses internalisasi menempatkan masyarakat sebagai realitas subjektif.

1. Manusia sebagai Realitas Objektif

a) Eksternalisasi

Berger mendefinisikan eksternalisasi sebagai proses penyesuaian diri individu terhadap dunia sosiokulturalnya Bungin (2010). Eksternalisasi dipengaruhi secara aktif maupun pasif oleh akumulasi *common sense* yang merupakan pengetahuan yang dimiliki individu bersama individu-individu lainnya dalam kegiatan rutin yang normal, dan sudah jelas dengan sendirinya, dalam kehidupan sehari-hari, Berger & Luckmann (1990).

Pengetahuan bersama ini pada dasarnya bersifat subyektif yang kemudian terjadi berulang-ulang lalu mengendap sehingga menjadi akumulasi *common sense* yang terhabitualisasi. Habitualisasi ini selanjutnya membentuk produk sosial yang nantinya akan diwariskan. Dengan kata lain, manusia merupakan instrumen dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, Poloma (2010).

b) Objektivasi

Objektivasi tahap pertama disebut sebagai institusionalisasi dan kedua merupakan legitimasi. Institusi adalah jawaban manusia terhadap kehidupannya yang terus mengalir dengan tidak pasti. Ketidakpastian ini yang dimaksud Berger & Luckmann (1990) sebagai kekacauan yang diliputi kehampaan makna. Institusi, dengan segala ketentuan yang mengatur peran anggotanya, berfungsi untuk memberikan rasa keteraturan dan kenyamanan kepada anggotanya tersebut, Poloma (2010). Institusi yang diwariskan ini tidak bersifat statis atau tanpa perubahan. Karena dari zaman ke zaman, anggota baru dari institusi tersebut akan terus bisa mempertanyakan institusi tersebut. Untuk mempertahankannya dibutuhkan legitimasi yang merupakan tahap objektivasi tahap kedua. Legitimasi meletakkan justifikasi kognitif atau penjelasan berdasarkan pembuktian logis mengenai relevansi dari sebuah

institusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyoal institusi tersebut, saat institusi itu mulai dirasa kurang atau tidak relevan dalam menjawab persoalan-persoalan yang timbul.

Dengan demikian masyarakat sebagai realitas subjektif dari kedua proses di atas (eksternalisasi dan objektivasi) dapat diuraikan sebagai berikut: Dalam proses eksternalisasi, mula-mula sekelompok manusia menjalankan sejumlah tindakan. Bila tindakan-tindakan tersebut dirasa tepat dan berhasil menyelesaikan persoalan mereka bersama pada saat itu, maka tindakan tersebut akan diulang-ulang. Setelah tindakan itu mengalami pengulangan yang konsisten, kesadaran logis manusia akan merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada kaidah yang mengaturnya. Inilah tahapan objektivasi di mana sebuah institusi menjadi realitas yang objektif setelah melalui proses ini.

2. Manusia sebagai Realitas Subjektif (Internalisasi)

Masyarakat sebagai kenyataan subyektif menyiratkan bahwa realitas obyektif ditafsiri secara subyektif oleh individu. Dalam proses menafsiri itulah berlangsung internalisasi. Internalisasi yang berlangsung melibatkan sosialisasi, baik primer maupun sekunder.

Menurut Eriyanto (2012) bahwa internalisasi itu di antaranya berwujud dalam sosialisasi yakni bagaimana satu generasi menyampaikan nilai-nilai budaya yang ada pada generasi berikut. Generasi berikut diajar untuk hidup sesuai dengan nilai budaya yang mewarnai struktur masyarakatnya. Generasi baru dibentuk oleh makna-makna yang sudah diobjektivasikan, mengidentifikasi diri dengannya. Tetapi tidak memilikinya dengan sekadar mengenalnya, ia juga mengungkapkannya.

Sosialisasi primer berlangsung pada masa anak-anak dengan hubungan emosional yang tinggi yang pada akhirnya tidak hanya menimbulkan proses belajar mengenal lingkungan secara

kognitif saja. Sedangkan sosialisasi sekunder menurut Berger dan Luckmann dikatakan bahwa, tanpa mempertimbangkan dimensi lainnya, bisa dikatakan bahwa sosialisasi sekunder adalah proses memperoleh pengetahuan khusus sesuai dengan perannya (*role-specific knowledge*), di mana peran-peran secara langsung atau tidak langsung berakar dalam pembagian kerja, Bungin (2010).

Ketiga proses atau tahapan di atas (eksternalisasi, objektivasi, internalisasi) merupakan realitas yang dimaksud Berger dan Luckmann. Realitas objektif yang merupakan realitas yang terbentuk dari pengalaman di luar individu dan dianggap kenyataan ini adalah eksternalisasi. Ekspresi dari realitas objektif dalam berbagai bentuk simbolis tersebut dinamakan objektivasi. Sedangkan proses penyerapan kembali realitas objektif dan simbolik melalui proses internalisasi menghasilkan realitas yang disebut dengan realitas subjektif.

Dalam realitas subjektif, realitas tersebut menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antara individu dengan objek. Setiap individu mempunyai latar belakang sejarah, pengetahuan, dan lingkungan yang berbeda-beda, yang bisa jadi menghasilkan penafsiran yang berbeda pula ketika melihat dan berhadapan dengan objek. Sebaliknya, realitas itu juga mempunyai dimensi objektif (sesuatu yang dialami, bersifat eksternal, berada di luar) atau dalam istilah Berger, tidak dapat kita tiadakan dengan angan-angan yang ada, dan sebagainya, Eriyanto (2012).

Menurut DeLamater & Hyde (1998) juga bahwa konstruksi sosial menyatakan tidak ada kenyataan pokok (*essences*) yang benar, realitas adalah konstruksi sosial. Konstruksi sosial merupakan sebuah pandangan bahwa semua nilai, ideologi, dan institusi sosial adalah buatan manusia. Diperlukan waktu untuk memahami dan menghargai implikasi penuh dari pernyataan ini. Sebagai contoh, dimasa lampau dianggap bahwa bumi adalah pusat jagat raya

yang dikelilingi planet-planet Ngangi (2011). Galileo berpendapat lain dan menempatkan matahari sebagai pusat jagat raya dan bumi bersama planet-planet lain berevolusi mengelilingi matahari. Pendapat ini bertentangan dengan pandangan yang dianut umum dan karenanya ia dianggap gila dan malah dimasukkan ke dalam penjara. Diperlukan waktu panjang sebelum sistem heliosentris diterima umum. Kontruksi sosial adalah sebuah pernyataan keyakinan (*a claim*) dan juga sebuah sudut pandang (*a viewpoint*) bahwa kandungan dari kesadaran, dan cara berhubungan dengan orang lain itu diajarkan oleh kebudayaan dan masyarakat. Tercakup di dalamnya pandangan bahwa semua kuantitas metafisik riil dan abstrak yang dianggap sebagai suatu kepastian itu dipelajari dari orang lain.

Teori struktural fungsional yang berada dalam paradigma fakta sosial terlalu melebih-lebihkan peran struktur didalam mempengaruhi perilaku manusia, Ritzer (1985). Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Disisi lain, teori tindakan yang berada dalam paradigm definisi sosial terlalu melebih-lebihkan individu sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan terlepas dari struktur diluarnya.

Teori konstruksi sosial dalam penelitian ini dijadikan sebagai *guidance* untuk melihat realitas sosial, menurut Berger & Luckmann (1990) konstruksi sosial dibangun melalui dua cara: *Pertama*, mendefinisikan tentang kenyataan atau "realitas" dan "pengertian". Realitas sosial adalah sesuatu yang tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi bahasa, kerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan seterusnya. Realitas sosial ditemukan dalam pengalaman intersubjektif, sedangkan pengetahuan mengenai realitas sosial adalah berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya, meliputi ranah kognitif, psikomotorik, emosional dan in-

tuitif. *Kedua*, untuk meneliti sesuatu yang intersubjektif tersebut, Berger menggunakan paradigma berpikir Durkheim mengenai objektivitas, dan paradigma Weber mengenai subjektivitas. Jika Durkheim memposisikan objektivitas di atas subjektivitas (masyarakat di atas individu), sementara Weber menempatkan subjektivitas di atas objektivitas (individu di atas masyarakat), maka Berger melihat keduanya sebagai entitas yang tidak terpisahkan. Masyarakat menurut Berger merupakan realitas objektif sekaligus subjektif. Sebagai realitas objektif, masyarakat berada di luar diri manusia dan berhadapan dengannya. Sebagai realitas subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan.

Proses konstruksi sosial merujuk pada teori Berger & Luckmann (1990) berlangsung melalui interaksi sosial yang dialektis dari tiga bentuk realitas yang menjadi *entry concept* yaitu:

- a. *Objective reality*, merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.
- b. *Symbolic reality*, merupakan semua ekspresi simbolik dari apa yang dihayati sebagai objective reality.
- c. *Subjective reality*, merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam poses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan yang lain dalam sebuah struktur sosial. Dengan melalui proses eksternalisasi individu secara kolektif berpotensi melakukan objektivikasi, memunculkan konstruksi *objective reality* yang baru.

Ada beberapa asumsi dasar dari Teori Konstruksi Sosial Berger & Luckmann (1990). Asumsi-asumsi tersebut adalah:

- a. Realitas merupakan hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya.
- b. Hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial tempat pemikiran itu timbul bersifat berkembang dan dilembagakan.
- c. Kehidupan masyarakat itu dikonstruksi secara terus-menerus.
- d. Membedakan antara realitas dan pengetahuan.

Konstruksi sosial merupakan sosiologi pengetahuan, maka implikasinya harus menekuni pengetahuan yang ada dalam masyarakat dan sekaligus proses-proses yang membuat setiap perangkat pengetahuan yang ditetapkan sebagai kenyataan. Sosiologi pengetahuan harus menekuni apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan dalam masyarakat Budi Prasajo, (2015).

Berger & Luckmann (1990) mengatakan bahwa terjadi hubungan dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika tersebut terjadi melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia socio-kultural sebagai produk manusia. Pada tahap ini manusia mencurahkan atau mengekspresikan diri dalam berbagai hal di dunia, baik secara fisik maupun mental. Objektifikasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi. Objektifikasi merupakan hasil yang telah dicapai baik secara mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi, yang menghasilkan realitas objektif dan berada di luar manusia. Internalisasi adalah suatu tahap di mana individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya. Proses internalisasi merupakan proses penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektivitas individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Melalui internalisasi, manusia merupakan hasil dari masyarakat atau *man is social product*.

Teori konstruksi sosial Berger & Luckmann (1990) mencoba mengadakan sintesa antara fenomena-fenomena sosial yang tersirat dalam tiga momen dan memunculkan suatu konstruksi kenyataan sosial yang dilihat dari segi asal-muasalnya merupakan hasil ciptaan manusia, buatan interaksi intersubjektif.

Masyarakat adalah sebagai kenyataan obyektif sekaligus menjadi kenyataan subjektif. Sebagai kenyataan obyektif, masyarakat seperti berada di luar diri manusia dan berhadapan dengannya. Sedangkan sebagai kenyataan subjektif, individu berada di dalam masyarakat itu sebagai bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat adalah pembentuk individu. Kenyataan atau realitas sosial itu bersifat ganda dan bukan tunggal, yaitu kenyataan subjektif dan obyektif. Kenyataan atau realitas obyektif adalah kenyataan yang berada di luar diri manusia, sedangkan kenyataan subjektif adalah kenyataan yang berada di dalam diri manusia.

Berger & Luckmann (1990) menemukan konsep untuk menghubungkan antara yang subjektif dan obyektif itu melalui konsep dialektika. Yang dikenal sebagai eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri di tengah lembaga-lembaga sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya.

Di dalam kehidupan ini ada aturan-aturan atau hukum-hukum yang menjadi pedoman bagi berbagai institusi sosial. Aturan itu sebenarnya adalah produk manusia untuk melestarikan keteraturan sosial, sehingga meskipun aturan di dalam struktur sosial itu bersifat mengekang, tidak menutup kemungkinan adanya “pelanggaran” yang dilakukan oleh individu. Pelanggaran dari aturan itulah yang disebabkan oleh proses eksternalisasi yang berubah-ubah

dari individu atau dengan kata lain ada ketidakmampuan individu menyesuaikan dengan aturan yang digunakan untuk memelihara ketertiban sosial tersebut. Oleh karena itu, problem perubahan berada di dalam proses eksternalisasi ini. Jadi di dalam masyarakat yang lebih mengedepankan “ketertiban sosial” individu berusaha sekeras mungkin untuk menyesuaikan diri dengan peranan-peranan sosial yang sudah dilembagakan, sedangkan bagi masyarakat yang senang kepada “kekisruhan sosial” akan lebih banyak ketidaksukaannya untuk menyesuaikan dengan peranan-peranan sosial yang telah terlembagakan.

Hal ini yang termasuk masyarakat sebagai kenyataan obyektif adalah legitimasi. Fungsi legitimasi adalah untuk membuat obyektivasi yang sudah dilembagakan menjadi masuk akal secara obyektif. Misalnya itologi, selain memiliki fungsi legitimasi terhadap perilaku dan tindakan, juga menjadi masuk akal ketika mitologi tersebut difahami dan dilakukan. Untuk memelihara universum itu diperlukan organisasi sosial. Hal ini tidak lain karena sebagai produk historis dari kegiatan manusia, semua universum yang dibangun secara sosial itu akan mengalami perubahan karena tindakan manusia, sehingga diperlukan organisasi sosial untuk memeliharanya. Ketika pemeliharaan itu dibangun dengan kekuatan penuh, maka yang terjadi adalah *status quo*.

Masyarakat juga sebagai kenyataan subjektif atau sebagai realitas internal. Untuk menjadi realitas subjektif, diperlukan suatu sosialisasi yang berfungsi untuk memelihara dan mentransformasikan kenyataan subjektif tersebut. Sosialisasi selalu berlangsung di dalam konsep struktur sosial tertentu, tidak hanya isinya tetapi juga tingkat keberhasilannya. Jadi analisis terhadap sosial mikro atau sosial psikologis dari fenomena-fenomena internalisasi harus selalu dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman sosial-makro tentang aspek-aspek strukturalnya.

Struktur kesadaran subjektif individu dalam sosiologi pengetahuan menempati posisi yang sama dalam memberikan penjelasan kenyataan sosial. Setiap individu menyerap bentuk tafsiran tentang kenyataan sosial secara terbatas, sebagai cermin dari dunia obyektif. Dalam prosen internalisasi, tiap individu berbeda-beda dalam dimensi penyerapan, ada yang lebih menyerap aspek ekstern, ada juga yang lebih menyerap bagian intern. Tidak setiap individu dapat menjaga keseimbangan dalam penyerapan dimensi obyektif dan dimensi kenyataan sosial itu. Kenyataan yang diterima individu dari lembaga sosial, menurut Berger & Luckmann (1990), membutuhkan cara penjelasan dan pembenaran atas kekuasaan yang sedang dipegang dan dipraktikkan.

Dengan demikian, hubungan antara individu dengan institusinya adalah sebuah dialektika (intersubjektif) yang diekspresikan dengan tiga momen : *society is human product. Society is an objective reality. Human is sosial product.* (Masyarakat adalah produk manusia. Masyarakat adalah suatu kenyataan sasaran. Manusia adalah produk sosial). Dialektika ini dimediasikan oleh pengetahuan yang disandarkan atas memori pengalaman di satu sisi dan oleh peranan-peranan yang merepresentasikan individu dalam tatanan institusional Waters (1994).

Menurut teori konstruk sosial, yang dikembangkan Peter L. Berger, realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi subjektif dan objektif Wuthnow dkk (2013). Manusia merupakan subjek dalam menciptakan realitas sosial yang objektif melalui proses eksternalisasi, sebagaimana manusia mempengaruhinya melalui proses internalisasi yang mencerminkan realitas subjektif Woodhead (2001). Setiap individu yang mempunyai dimensi subjektif yang akan berhadapan dengan orang berpengaruh yang dipahami sebagai dimensi realitas objektif Ngangi (2019).

Proses subjektivasi dan objektivasi serta eksternalisasi terbentuklah realitas sosial Yuningsih (2006). Dalam perjalanan se-

jarahnya, realitas sosial dari masa silam ke masa kini, ditata dan diterima, untuk melegitimasi konstruksi sosial yang sudah ada dan memberikan makna. Dunia manusia ditandai oleh keterbukaan, dan perilakunya hanya sedikit saja yang ditentukan oleh naluri. Ia dengan sadar membentuk perilakunya, memaksakan suatu tertib pada pengalamannya Ngangi (2019). Hal ini berlangsung secara terus menerus, dengan kesadaran intensionalnya selalu terarah dan dipengaruhi oleh objek yang berada diluarnya, hingga relasinya dengan masyarakatnya dan segala pranatanya, bersinggungan secara dialektis Moesa (2007).

C. Pemahaman Komite Sekolah dan Mutu Pendidikan

Komite sekolah adalah sebagai lembaga mandiri dan nonhierarkis yang mengandung makna bahwa secara struktural para anggota tidak tunduk pada orang-orang yang menempati posisi struktur di luar dirinya. Komite sekolah merupakan insan yang otonom, yang hanya tunduk pada anggaran dasar dan kaidah-kaidah yang mereka kembangkan sendiri Khairil (2012).

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah Rusman (2008). Nama badan disesuaikan dengan kondisi yang ada dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis sekolah , atau nama lain yang disepakati.

UU Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 25 berbunyi “Komite sekolah/ sekolah adalah lembaga mandiri yang terdiri dari orang tua/wali peserta didik, warga sekolah, dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan”. Ditegaskan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/U/2002, bahwa komite seko-

lah merupakan badan independen yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan, dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan. baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun pendidikan luar sekolah. Tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut: a) Menampung dan menyalurkan aspirasi dan inisiatif masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. b) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. c) Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan menurut Kepmendiknas nomor: 044/U/2002.

Komite sekolah sangat dominan dalam pengambilan keputusan perencanaan sekolah terutama dalam pengambilan keputusan anggaran sekolah (persetujuan anggaran sekolah) dan pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah (persetujuan rencana perbaikan sekolah) Gamage (2009). Komite sekolah sebagai lembaga pertimbangan memiliki tiga fungsi: memberikan pertimbangan dalam perencanaan sekolah, pelaksanaan program pendidikan, dan pengelolaan sumber daya pendidikan.

Komite sekolah adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menetapkan visi, misi, dan tujuan sekolah, menetapkan dan memantau anggaran operasional tahunan, menggunakan, mengelola dan mengevaluasi, serta menentukan dan meninjau kebijakan dan praktik untuk mendukung pencapaian siswa. Peran Komite Sekolah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan peran yang saling terkait antara satu peran dengan peran lainnya. Dapat dijelaskan sebagai berikut: lembaga penasehat dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan. b Pendukung (supporting agency) baik berwujud finansial, pemikiran, maupun

tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan educational c. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan dengan masyarakat di satuan pendidikan Halik et al.(2019).

Komite sekolah memiliki peran yang sangat signifikan dalam memajukan sekolah, khususnya di sekolah dasar. Masyarakat hadir melalui komite sekolah dan bersama-sama dengan pengelola satuan pendidikan untuk merancang gedung sekolah, baik dari segi visi-misi, sarana prasarana, maupun program pendidikan dan pedagogi. Sinergi sekolah dan komite sekolah merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan kualitas program pendidikan dan pembelajaran Halik et al. (2019).

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, pembentukannya harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Adapun peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai berikut :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat di satuan pendidikan Irawan dkk (2021).

Mutu berarti kualitas, derajat, tingkat Al-Barry (1994). Mutu merupakan tingkat beberapa karakteristik melekat yang dapat memenuhi persyaratan tertentu Sugian (2006). Menurut oleh

Sallis (2006) menyebutkan mutu merupakan suatu hal yang berhubungan dengan keinginan dan harga diri. Arcaro (2007) menegaskan bahwa mutu sebagai suatu proses yang terstruktur dalam memperbaiki lulusan yang dihasilkan.

Menurut Crosby (1979) mutu ialah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Crosby's Quality Vaccine terdiri dari atas tiga unsure, yaitu Determinasi (*determination*), Pendidikan (*education*), dan Pelaksanaan (*implementation*). Determinasi adalah suatu sikap dari manajemen untuk tidak menerima proses, produk, atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan, seperti reject, scrap, lead delivery, wrong shipment, dan lain-lain.

Menurut Crosby setiap perusahaan atau lembaga pendidikan harus divaksinasi agar memiliki antibody untuk melawan ketidaksesuaian terhadap persyaratan (*non conformance*). Ketidaksesuaian ini merupakan sebab, sehingga harus dicegah, dan dihilangkan. Dalam menyiapkan vaksinasi, suatu perusahaan perlu membuat lima unsur, yakni :

1. Integritas

CEO (*Cheif Executive Officer*) harus dapat menjamin bahwa pelanggan menerima apa yang telah dijanjikan, seperti kualitas produk/jasa, kualitas penyampaian, keamanan dan lain-lain. COO (*Chief Operating Officer*) harus memiliki pemikiran bahwa kualitas di atas segala-galanya.

2. Sistem

Sistem adalah serangkaian prosedur dan kegiatan individu di dalam tim untuk menjamin kualitas. Untuk itu diperlukan pendidikan kualitas yang merupakan proses untuk memban-

tu karyawan agar memiliki bahasa yang sama dalam kualitas dan mengerti peran mereka dalam upaya peningkatan kualitas.

3. Komunikasi

Setelah memiliki bahasa yang sama, maka komunikasi akan lebih mudah terjalin. Komunikasi di sini adalah proses mengirim dan menerima informasi mengenai kualitas dan mendukung peningkatan kualitas. Semua informasi mengenai usaha peningkatan kualitas disampaikan kepada seluruh karyawan.

4. Operasi

Operasi dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan organisasi untuk menjaga agar tetap berfungsi. Hal ini dilaksanakan dengan mendidik pemasok agar mengirim produk dan jasa sesuai dengan persyaratan. Selain itu prosedur, produk dan sistem dikualifikasi dan dibuktikan sebelum pelaksanaan dan diuji secara terus-menerus.

5. Kebijakan

Dibutuhkan pula adanya pernyataan dan pengarahan dari manajemen yang memperjelas di mana mereka berdiri dan menentukan sikap tentang kualitas. Kebijakan harus jelas dan tidak ragu-ragu. Dalam dunia pendidikan, seorang manajer atau kepala sekolah juga harus memberikan vaksin kualitas kepada bawahannya. Stakeholder berperan dalam tercapainya tujuan bersama. Seluruh komponen yang ada di sekolah harus menjamin integritasnya bahwa pelanggan benar-benar menerima kualitas yang diinginkan. Seluruh pihak harus berkomitmen bahwa kualitas adalah segala-galanya.

Menurut Juran (1986) kualitas adalah kesesuaian untuk penggunaan (*fitness for use*), ini berarti bahwa suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh pengguna. Perencanaan mutu menjadi proses awal dalam

suatu siklus manajemen kualitas. Trilogi Juran (1986) menunjukkan tiga proses penting yang saling terkait, yaitu perencanaan kualitas *quality planning*, *quality control*, dan *quality improvement*. Tahap perencanaan kualitas menyangkut penentuan kebutuhan *customer* dan pengembangan produk beserta proses yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pengendalian kualitas menjadi proses penting untuk memastikan bahwa realisasi operasional produksi sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Peningkatan kualitas menjadi suatu proses bagi perusahaan untuk memperoleh konsumen dan menjadikannya sebagai pelanggan tetap. Usaha untuk peningkatan kualitas tidak terlepas dari perencanaan kualitas, karena kualitas yang baik disebabkan oleh perencanaan yang tepat.

Proses perencanaan kualitas merupakan penetapan design, layanan, atau proses yang dibutuhkan customer, usaha, dan kebutuhan operasional untuk menghasilkan produk sebelum diproduksi. Pendekatan Juran terhadap perencanaan kualitas (*quality planning*) melibatkan beberapa aktivitas yakni: 1) Identifikasi pelanggan; 2) Menentukan kebutuhan pelanggan; 3) Menciptakan keistimewaan produk yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan; 4) Menciptakan proses yang mampu menghasilkan keistimewaan produk di bawah kondisi operasi; 5) Mentransfer/ mengalihkan proses ke operasi Lestari (2015).

Saat mendiskusikan masalah mengenai perbaikan mutu pendidikan, yang dibahas biasanya mengenai perbaikan peringkat kenaikan kelas. Dalam perguruan tinggi, perbaikan lebih cenderung pada kualitas dosen. Secara umum, guru hanya berkonsentrasi membantu siswa belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan. Arcaro (2007) memaknai mutu dengan 2 kategori yaitu: 1) mutu dengan menggunakan huruf “m” kecil “mutu”; seorang dosen yang sudah lama menerapkan mutu, tetapi hanya memberikan pembinaan yang bersifat instrumental, 3) mutu dengan huruf besar “M”

besar “Mutu”, membuat setiap dosen bertanggung jawab terhadap mutu dengan merubah metode kerja dan memperbaiki mutu lulusan yang dihasilkan. Setiap dosen mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan, membentuk suasana dan lingkungan belajar yang menyenangkan serta menciptakan pembelajaran yang lebih baik.

Komitmen mutu sebagai suatu sikap yang dirancang dalam suatu tempat. Mutu diperlukan proses untuk memperbaiki secara terus menerus atau berkelanjutan yang dapat diukur. Mutu pendidikan seruing diindikasikan sebagai suatu kondisi baik, telah memenuhi persyaratan dan memenuhi komponen perguruan tinggi. Komponen-komponen tersebut di antaranya rekrutmen, proses, lulusan, fasilitas, biaya dan tenaga kependidikan. Mutu pendidikan merupakan salah satu penentu daya saing suatu bangsa sehingga untuk bertahan dalam persaingan global, maka perguruan tinggi yang bermutu sangat dibutuhkan.

Meningkatkan mutu pendidikan menjadi sasaran pembangunan dalam bidang pendidikan nasional dan menjadi bagian integral sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Hal tersebut sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional.

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Mutu pendidikan harus dilakukan untuk tercapainya kemajuan yang berlandaskan oleh suatu perubahan yang terencana dan berkelanjutan. Menurut Sagala (2010) meningkatkan mutu dilakukan dengan jalan, yaitu: 1) peningkatan mutu berorientasi akade-

mik sebagai dasar dalam melaksanakan perubahan, 2) peningkatan mutu berorientasi keterampilan hidup yang penting.

Sagala (2010) juga menyatakan bahwa lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu, dengan syarat prestasi akademik yaitu: 1) nilai kelulusan sesuai dengan standart, 2) mempunyai nilai-nilai jujur, ketakwaan, kesopanan dan sebagainya, 3) mempunya tanggung jawab yang tinggi, serta mampu mewujudkan keterampilan sesuai dengan standar ilmu yang dipelajari di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan bermutu merupakan lembaga pendidikan yang menghasilkan siswa berkualitas, memiliki kemampuan, wawasan luas dan keterampilan yang sesuai dengan keilmuan yang dipelajarinya sehingga mampu berkompetisi dengan dunia kerja dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek moral dalam kehidupannya.

Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks “proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses pembelajaran.

Kualitas dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil

pendidikan (*student achievement*) dapat berupa hasil test kemampuan akademis, misalnya ulangan ujian sekolah. Dapat pula prestasi dibidang lain seperti di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (*intangible*) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya Umaedi (1999). Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan factor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggi-tingginya.

Jadi pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pelopor dalam pembaharuan dan perubahan dengan cara memberdayakan sumber-sumber pendidikan secara optimal melalui pembelajaran yang baik dan kondusif. Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (*akhlak*) yang baik dan kuat.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas, yaitu lulusan yang memil-

ki prestasi akademik dan non-akademik yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan bangsa).

Standar/parameter adalah ukuran atau barometer yang digunakan untuk menilai atau mengukur sesuatu hal. Ini menjadi penting untuk kita ketahui, apalagi dalam rangka mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas. Kalau kita mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP.) No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan diatas, ada delapan (8) hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu :

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Standar Isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
3. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan penjabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
5. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

6. Standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
8. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar Peserta Didik.

Standar nasional pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Juga bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Salah satu standar diatas yang paling penting untuk diperhatikan yaitu standar pendidik dan kependidikan. Di mana seorang pendidik harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini, yaitu : kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan beberapa hal berikut ini:

a. Peningkatan Kualitas Guru

Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian

sejahtera lahir dan bathin, yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Oleh karena itu harus mampu mendidik diperbagai hal, agar ia menjadi seorang pendidik yang proposional. Sehingga mampu mendidik peserta didik dalam kreativitas dan kehidupan sehari-harinya. Untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran, perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Mengikuti Penataran

Menurut para ahli bahwa penataran adalah semua usaha pendidikan dan pengalaman untuk meningkatkan keahlian guru menyelaraskan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang masing-masing Surya (2012). Sedangkan kegiatan penataran itu sendiri di tujuan:

- a. Mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya masing-masing.
- b. Meningkatkan efesiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal.
- c. Perkembangan kegairahan kerja dan peningkatan kesejahteraan Surya (2012).

Jadi penataran itu dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, keahlian dan peningkatan terutama pendidikan untuk menghadapi arus globaliasi.

2. Mengikuti Kursus-Kursus Pendidikan

Hal ini akan menambah wawasan, adapun kursus-kursus biasanya meliputi pendidikan arab dan inggris serta komputer.

3. Memperbanyak Membaca

Menjadi guru professional tidak hanya menguasai atau membaca dan hanya berpedoman pada satu atau beber-

apa buku saja, guru yang profesional haruslah banyak membaca berbagai macam buku untuk menambah bahan materi yang akan disampaikan sehingga sebagai pendidik tidak akan kekurangan pengetahuan-pengetahuan dan informasi-informasi yang muncul dan berkembang di dalam masyarakat.

4. Mengadakan Kunjungan ke Sekolah Lain (Studi Komperatif)

Suatu hal yang sangat penting seorang guru mengadakan kunjungan antar sekolah sehingga akan menambah wawasan pengetahuan, bertukar pikiran dan informasi tentang kemajuan sekolah. Ini akan menambah dan melengkapi pengetahuan yang dimilikinya serta mengatai permasalahan-permasalahan dan kekurangan yang terjadi sehingga peningkatan pendidikan akan bisa tercapai dengan cepat Febriana (2019).

5. Mengadakan Hubungan dengan Wali Siswa

Mengadakan pertemuan dengan wali siswa sangatlah penting sekali, karena dengan ini guru dan orang tua akan dapat saling berkomunikasi, mengetahui dan menjaga peserta didik serta bisa mengarahkan pada perbuatan yang positif. Karena jam pendidikan yang diberikan di sekolah lebih sedikit apabila dibandingkan jam pendidikan di dalam keluarga.

b. Peningkatan Kualitas Materi

Dalam rangka peningkatan pendidikan maka peningkatan materi perlu sekali mendapat perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Hal ini akan memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan baik dan benar. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan sesuai yang

tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau sumber lain yang berkaitan dan lebih actual dan hangat. Sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi mempelajari pelajaran.

c. Peningkatan dalam Pemakaian Metode

Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, maka sebagai salah satu indicator dalam peningkatan kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode. Yang dimaksud dengan peningkatan metode di sini, bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, akan tetapi bagaimana caranya penerapannya atau penggunaannya yang sesuai dengan materi yang disajikan, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar. Pemakaian metode ini hendaknya bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dan jenuh atau monoton. Untuk itulah dalam penyampaian metode pendidik harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Selalu berorientasi pada tujuan.
2. Tidak hanya terikat pada suatu alternatif saja.
3. Mempergunakan berbagai metode sebagai suatu kombinasi, misalnya: metode ceramah dengan tanya jawab.

Jadi usaha tersebut merupakan upaya meningkatkan kualitas pendidikan pada peserta didik di era yang semakin modern.

d. Peningkatan Sarana

Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah Roestiyah N.K (2010). Dari segi sarana tersebut perlu diperhatikan adanya usaha meningkatkan sebagai berikut:

1. Mengerti secara mendalam tentang fungsi atau kegunaan media pendidikan
2. Mengerti penggunaan media pendidikan secara tepat dalam interaksi belajar mengajar
3. Pembuatan media harus sederhana dan mudah
4. Memilih media yang tepat sesuai dengan tujuan dan isi materi yang akan diajarkan.

Semua sekolah meliputi peralatan dan perlengkapan tentang sarana dan prasarana, sarana sekolah meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, contoh: gedung sekolah (*school building*), ruangan meja, kursi, alat peraga, dan lain-lainnya. Sedangkan prasarana merupakan semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar atau pendidikan di sekolah, sebagai contoh: jalan menuju sekolah, halaman sekolah, tata tertib sekolah dan semuanya yang berkenaan dengan sekolah Septiana et al. (2018).

e. Peningkatan Kualitas Belajar

Dalam setiap proses belajar mengajar yang dialami peserta didik selamanya lancar seperti yang diharapkan, kadang-kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar. Kendala tersebut perlu diatasi dengan berbagai usaha sebagai berikut:

1. Memberi Rangsangan

Minat belajar seseorang berhubungan dengan perasaan seseorang. Pendidikan harus menggunakan metode yang sesuai sehingga merangsang minat untuk belajar dan mempelajari baik dari segi bahasa maupun mimik dari wajah dengan memvariasikan setiap metode yang dipakai. Dari sini menimbulkan yang namanya cinta terhadap bidang studi, sebab pendidik mampu memberikan rangsangan ter-

hadap peserta didik untuk belajar, karena yang disajikan benar-benar mengenai atau mengarah pada diri peserta didik yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya setelah peserta didik terangsang terhadap pendidikan maka pendidik tinggal memberikan motivasi secara kontinew. Oleh karena itu pendidik atau lembaga tinggal memberikan atau menyediakan sarana dan prasarana saja, sehingga peserta didik dapat menerima pengalaman yang dapat menyenangkan hati para peserta didik sehingga menjadikan peserta didik belajar semangat.

2. Memberikan Motivasi Belajar

Motivasi adalah sebagai pendorong peserta didik yang berguna untuk menumbuhkan dan menggerakkan bakat peserta didik secara integral dalam dunia belajar, yaitu dengan diambil dari sistem nilai hidup peserta didik dan ditujukan kepada penjelasan tugas-tugas. Motivasi merupakan daya penggerak yang besar dalam proses belajar mengajar, motivasi yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa:

a. Memberikan penghargaan.

Usaha-usaha meyenangkan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi yang bagus, baik berupa kata-kata, benda, simbol atau berupa angka (nilai). Penghargaan ini bertujuan agar peserta didik selalu termotivasi untuk lebih giat belajar dan mampu bersaing dengan teman-temannya secara sehat, karena dengan itu pendidik akan mudah meningkatkan kualitas pendidikan.

b. Memberikan hukuman.

Pemberian hukuman ini bersifat mendidik artinya bentuk hukuman itu sendiri berkaitan dengan pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kesalahan.

c. Mengadakan kompetisi dan lomba.

Pengadaan ini dipergunakan untuk meningkatkan prestasi peserta didik untuk membantu peserta didik dalam pembentukan mental yang tangguh selain pembentukan pengetahuan. untuk membantu proses pengajaran yang selalu dimulai dari hal-hal yang nyata bagi siswa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Paradigma Penelitian

Paradigma dalam penelitian ini adalah paradigme konstruktivisme. Menurut Creswell (2015) paradigma konstruktivisme sosial individu-individu berusaha memaknai makna-makna yang beragam. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami kejadian atau peristiwa sosial yang merupakan karakteristik dari paradigma konstruktivisme. Menurut Ritzer (1992) paradigma merupakan suatu perangkat kepercayaan, nilai-nilai suatu pandangan mengenai dunia sekitar.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma yang hampir merupakan antithesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan Poerwandari (2007). Konstruktivisme berangkat dari keyakinan bahwa realitas itu beragam, realitas berada dalam beragam konstruksi mental yang bersifat subyektif pada diri manusia atau masyarakat di dasarkan pada pengalaman sosial, agama, budaya dan nilai-nilai yang bersifat lokal. Menurut Neuman (2015) menjelaskan bahwa paradigma konstruktivisme merupakan upaya untuk memahami dan menjelaskan tindakan sosial yang bermakna. Berger & Luckmann (1990) mengatakan bahwa terjadi hubungan dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan mas-

variat menciptakan individu. Proses dialektika tersebut terjadi melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi.

Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memilih konstruktivisme dengan jenis fenomenologis. Penelitian berdasarkan pada fenomenologis dari Husserl (1859-1928) kemudian dikembangkan oleh Weber (1864-1920) ke dalam sosiologi. Dalam pandangan Weber, tingkah laku manusia tampak merupakan konsekuensi-konsekuensi dari manusia sebelumnya, pengertian, batasan-batasan, kompleksitas maka yang hidup di kepala manusia pelaku, membentuk tingkah laku secara eksplisit.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) penelitian pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna suatu peristiwa serta bagaimana peristiwa tersebut pengaruhnya dengan manusia dalam kondisi dan situasi tertentu. Karakteristik pendekatan fenomenologis adalah sebagai berikut :1) Tidak berasumsi mengenai dengan berbagai hal yang dianggap berarti bagi manusia menjadi subjek penelitian, 2) Memulai penelitian dengan tenang berfikir agar bisa mengungkapkan apa yang diteliti. 3) Melakukan penelitian sangat mendalam sampai pada aspek subjektif perilaku manusia, kedalam dunia konseptual subjek dan mampu memahami makna bagaimana terkonstruksi disekitar peristiwa kehidupannya sehari-hari dari yang diteliti, 4) Mempercayai adanya suatu cara dalam kehidupan manusia yang dapat digunakan dalam menafsirkan pengalaman setiap individu melalui interaksinya orang lain yang menimbulkan makna atas pengalaman tersebut menjadi sebuah realita, 5) Pendekatan ini penelitian kualitatif menggunakan pendekatan yang mana peneliti menggunakan pandangan dari subjek yang ditelitinya.

Fenomenologi menggali data dalam upaya menemukan makna dari hal paling mendasar dan esensial dari fenomena, realitas serta pengalaman yang dialami oleh objek penelitian. Penelitian fenomenologi dapat dimulai dengan memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang diteliti, melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek. Kemudian peneliti melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena yang ada.

Penelitian fenomenologi bersifat induktif. Pendekatan dipakai deskripsi yang dikembangkan filsafat fenomenologi. Fokus filsafat fenomenologi pemahaman tentang respon dengan adanya kehadiran atau keberadaan manusia, bukan sekedar pemahaman atas bagian yang spesifik atau perilaku khusus. Tujuan penelitian fenomenologikal adalah menjelaskan pengalaman apa yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk interaksinya dengan orang lain.

Peneliti menggunakan paradigma ini berdasarkan kepada penelitian yang dilakukan di mana komite sekolah dan pengelola sekolah membangun suatu kelompok dimulai dari awal dengan melihat pada situasi dan kondisi lembaga pendidikan yang memerlukan peningkatan mutu, sehingga dengan adanya interaksi dari informan yang dapat memberikan informasi terhadap tema penelitian ini dapat menemukan konsep komite sekolah dan upaya yang dilakukan komite sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan paradigma dan permasalahan yang dipilih dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit dipahami, peneliti ingin menggali pengalaman

individu dalam mendefinisikan suatu permasalahan dan masyarakat yang menjadi informan bebas mengungkapkan definisinya tersebut.

Penelitian dilakukan dengan menggali informasi atau fakta-fakta mengenai peran komite sekolah dalam peningkatan mutu dengan data yang digunakan berupa catatan-catatan verbal atau semi struktur dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2015) penelitian kualitatif ini berusaha untuk memaknai atau menafsirkan fenomena dalam sudut pandang makna-makna yang diberikan oleh masyarakat kepada peneliti. Pendekatan penelitian kualitatif menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang diteliti Moleong, (2002).

C. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu deskriptif dalam penelitian ini. Menurut H. Hadari Nawawi (1987) Penelitian bertipe deskriptif ini memiliki batasan pada usaha peneliti dalam memaparkan suatu masalah, keadaan dan atau peristiwa dengan apa adanya sehingga bersifat hanya sekedar memaparkan fakta atau fact finding. Tipe Penelitian deskriptif memberikan keterangan secara sistematis, faktual atau nyata, dan juga akurat tentang fakta, sifat juga situasi yang diselidiki. Dengan Tipe penelitian ini, peneliti ingin menggambarkan sekaligus menjelaskan dan menganalisis konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan SDN di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.

D. Lokasi dan Subjek Penelitian

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data yang bisa dimanfaatkan dan digali oleh peneliti. Dalam penelitian ini lokasinya adalah di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Keca-

matan Tulungagung Kabupaten Tulungagung yang mana sekolah dasar negeri ini berada di daerah dataran rendah dan perkotaan yang masing-masing lembaga sastuan pendidikan ini mempunyai cirikhas masing-masing dari program-program yang telah disepakati antara komite sekolah dan kepala sekolah. Sekolah Dasar Negeri antara lain :

1. SDN 1 Kampungdalem dengan Ketua Bapak Imam Suyadi
2. SDN 4 Kampungdalem dengan Ketua Bapak Kamirin
3. SDN 7 Kampungdalem dengan Ketua Bapak Wahyu
4. SDN 1 Kepatihan dengan Ketua Bapak Suwarsono
5. SDN 2 Kepatihan dengan Ketua Bapak Suwarsono
6. SDN 1 Jepun dengan Ketua Bapak Sugeng
7. SDN 1 Karangaaru dengan Ketua Ibu Siti
8. SDN 1 Tretek dengan Ketua Bapak Tolib
9. SDN Sembung dengan Ketua Bambang
10. SDN 1 Botoran dengan Ketua Bapak M Sururus

Jumlah subyek dalam penelitian ini berjumlah 10 komite sekolah dasar negeri yang telah terlibat dalam komite sekolah minimal 5 tahun terakhir, karena dimungkinkan adanya peralihan jabatan atau struktur organisasi di sekolah. Selain itu memilih komite sekolah yang aktif mewacanakan, merancang dan mewujudkan peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah juga bersedia menjadi subyek penelitian dengan memberikan informasi yang sebenarnya tentang konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan SDN. Berkenan mendukung pencapaian akurasi/validitas data terkait peningkatan mutu pendidikan di SDN di wilayah Tulungagung. Penetapan subyek penelitian ini dengan pertimbangan peneliti pada studi pendahuluan dan wawancara pendahuluan dengan kepala Dinas Pendidikan pemuda dan olahraga Tulungagung.

E. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball* . Menggunakan tehnik ini dikarenakan beberapa informan kunci yang memberikan informasi pada informan lain terkait konsep informasi yang didapatkan, sekaligus menganalisa kondisi dilapangan apakah informasi tersebut sesuai dengan keadaan sehingga diharapkan tidak ada permasalahan. Didalam teknik *snowball* ini, untuk pemilihan informan dipilih berdasarkan kerahasiaan sekaligus melindungi informan. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk interaksi langsung antara dua orang, wawancara dilakukan antara orang yang memberi informasi dan orang yang diberi informasi, Moleong (2002). Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada komite sekolah. Walaupun pada awalnya peneliti sudah mempersiapkan daftar pertanyaan, pada pelaksanaannya tidak kaku begitu mengikuti daftar pertanyaan yang telah dibuat, sehingga wawancara sesuai respons dan jawaban subjek.

Peneliti akan mewawancarai para komite sekolah atau yang telah ditunjuk untuk dilakukan wawancara sesuai dengan kriteria , yang mengetahui keadaan, situasi, kejadian yang berhubungan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti juga akan menggali informasi kepada informan yaitu Kepala dinas pendidikan. Wawancara ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan peneliti tentang konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan. Adapun Kisi-kisi wawancara yang disusun peneliti adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kisi-kisi wawancara penelitian

No	Aspek	Indikator	Jumlah Butir	Butir pertanyaan
1	Profil SDN	1. Kondisi Fisik	1	1
		2. Visi dan Misi	1	2
		3. Struktur organisasi	1	3
		4. Kurikulum	1	4
		5. Fasilitas	1	5
		6. Lingkungan sekolah	2	6,7
		7. Potensi Pendidik	1	8
		8. Potensi Peserta Didik	1	9
		9. Potensi Tenaga Kependidikan	1	10
		10. Ekstrakurikuler	1	11
		11. Organisasi sekolah	1	12
2	Konstruksi sosial komite sekolah tentang mutu pendidikan	1. Eksternalisasi	2	1,2
		2. Objektifikasi	2	3,4
		3. Internalisasi	2	5,6
3	Implimentasi konstruksi sosial komite sekolah tentang mutu pendidikan.	1. Eksternalisasi	2	1,2
		2. Objektifikasi	2	3,4
		3. Internalisasi	2	5,6

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pertama yang akan dilakukan dalam langkah pengumpulan data. Pada langkah ini peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk melakukan pengamatan terhadap peristiwa yang ada di SDN Kecamatan Tulungagung. Dengan mengobservasi akan menghasilkan catatan lapangan yang berupa catatan terkait apa yang dilihat, didengar, atau dirasakan saat

melakukan observasi. Adapun Kisi-kisi observasi yang disusun peneliti adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Kisi-kisi observasi penelitian

No	Aspek	Indikator	Jumlah Butir	Butir pertanyaan
1	Profil SDN	1. Kondisi Fisik 2. Visi dan Misi 3. Struktur organisasi 4. Kurikulum 5. Fasilitas 6. Lingkungan sekolah 7. Potensi Pendidik 8. Potensi Peserta Didik 9. Potensi Tenaga Kependidikan 10. Ekstrakurikuler 11. Organisasi sekolah	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1	1 2 3 4 5 6,7 8 9 10 11 12
2	Konstruksi sosial komite sekolah tentang mutu pendidikan	1. Eksternalisasi 2. Objektifikasi 3. Internalisasi	2 2 2	1,2 3,4 5,6
3.	Implimentasi konstruksi sosial komite sekolah tentang mutu pendidikan.	1. Eksternalisasi 2. Objektifikasi 3. Internalisasi	2 2 2	1,2 3,4 5,6

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang dimaksud adalah berbentuk buku, koran, majalah, nakalah, dokumen, video dan lainnya yang dapat

membantu memberikan informasi, prespektif dan kesimpulan sementara sehingga menguatkan data atas data yang terkumpul dari observasi dan wawancara di lapangan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni, patung, film, dan sebagainya. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi penting dilakukan oleh peneliti, karena peneliti mencoba menganalisa bagaimana konstruksi sosial Komite Sekolah atas mutu pendidikan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi partisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*indept interview*), dan dokumentasi (*documentation*), dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta dilanjutkan dengan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain, Sugiyono (2015).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada apa yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman dalam, Sugiyono (2015) yaitu:

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data (*data reduction*) adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang didapat dari catatan-catatan yang muncul di lapangan, Trianto, (2010).

Mereduksi data berarti membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta membuang yang dianggap tidak perlu. Dengan demiki-

an, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan.

Reduksi data (*data reduction*) ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dipilih dan dipilah sesuai dengan fokus penelitian. Di dalam proses memilah dan memilih data ini diperlukan ketelitian dan kecermatan. Adapun proses reduksi data (*data reduction*) di dalam penelitian ini adalah catatan-catatan tertulis di lapangan (*field notes*) yang diperoleh peneliti dari hasil observasi partisipatif (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*indept interview*) Reduksi data (*data reduction*) dilakukan oleh peneliti bersamaan dengan proses pengumpulan data. Mengingat bahwa reduksi data ini terjadi secara berulang-ulang dan apabila ditemukan data yang tidak cocok, maka peneliti melakukan pengecekan kembali di SDN Kecamatan Tulungagung untuk memperoleh kevalidan data dalam menjawab fokus penelitian.

Secara rinci kegiatan reduksi yang dilakukan oleh peneliti melalui tiga langkah. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Membuat Ringkasan Kontak

Ringkasan kontak di dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berisi uraian singkat tentang penelaahan terhadap catatan-catatan lapangan. Adapun ringkasan kontak di dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi partisipatif (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*indept interview*) peneliti. Setelah selesai pengumpulan data di lapangan, maka semua catatan-catatan hasil observasi partisipatif (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*indept interview*) peneliti itu dikumpulkan yang selanjutnya diadakan pemfokusan, kemudian peneliti melakukan analisis dan pemahaman serta peringkasan terhadap permasalahan.

han-permasalahan hasil penelitian guna menemukan jawaban yang singkat sesuai dengan fokus penelitian.

2. Membuat Kode

Data-data yang terkumpul melalui observasi partisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*indept interview*), dan dokumentasi (*documentation*) diperkirakan cukup banyak, sehingga untuk menganalisis data itu terlalu sulit. Untuk mengatasi hal tersebut maka, peneliti membuat kode-kode tertentu. Setiap topik liputan dibuat kode yang menggambarkan topik tersebut. Kode-kode tersebut berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam mengenali dan melakukan pengecekan data hasil penelitian dengan tujuan memperoleh kevalidtan data.

3. Menyortir Data

Menyortir data merupakan langkah dalam memilih data untuk satuan data yang diberi kode yang sesuai. Pada saat menyortir atau memilah-milah data, langkah yang ditempuh oleh peneliti adalah memberikan kode tersendiri pada masing-masing data hasil catatan lapangan (*field notes*) dari pelaksanaan observasi partisipatif (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*indept interview*) peneliti dengan para informan kunci (*key informant*) kepala sekolah.

4. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data (*data display*). Penyajian data (*data display*) adalah pengumpulan data-data atau informasi-informasi dari hasil observasi dan wawancara peneliti yang sudah direduksi, Sugiyo (2015). Di dalam penelitian ini, penyajian data (*data display*) dilakukan melalui pengumpulan data-data hasil dari observasi partisipatif (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*indept interview*).

Penyajian data ini diarahkan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan, tersusun secara sistematis, kompleks, dan sederhana, sehingga semakin mudah untuk dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dari bentuk informasi yang kompleks menjadi sederhana namun selektif. Dengan penyajian data akan mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi di lapangan sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan temuan penelitian terkait dengan Konstruksi sosial Komite sekolah atas mutu pendidikan. Dari temuan penelitian inilah peneliti bisa menggunakan dan menjadikan landasan dalam mengambil kesimpulan. Kesimpulan merupakan langkah selanjutnya setelah penyajian data (*data display*) selesai dikerjakan.

Pada langkah penyajian data (*data display*) ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal. Di dalam penelitian ini, setelah data-data diperoleh peneliti dari hasil observasi partisipatif (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terkumpul, maka data yang diambil untuk disajikan adalah data-data yang berhubungan dengan fokus penelitian saja. Di dalam penyajian data ini, peneliti menyajikan data tersebut secara sistematis dalam bentuk uraian naratif. Pelaksanaan penyusunan data-data secara sistematis ini dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di SDN Kecamatan Tulungagung.

5. Verifikasi Data (*conclusion drawing/verification*)

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat se-

mentara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel, Sugiyono (2015).

Penarikan kesimpulan ini dilakukan pada saat kegiatan analisis data berlangsung secara terus-menerus selesai dikerjakan oleh peneliti, baik yang berlangsung di lapangan, maupun setelah selesai di lapangan. Setelah data-data terkumpul, maka peneliti mengadakan penarikan kesimpulan. Dengan adanya penarikan kesimpulan ini, diharapkan peneliti mendapatkan temuan baru yang belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi jelas atau bahkan menjadi sangat jelas setelah diadakan penelitian.

Untuk mengarah pada penarikan kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data yaitu analisis data kasus individu (*individual case*) yang berasal dari observasi partisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*indept interview*), dan dokumentasi (*documentation*) yang didapatkan pada saat melaksanakan penelitian di SDN Kecamatan Tulungagung. Dari hasil analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh kesimpulan final.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam upaya mendapatkan data yang valid atau sah, maka peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kredibilitas

Sebagai instrumen penelitian di sini adalah peneliti sendiri, sehingga sangat dimungkinkan dalam pelaksanaan dilapangan

terjadi kecondongan purbasangka (*bias*). Untuk menghindari hal tersebut, data yang diperoleh perlu diuji kredibilitasnya (derajat kepercayaannya), Lincoln (1985).

Pengecekan kredibilitas atau derajat kepercayaan data penelitian perlu dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar-benar sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi secara wajar dilapangan. Derajat kepercayaan data (*kesahihan data*) dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria (nilai) kebenaran yang bersifat *emik*, baik bagi pembaca maupun bagi subjek yang diteliti.

Lincoln (1985) menyatakan bahwa untuk memperoleh data yang valid dapat ditempuh teknik pengecekan data melalui: (1) observasi dilapangan secara terus menerus (*persilent observation*); (2) triangulasi (*triangulation*) sumber data, metode, dan peneliti lain; (3) pengecekan anggota (*member check*), diskusi teman sejawat (*peer reviewing*); dan (4) pengecekan mengenai kecukupan referensi (*referential adequacy checks*).

Pengujian terhadap kredibilitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber data dan pemanfaatan metode, serta *member check*. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang satu dengan yang lainnya.

Triangulasi metode dilaksanakan dengan cara memanfaatkan penggunaan beberapa metode yang berbeda untuk mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh. Misalnya hasil observasi dibandingkan atau dicek dengan interview, kemudian dicek lagi melalui dokumen yang relevan, dan seterusnya hingga sampai titik jenuh.

Pengecekan data dengan *member check* dilakukan pada subjek wawancara melalui dua cara: *Pertama*, langsung pada saat wawan-

cara dalam bentuk penyampaian ide yang tertangkap oleh peneliti saat wawancara. *Kedua*, tidak langsung dalam bentuk penyampaian rangkuman hasil wawancara yang sudah dibuat oleh peneliti. Dalam hal ini tidak setiap fokus penelitian mendapat *member check*, namun pengakuan kebenaran data oleh pihak-pihak tertentu yang dianggap sumber informasi dari yang sudah diwawancarai dinyatakan cukup mewakili sumber informasi sasaran wawancara.

Reviewing akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan, dan dengan beberapa kolega yang telah bersedia untuk dimintai pertimbangan dan diskusi.

Referential adequacy check yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengarsip data-data yang telah terkumpul selama penelitian lapangan. Arsip-arsip tersebut akan digunakan sebagai bahan referensi untuk mengecek data atau informasi dengan kumpulan-kumpulan hasil penelitian.

2. Transferabilitas

Transferabilitas atau keteralihan dalam penelitian kualitatif dapat dicapai dengan cara “uraian rinci”. Untuk kepentingan ini peneliti berusaha melaporkan hasil penelitiannya secara rinci. Uraian laporan diusahakan dapat mengungkapkan secara khusus segala sesuatu yang diperlukan oleh pembaca, agar para pembaca dapat memahami temuan-temuan yang diperoleh. Penemuan itu sendiri bukan bagian dari uraian rinci melainkan penafsirannya diuraikan secara rinci dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kejadian-kejadian nyata. Hal ini dapat terlihat sebagaimana dalam sistematika dalam penulisan laporan.

3. Dependabilitas

Dependabilitas atau ketergantungan adalah langkah yang dilakukan untuk menanggulangi kesalahan-kesalahan dalam kon-

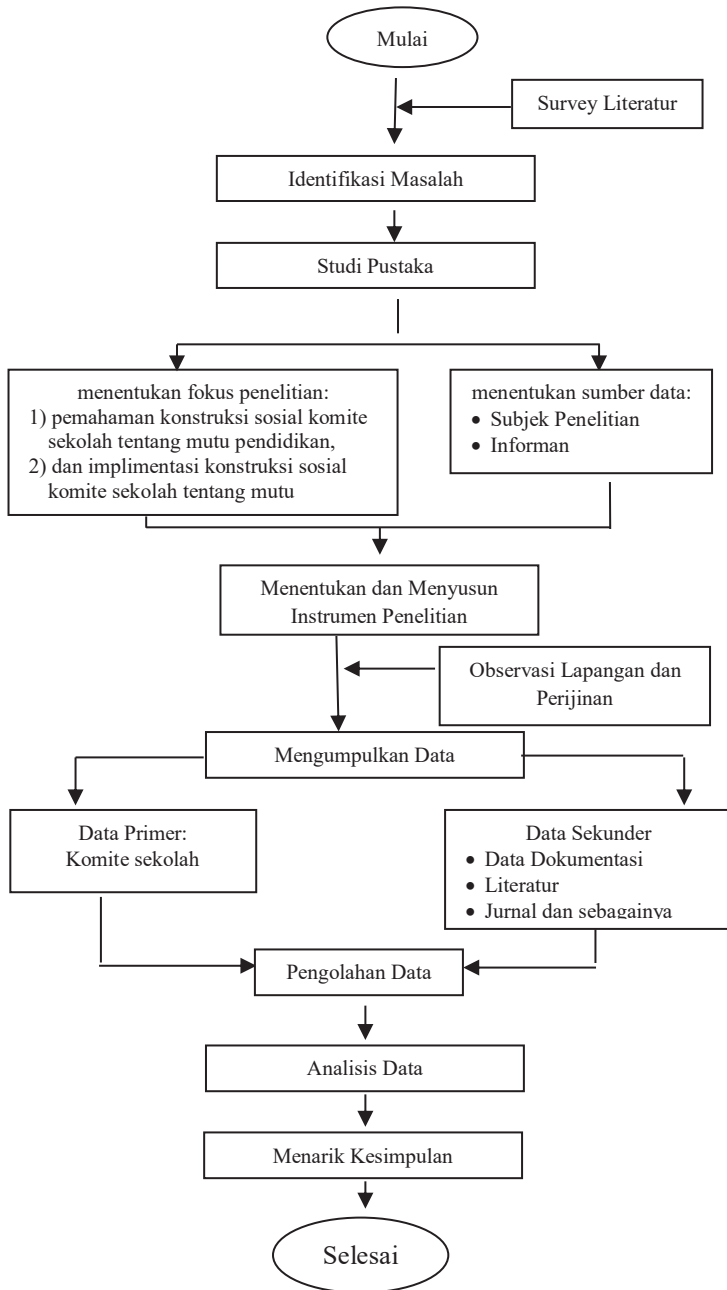
septualisme rencana penelitian, pengumpulan data, interpretasi temuan, dan pelaporan hasil penelitian. Untuk itu, diperlukan *dependent auditor*. Sebagai *dependent auditor* dalam penelitian ini adalah teori-teori yang telah lahir lebih dahulu oleh para ahli.

4. Konfirmabilitas

Pengauditan konfirmabilitas (*confirmability audit*) dalam penelitian ini dilakukan bersama-sama dengan pengauditan dependabilitas. Perbedaanya, pengauditan konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil (*product*) penelitian, sedangkan pengauditan dependabilitas digunakan untuk menilai proses (*process*) yang dilalui penelitian dilapangan. Inti pertanyaan pada konfirmabilitas adalah: apakah keterkaitan antara data, informasi, dan interpretasi yang dituangkan dalam organisasi pelaporan didukung oleh materi-materi yang tersedia atau digunakan dalam *audit trail*.

H. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian dilakukan dengan terarah dan sistematis, maka tahapan-tahapan dalam penelitian ini dapat dilihat dari *flowchart* sebagai berikut :



Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

BAB IV

HASIL DAN DISKUSI

PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Komite sekolah untuk kebersamaan dalam membangun peran serta masyarakat dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. Meningkatnya mutu itu dibarengi dengan revitalisasi tugas komite sekolah berdasarkan prinsip gotong royong. Sekolah perlu mewujudkan manajemen sekolah yang baik. Sehingga, sekolah akan mampu berkontribusi dalam penguatan sistem pendidikan, serta peningkatan wawasan kependidikan sekolah itu sendiri.

Tempat atau lokasi penelitiannya dan komite sekolah yang ada dilingkungan SDN Kecamatan Tulungagung yaitu:

1. SDN 1 Kampungdalem Ketua Komite Bapak Imam Suyadi

SDN 1 Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung adalah salah satu lembaga satuan pendidikan dengan jenjang Sekolah Dasar dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto NO. 6 Tulungagung dengan status akreditasi A. Di sekolah ini memiliki jumlah siswa secara keseluruhan 913 siswa yang didampingi oleh 35 guru dan 8 tenaga kependidikan. Proses pembelajaran didukung dengan ruang kelas sebanyak 25. Untuk sarana

prasarana lainnya yang tersedia adalah ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, ruang komite sekolah, ruang ekstrakurikuler, sanitasi guru dan siswa, laboratorium serta ruang perpustakaan. Keaktifan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem untuk mendukung penyelenggaraannya yaitu telah terbangunnya mesjid, kantin, koperasi dan taman sekolah. Di mana hal ini bisa terwujud karena komite sekolah selalu menyampaikan program-programnya kepada wali murid pada saat terlaksananya parenting yang rutin dilaksanakan 3 bulan sekali. SDN 1 Kampungdalem mempunyai ekstrakurikuler pramuka, karawitan, sholawat, drumband dan tari. Keaktifan siswa mengikuti rangkaian ekstrakurikuler yang diadakan oleh sekolah juga berkat kerjasama wali murid untuk mendampingi putra putrinya untuk menyalurkan minat bakat sehingga mereka bisa mengekspresikan kemampuannya pada saat diadakan kompetisi baik yang dilaksanakan oleh sekolah maupun dari Pemerintah maupun Swasta. Komunikasi yang terjalin harmonis selama penyelenggaraan pembelajaran dan ekstrakurikuler telah membuahkan hasil yang berkualitas baik dari segi pendidikan maupun karakter siswa.

2. SDN 4 Kampungdalem Ketua Komite Bapak Kamirin

SDN 4 Kampungdalem Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga satuan pendidikan yang berada di tengah kota tepatnya di jalan Ahmad Yani Timur No. 70 Tulungagung dengan status akreditasi A. Dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkompeten dan didukung Komite Sekolah yang selalu berperan aktif dalam membantu menjalankan penyelenggaraan pembelajaran dan pelaksanaan ekstrakurikuler di SDN 4 Kampungdalem. Saat ini SDN 4 Kampungdalem mempunyai siswa sejumlah 1539 dengan didukung 40 ruang kelas untuk proses pembelajaran. Selain ruang kelas, dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, ruang komite sekolah, ruang guru, ruang UKS, dan ruang perpustakaan. Untuk melengkapi sarana prasarana di SDN 4 Kampungdalem

yaitu sanitasi guru dan siswa, kantin serta musholla. Keikutsertaan serta koordinasi antara komite sekolah dan kepala sekolah dan didukung oleh 45 orang guru yang berkualitas serta 11 tenaga kependidikan yang membantu proses penyelenggaraan di SDN 4 Kampungdalem bisa berjalan sesuai program yang telah disepakati antara kepala sekolah, guru, wali murid serta komite sekolah.

3. SDN 7 Kampungdalem Ketua Komite Bapak Wahyu

SDN 7 Kampungdalem dengan status akreditasi A, termasuk sekolah di tengah kota yang tepatnya di jalan Basuki Rahmad II/34 Tulungagung, dengan jumlah siswa sebanyak 190 siswa dibantu oleh guru sejumlah 13 dan tenaga kependidikan sejumlah 2. Ruang kelas yang dipergunakan proses pembelajaran sebanyak 6 kelas dan dilengkapi ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang UKS, ruang perpustakaan, musholla, kantin serta sanitasi guru dan siswa. Komite Sekolah menyampaikan program sekolah yang telah disepakati oleh kepala sekolah dan guru kepada wali murid. Di harapkan dengan penyampaian program sekolah akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan ekstrakurikuler yang ada di SDN 7 Kampungdalem. Di mana ekstrakurikuler yang dilaksanakan sesuai program sekolah yaitu pramuka, karawitan, dan reog kendang. Parenting yang rutin dilaksanakan serta penyampaian program-program oleh komite sekolah kepada wali murid akan mendukung kelancaran proses pencapaian tujuan yaitu meningkatnya mutu pendidikan di SDN 7 Kampungdalem.

4. SDN 1 Kepatihan Ketua Komite Bapak Suwarsono

SDN 1 Kepatihan yang berlokasi di Kecamatan Tulungagung tepatnya di Jalan Panglima Sudirman gang 7 no 2 Tulungagung, merupakan lembaga satuan pendidikan dengan jenjang Sekolah Dasar yang berakreditasi A dengan jumlah siswa keseluruhan 153 didampingi guru sejumlah 9 orang dan 4 tenaga kependidikan. Program sekolah yang telah disepakati untuk peningkatan mutu

pendidikan salah satunya adalah ekstrakurikuler pramuka dan reog kendang. Program ekstrakurikuler berjalan sesuai rencana karena juga adanya dukungan dari wali murid yang telah mengetahui program-program sekolah yang telah disampaikan oleh komite sekolah pada saat diadakannya parenting yang dilaksanakan 6 bulan sekali oleh pihak sekolah, SDN 1 Kepatihan memiliki 6 ruang kelas, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang guru. Untuk kelengkapan sarana prasarana di lembaga satuan pendidikan, juga dibangunnya ruang UKS, ruang Perpustakaan dan musholla. Untuk sanitasi guru dan siswa sebanyak 3 lokal di mana bangunan untuk sanitasi ini terbangun dari dana Pemerintah dan sumbangan wali murid. Kepala Sekolah bertindak pada saat pemilihan komite sekolah, yang sebelumnya melakukan sosialisasi di sekolah dengan mengundang dari pihak Dinas Pendidikan, tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan, pegawai sekolah serta wali murid. Komunikasi harmonis yang terwujud antara kepala sekolah, guru dan komite sekolah menggambarkan bahwa mutu pelayanan pendidikan di lembaga satuan pendidikan ini berjalan sesuai rencana.

5. SDN 2 Kepatihan Ketua Komite Bapak Suwarsono

Lembaga satuan pendidikan dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung ini tepatnya berada di Jalan Panglima Sudirman gang 7 No 2 Tulungagung dan berakreditasi B. Dengan jumlah siswa secara keseluruhan 148 siswa dan didampingi 9 guru dan 3 tenaga kependidikan. SDN 2 Kepatihan memiliki ruang kelas sejumlah 6 ruang kelas, dengan 1 ruang kepala sekolah yang jadi 1 dengan ruang guru, ruang UKS yang merangkap ruang perpustakaan. Lokasi SDN 2 Kepatihan ini menempati lokasi yang sama dengan SDN 1 Kepatihan dan memiliki pengurus komite sekolah yang sama. Ekstrakurikuler yang dilaksanakan sesuai program yaitu pramuka , reog kendang dan jaranan. Pelaksanaan ekstrakurikuler ini bisa berjalan lancar dan mengikuti kompetisi baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun swasta berkat

dukungan dari komite sekolah dan wali murid. Pemahaman wali murid tentang program sekolah harus selalu dikomunikasikan oleh pihak sekolah dan komite sekolah. Di mana Pelaksanaan semua kegiatan tidak lepas dari para wali murid. Dukungan wali murid menggambarkan komunikasi yang harmonis dengan komite sekolah di mana komunikasi ini selalu terlaksana secara berjangka.

6. SDN 1 Jepun Ketua Komite Bapak Sugeng

SDN 1 Jepun yang berlokasi di Jalan Mayor Sujadi 61 Tulungagung yang mempunyai Luas 3.675M2 dengan jumlah siswa secara keseluruhan 384 siswa, didampingi 17 guru dan 5 tenaga kependidikan. Jumlah rombongan belajar adalah 12 kelas dan dilengkapi dengan ruang kepala sekolah, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang UKS, mushola, laboratorium dan sanitasi guru dan siswa sebanyak 4 lokal. Ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh siswa adalah pramuka, karawitan, tari. Seluruh kegiatan sesuai dengan program sekolah yang telah disampaikan oleh komite sekolah kepada wali murid, sehingga wali murid selalu mendukung kegiatan yang dilaksanakan sekolah maupun kompetisi yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun swasta. Mushola yang terbangun di kawasan SDN 1 Jepun merupakan sumbangan dari wali murid dan lulusan siswa SDN 1 Jepun/ Keberlangsungan pembelajaran sesuai rencana yang selama ini terlaksana membuahkan lulusan siswa yang berkualitas.

7. SDN 1 Karangwaru Ketua Komite Ibu Siti

Lembaga satuan pendidikan yang terletak di Jalan Yos Sudarso III/60 Tulungagung merupakan lembaga satuan pendidikan dengan jenjang Sekolah Dasar dan terakreditasi A. Jumlah siswa secara keseluruhan adalah 94 siswa yang didampingi oleh 9 guru dan 2 tenaga kependidikan. SDN 1 Karangwaru mempunyai 6 ruang kelas untuk proses pembelajaran, ruang kepala sekolah dan ruang guru, laboratorium, perpustakaan dan sanitasi guru dan siswa sebanyak

3 lokal. Ekstrakurikuler yang berlangsung adalah pramuka, reog kendang, tari. Komite sekolah selalu melaksanakan koordinasi bersama kepala sekolah dan guru untuk membicarakan program sekolah yang masih dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Komite sekolah di SDN 1 Karangwaru, mengharapkan bahwa baik proses pembelajaran dan proses kegiatan ekstrakurikuler berjalan sesuai rencana dan bisa menciptakan lulusan yang semakin berkualitas dan bisa mengikuti kompetisi baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun swasta.

8. SDN 1 Tretrek Ketua Komite Bapak Tolib

SDN 1 Tretrek merupakan salah satu lembaga satuan pendidikan di wilayah Kecamatan Tulungagung dengan jenjang Sekolah Dasar yang terakreditasi B. Terletak di Jalan Moch. Yamin I/47 Tulungagung, memiliki jumlah siswa secara keseluruhan 241 siswa yang didampingi guru sejumlah 15 dan 3 tenaga kependidikan. Ruang kelas yang dipergunakan pembelajaran sebanyak 6 ruang kelas, dilengkapi dengan ruang kepala sekolah dan guru, laboratorium, perpustakaan, UKS, dan sanitasi guru dan siswa sebanyak 6 lokal. Ekstrakurikuler diadakan setiap hari Sabtu didampingi oleh guru yang membidangi ekstrakurikuler yang di antaranya adalah pramuka, pencak silat, reog kendang, karawitan. Parenting diadakan oleh sekolah bersama-sama dengan Komite Sekolah 6 bulan sekali dan membahas program yang sedang dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan. Komunikasi harmonis yang ada di SDN 1 Tretrek antara kepala sekolah, guru dan komite sekolah menciptakan kualitas mutu pendidikan yang semakin membaik.

9. SDN Sembung yaitu Bapak Bambang

SDN Sembung dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, merupakan lembaga satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar terakreditasi A. Jumlah siswa secara keseluruhan 128 siswa yang didampingi 10 guru dan 2 tenaga kependidikan

Fasilitas sarana prasarana saat ini ruang kelas sebanyak 6 ruang kelas, ruang kepala sekolah dan ruang guru, UKS, ruang perpustakaan. Sesuai program yang telah direncanakan antara kepala sekolah dan komite sekolah, untuk ekstrakurikuler yang berlangsung adalah pramuka, sholawat, dan karawitan. Pendampingan siswa yang melaksanakan ekstrakurikuler berjalan dengan lancar dan bisa mengikuti kompetisi yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta adalah berkat kerjasama wali murid dan komite sekolah yang benar-benar memahami program sekolah yang telah direncanakan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SDN Sembung.

10. SDN 1 Botoran yaitu Bapak M Sururus

SDN 1 Botoran merupakan lembaga satuan pendidikan yang berjenjang Sekolah Dasar yang terletak di JL KHR Abdul Fatah II no. 68-A Tulungagung dengan jumlah siswa secara keseluruhan 138 siswa yang didampingi oleh 9 guru dan 2 tenaga kependidikan. SDN 1 Botoran terakreditasi A dengan fasilitas sarana prasarana ruang kelas sebanyak 6 ruang, ruang kepala sekolah dan ruang guru, UKS, ruang perpustakaan. Komite sekolah selalu berkoordinasi terkait program dari sekolah kepada kepala sekolah. Karena sebuah komunikasi dan kerjasama yang baik akan tercipta output yang baik. Di mana ekstrakurikuler yang dilaksanakan adalah pramuka, sholawat, tari dan pencak silat. Parenting yang dilaksanakan oleh pihak sekolah dan komite sekolah berdampak bahwa mutu pendidikan di SDN 1 Botoran selalu mengalami peningkatan.

B. Hasil Penelitian

Hasil dari wawancara dan observasi yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah :

1. Konstruksi Sosial Komite Sekolah atas Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Konstruksi Sosial merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan (penalaran teoritis yang sistematis), bukan merupakan suatu tinjauan historis mengenai perkembangan disiplin ilmu menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, obyektivasi dan internalisasi.

Eksternalisasi

Eksternalisasi sebagai proses penyesuaian diri individu terhadap dunia sosiokulturalnya (Bungin, 2010). Eksternalisasi dipengaruhi secara aktif maupun pasif oleh akumulasi *common sense* yang merupakan pengetahuan yang dimiliki individu bersama individu-individu lainnya dalam kegiatan rutin yang normal, dan sudah jelas dengan sendirinya, dalam kehidupan sehari-hari (Berger & Luckmann, 1990).

Eksternalisasi, yaitu usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Proses ini merupakan bentuk ekspresi diri untuk menguatkan eksistensi individu dalam masyarakat yang dilakukan dengan:

- 1) Komite sekolah dalam pemberian pertimbangan, badan pendukung, pengontrol dan mediator di sekolah

Perencanaan komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu dengan melihat Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah, tugas Komite sekolah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Pada Awal tahun pelajaran baru Komite Sekolah dilibatkan dalam pembahasan mengenai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Finalisasi Kurikulum Sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan

komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Di mana setiap perencanaan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal ini oleh kepala sekolah selalu berhubungan dengan pihak komite. Jadi dalam setiap perencanaan selalu dimusyawarahkan bersama. Seperti dalam perumusan RKAS pihak sekolah selalu melibatkan komite sekolah dalam perumusannya. Komite sekolah terlibat langsung dalam semua kegiatan finalisasi kurikulum, kita punya program lalu Komite menyetujui atau tidak. Selain itu RKAS, anggaran, Komite Sekolah setuju atau tidak. Kalau tidak, diberi masukan. Program di tengah jalan, komite sekolah cross check ke kami, kemudian ketika ada masukan juga langsung diberikan kepada kami dan kami tindaklanjuti (IS/KM-1/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Dalam hal ini pihak komite sekolah selalu memberikan informasi terkait dengan apa saja yang perlu dirumuskan atau direncanakan untuk peningkatan pendidikan di sekolah kita ini, dan mereka juga sejauh ini sangat peduli dengan peningkatan pendidikan di sekolah. Dalam hal perencanaan pihak komite selalu menyampaikan terkait apa saja rencana mereka untuk peningkatan pendidikan di sekolah kita ini dengan duduk bersama membahas rencana-rencana tersebut. (KMR/KM-2/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal ini komite sekolah telah mengadakan perencanaan program perbaikan pembangunan fisik

(wc), memfasilitasi siswa dan siswi dalam pengembangan minat dan bakat yaitu dengan kegiatan ekstrakurikuler di sore hari, pengembangan visi sekolah dengan cara meningkatkan kualitas SDM, mempererat intraksi secara interen maupun eksteren, menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, mensosialisasikan rencana kegiatan kepada sekolah kepada masyarakat di lingkungan sekolah, menyusun jadwal kegiatan, menyusun rencana anggaran biaya, menyusun rencana kebutuhan pengadaan bahan-bahan dan alat pembangunan (WHY/KM-3/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Kegiatan yang telah dan akan terlaksana adalah peran komite dalam mendukung program yang telah disetujui bersama pihak sekolah dan wali murid. Keberlangsungan pelaksanaan program yang di antaranya pelaksanaan ekstrakurikuler reog kendang. Komite menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah maupun swasta sehingga apabila ada kompetisi sewaktu-waktu siswa sudah siap mengikuti kompetisi tersebut. Disisi lain komite juga merencanakan untuk merenovasi ruang kelas 1 sampai kelas 3. Penyusunan rencana anggaran biaya sudah disosialisasikan kepada wali murid. (SWS/KM-4/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Perencanaan yang direncanakan oleh komite sekolah satu-persatu telah terealisasi dengan baik seperti halnya dari segi fasilitas yaitu renovasi bangunan wc sekolah, penyusunan RKAS, penyusunan rencana anggaran biaya, menjalin kerjasama dengan lembaga

pemerintah dan mensosialisasikan rencana kegiatan kepala sekolah kepada masyarakat di lingkungan sekolah (SWS/KM-5/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

Ada dua macam kegiatan untuk mencapai pencapaian prestasi yaitu ekstra seminggu sekali dan pembimbingan intensif 1 minggu 2-3 kali. Pembimbingan intensif lebih ke arah pembimbingan untuk lomba misalnya matematika, IPA walaupun sedang tidak ada lomba. Hal itu agar ketika ada lomba (siswa) sudah siap. (SG/KM-6/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Terkait dengan perencanaan komite sekolah memang sejauh ini telah banyak yang terealisasi mulai dari fasilitas sampai dengan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah, hal ini yang kami rasakan dan kami lihat langsung sebagai guru. Kita sampaikan agar drumband tidak ditonjolkan karena biayanya juga mahal. *Positioning* SDN bukan drumband. Kita kembangkan yang lain misalnya biola, robotic, yang tidak ada di sekolah lain. Kami berusaha menyeimbangkan antara akademik dan non akademik, supaya multi talenta. (ST/KM-7/02012023).

Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah mempunyai peran yang sangat mendukung, baik dari segi sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat

khususnya orang tua siswa. Misalnya dalam pengembangan fisik sekolah, komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan perencanaan, penggalangan dana, pelaksanaan menjadi program-program yang ada di sekolah baik secara moril dan materil, dalam hal ini biasanya ada beberapa program yang didapat secara seponatan oleh pihak sekolah yang tidak tercantum dalam RKAS dan membutuhkan dana, maka komite sekolah akan siap membantu untuk mengeluarkan dana, sesuai dengan surat permohonan yang dibuat oleh pihak sekolah. (TLB/KM-8/02012023).

Demikian juga yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

terkait beberapa program yang membutuhkan dana lebih maka biasanya pihak komite sekolah melakukan bantuan dana, tentu dalam hal ini kami pihak sekolah sangat berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada komite sekolah. Tanpa komite sekolah rasanya tidak mungkin sekolah ini dapat mengalami perubahan yang lebih baik, saya rasa inilah yang di sebut dengan gotong royong, saling bahu-membahu membangun sekolah kepada hal yang lebih baik lagi kedepannya. (BBG/KM-9/02012023).

Hal senada diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Boto-
ran yang menyatakan bahwa:

tingkat kepedulian yang tinggi membuat dukungan yang diberikan komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau pertimbangan saja tetapi lebih dari itu adalah bantuan financial baik secara individual maupun kolektif hasil pengumpulan dana masyarakat, dan kerja sama yang mudah. Pihak komite dan sekolah dalam hal ini sebagai mitra kerja bukan sebagai bawahan

dan atasan yang membuat mereka tidak segan dalam mengkritik dan memberi masukan sehingga terciptanya Pendidikan yang bagus. Komite Sekolah berperan untuk membantu perkembangan anak, harus ada kerjasama antara guru dengan Komite Sekolah dan harus ada pemberitahuan dulu. Sekolah tidak mengambil keputusan tanpa pertimbangan dari Komite Sekolah. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa komite sekolah yaitu sebagai wakil dari masyarakat dalam membantu kegiatan program pendidikan di sekolah telah menunjukkan tugasnya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang, merencanakan dan melaksanakan program pendidikan, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Upaya Komite sekolah dalam melakukan rencana program kerja merupakan penjabaran dari peran dan fungsi Komite sekolah yaitu sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak sekolah, pendukung baik berupa tenaga, pikiran, maupun dana serta hubungan baik sebagai mitra dengan pihak sekolah, pihak komite selalu menjaga hubungan baik kepada pihak sekolah serta selalu melakukan Musyawarah entah itu berkaitan dengan perencanaan maupun sampai pengawasan. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah. Tugas Komite sekolah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan Pendidikan sekolah. Untuk itu Komite sekolah melakukan fungsinya sebagai berikut: a. Pemberian pertimbangan dalam: 1) Perencanaan penyusunan kebijakan dan program sekolah; 2) Perencanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah; 3) Perencanaan penetapan kriteria kinerja sekolah; 4) Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah;

Perencanaan partisipasi komite sekolah selalu berorientasi pada pengembangan Visi dan Misi seperti mengembangkan potensi siswa dan siswi dengan sesuai minat dan bakat sampai rencana bekerjasama dengan lembaga pemerintah.

Perencanaan komite sekolah dalam peningkatan tentang mutu pendidikan yaitu dengan melihat Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah, tugas Komite sekolah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Pada Awal tahun pelajaran baru Komite Sekolah dilibatkan dalam pembahasan mengenai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Finalisasi Kurikulum Sekolah. Komite sekolah yaitu sebagai wakil dari masyarakat dalam membantu kegiatan program pendidikan di sekolah telah menunjukan tugasnya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang, merencanakan dan melaksanakan program pendidikan, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Upaya Komite sekolah dalam melakukan rencana program kerja merupakan penjabaran dari peran dan fungsi Komite sekolah yaitu sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak sekolah, pendukung baik berupa tenaga, fikiran, maupun dana serta hubungan baik sebagai mitra dengan pihak sekolah, pihak komite selalu menjaga hubungan baik kepada pihak sekolah serta selalu melakukan Musyawarah entah itu berkaitan dengan perencanaan maupun sampai pengawasan.

Menurut Gamage (2009) komite sekolah sangat dominan dalam pengambilan keputusan perencanaan sekolah terutama dalam pengambilan keputusan anggaran sekolah (persetujuan anggaran sekolah) dan pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah (persetujuan rencana perbaikan sekolah).

Hasil penelitian ini sesuai menurut Hakim (2020) komite sekolah menjadi wadah adanya komunitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) yang mempunyai peran penting. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan

dipengaruhi oleh semua pihak yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, tokoh masyarakat stakeholder, pemerintah dan pihak swasta yang menjadi komunitas komite sekolah yang mempunyai kontribusi atas kesuksesan pendidikan.

Permendikbud nomor 75 tahun 2016 Bab I Pasal I komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Wadah komite sekolah ini diharapkan para *stakeholder* pendidikan yang mengambil peran yang maksimal, sehingga sekolah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi *customer*-nya. Peran komite sekolah bukan hanya terbatas pada mobilisasi sumbangan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan, namun juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah, Nel-liraharti (2018). Oleh karena itu sekolah harus meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya dan mendukung terhadap program-program yang dicanangkan sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

2) Program komite sekolah dalam menyalurkan aspirasinya dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah

Program komite sekolah dalam menyalurkan aspirasinya dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Tujuan yang dituangkan dalam AD dan ART komite sekolah yaitu Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kewajiban operasional dan program pendidikan di sekolah.

Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan (IS/KM-1/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Tujuan dari Komite sekolah adalah memwadhahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Sehingga di perlukan kerjasama antara Komite sekolah dan juga pihak sekolah. (KMR/KM-2/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Dalam menjalin suasana keterbukaan baik sekolah dan Komite sekolah bekerjasama dengan menciptakan suasana dan kondisi transparan seperti contohnya dalam penggunaan dana dari masyarakat, untuk apa dan bagaimana dana itu di gunakan. (WHY/KM-3/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kapatihan yang menyatakan bahwa:

Kebutuhan peningkatan mutu pendidikan untuk lembaga sekolah telah disampaikan oleh komite pada saat

pelaksanaan parenting atau pertemuan wali murid. Selain itu juga harus mempersiapkan pelaksanaan penerimaan murid baru supaya lebih dikenal keberadaannya oleh masyarakat juga terkait dengan program yang direncanakan oleh pihak sekolah dan komite sekolah. (SWS/KM-4/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

program komite sekolah yaitu rapat pengurus Komite sekolah secara periodic; Membantu mempromosikan sekolah; Kerjasama dalam peningkatan mutu pendidikan; Membantu mengusahakan dana untuk pembangunan fisik sekolah. (SWS/KM-5/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

peran komite sekolah sangat dibutuhkan. Hal ini dibuktikan bahwa selalu diadakan rapat komite. Rapat komite yang diadakan tidak hanya atas dasar undangan saja, tetapi kadang komite juga meminta sekolah untuk mengadakan rapat komite jika ada hal-hal dan masukan dari masyarakat serta wali murid yang perlu disampaikan. (SG/KM-6/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Peran komite yang kami lakukan adalah ikut serta dalam menyusun dan mengesahkan RAPBS, meningkatkan kedisiplinan siswa dan guru sebelum jam tujuh harus sudah berada di sekolah, serta mengusulkan penjagaan keamanan dan keselamatan siswa saat menyeberang jalan. (ST/KM-7/02012023).

Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

komite sekolah memiliki peran yang aktif terutama di lembaga sekolah dan sangat penting dalam pengembangan peserta didik dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Sebelum memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah, komite sekolah sebelumnya melihat kemungkinan apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan ini, mengenai kompetensi apa yang dapat dicapai dari lulusannya seperti keterampilan agama yang harus dikuasai di masing-masing lembaga pendidikan seperti menjalankan sholat dhuha dan dhuhur berjamaah di masjid. . (TLB/KM-8/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

Dari pihak komite sekolah itu sendiri sangat mendukung dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, komite sekolah juga berfungsi sebagai penggalang dana di mana komite sekolah meminta dana atau sumbangan tetapi tidak memberatkan kami selaku orang tua siswa, dikarenakan komite sekolah tidak memberikan patokan jumlah uang yang harus disumbangkan kepada sekolah. (BBG/KM-9/02012023).

Informasi yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Komite Sekolah bertujuan untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Kedudukannya sebagai badan mandiri yang mewadahi peran masyarakat memiliki beberapa tujuan yang dituangkan dalam AD dan ART komite sekolah. Tujuan yang dituangkan dalam AD dan ART komite sekolah yaitu Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kewajiban operasional dan program pendidikan di sekolah. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Ramli (2021) yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Selain itu komite sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam membantu dan meningkatkan mutu pendidikan

Objektifikasi, adalah hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu berupa realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu aktivitas yang berada diluar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya (hadir dalam wujud yang nyata). Realitas objektif itu berbeda dengan kenyataan

subjektif perorangan. Ia menjadi kenyataan empiris yang bisa dialami oleh setiap orang. Pada tahap ini masyarakat dilihat sebagai realitas yang objektif (*Society is an objective reality*), atau proses interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi.

1) Faktor pendukung program komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan

Dalam menyukseskan program-program yang telah direncanakan oleh pihak sekolah dengan komite sekolah, maka di lembaga sekolah itu sendiri terdapat faktor-faktor guna untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan. Dengan adanya faktor pendukung ini, maka akan lebih mudah untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Selain itu, juga mempermudah pelaksanaannya guna dijadikan motivasi dalam proses berlangsungnya program tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Faktor pendukungnya cukup banyak, antara lain: pertama, karena kami terpilih menjadi komite berdasarkan musyawarah di mana pertimbangannya adalah loyalitas dan niat kuat kami untuk menyelenggarakan pendidikan di lembaga sekolah. Kedua, hubungan kerja sama komite dengan kepala sekolah lebih mudah karena hampir tidak ada sekat dalam kesamaan visi, misi dan tujuan. Ketiga, dukungan kuat masyarakat terhadap keberadaan sekolah (IS/KM-1/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Mengenai faktor pendukung komite sekolah ada beberapa yang saya ketahui salah satunya, yaitu komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin baik dan harmonis

antara pihak sekolah dengan komite sekolah, adanya saling keterbukaan antara pihak sekolah dengan komite sekolah sehingga sekolah tidak merasa diawasi, dan terwujudnya kekompakan orang tua siswa dalam melaksanakan hasil kesepakatan untuk mendukung program sekolah (KMR/KM-2/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Kalau saya lihat selama ini, yang menjadi anggota komite sekolah sangat sungguh-sungguh dan aktif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di sekolah, misalnya selalu rutin dalam mengadakan pertemuan antara wali murid dengan pihak sekolah. (WHY/KM-3/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan program yang telah ditentukan oleh komite sekolah dan pihak sekolah adalah faktor yang mendukung untuk peningkatan mutu pendidikan lembaga sekolah. Saling memberikan suport dan semangat bahwa keberlangsungan mutu pendidikan yang berkualitas dalah karena kejasama yang baik antara komite sekolah dan pihak sekolah serta dari wali murid. (SWS/KM-4/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Faktor pendukungnya ya karena komite dengan kepala sekolah itu sama-sama sepejuangan untuk berdirinya lembaga ini, jadi komunikasipun mudah. Selain itu partisipasi masyarakat yang cukup membuat kami

termotivasi ternyata belum ada aturan yang jelas dari peran komite sekolah yang kami terima dan sebagian pengurus komite ada yang kurang aktif. (SWS/KM-5/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu, sekolah memiliki faktor yang dapat mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh sekolah dengan Komite Sekolah. Dengan faktor pendukung ini, sekolah lebih mudah untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu, karena selain mempermudah pelaksanaannya juga dapat dijadikan motivasi dalam proses berlangsungnya program tersebut. (SG/KM-6/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

faktor pendukung peran komite sekolah di antara lain: Kerja sama yang baik yang telah terbina antara unsur-unsur di dalam sekolah dan unsur-unsur dalam masyarakat bersama anggota Komite Sekolah, Adanya keterbukaan dari pihak sekolah terhadap peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu atau kualitas pendidikan, Terwujudnya kekompakan wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan dalam mendukung program sekolah. (ST/KM-7/02012023).

Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

Kalau saya lihat selama ini yang menjadi anggota Komite Sekolah sungguh-sungguh untuk aktif, misaln-

ya dalam setiap pertemuan antara wali siswa dengan sekolah. (TLB/KM-8/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan di antaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. (BBG/KM-9/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan program Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan sangat baik. Hal ini dapat kita lihat dari dilibatkannya seluruh unsur baik dari pihak sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan serta pihak masyarakat sebagai pemberi saran dan masukan terhadap pelaksanaan program komite. Adapun program-program yang dilaksanakan diantaranya yaitu program keagamaan serta program ekstrakurikuler yang bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kabupaten. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan faktor pendukung yang dijelaskan di atas, antara pihak sekolah, komite dan orang tua siswa berusaha dengan sebaik mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Pihak sekolah, Komite dan masyarakat berusaha seoptimal mungkin untuk mendukung dan melaksanakan

program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.

2) Komite sekolah dalam laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat

Auditing atau pemeriksaan merupakan kegiatan yang terkait dengan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Kegiatan yang didanai dari sumber dana komite, kami menyusun laporan kegiatan setiap satu bulan sekali, diserahkan kepada Komite untuk diperiksa dan ditandatangani. Karena itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kami terhadap dana pendidikan dari Komite. (IS/KM-1/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

sekolah selalu menyusun pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan baik dana itu berasal dari komite atau dana yang berasal dari Pemerintah. Adapun prosedur pertanggungjawabannya mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (KMR/KM-2/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Setiap kegiatan kesiswaan di sekolah, selalu melibatkan OSIS sebagai panitia kegiatan. Seperti biasa sebe-

lum melaksanakan kegiatan, kami mengajukan proposal kegiatan yang dipandu pembina OSIS, untuk mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Setelah dana cair barulah kami bisa melaksanakan kegiatan. Sebagai pertanggungjawabannya kami membuat laporan di setiap akhir kegiatan (WHY/KM-3/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN
1 Kapatihan yang menyatakan bahwa:

Dana yang terkumpul untuk memperlancar program yang telah disampaikan komite sekolah kepada wali murid dikelola sedemikian rupa untuk peningkatan mutu pendidikan. Di sisi lain penyusunan laporan pertanggungjawaban selalu dibuat oleh pihak sekolah sehingga tidak ada gagal komunikasi antara komite sekolah, pihak sekolah dan wali murid. (SWS/KM-4/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN
2 Kapatihan yang menyatakan bahwa:

Sekolah selalu menyusun laporan pertanggungjawaban kepada komite sekolah jika program/kegiatan sekolah pendanaannya melalui dana rutin atau dana insidental. Karena dana tersebut berasal dari masyarakat. (SWS/KM-5/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN
1 Jepun yang menyatakan bahwa:

Dari setiap kegiatan yang didanai dari komite pencairan dananya harus melalui saya, setelah selesai kegiatan bendahara kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. (SG/KM-6/02012023).

Khususnya pengelolaan dana BOS pengawasan internal dilaksanakan oleh Komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota melalui pengawas sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Untuk memudahkan dalam menyusun pertanggungjawaban keuangan, ada yang selalu mencatat atau membukukan setiap penerimaan maupun pengeluaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang selalu membuat pertanggungjawaban di setiap pengeluaran keuangan berupa SPJ setiap bulan, sehingga sewaktu-waktu ada pemeriksaan sudah siap. (ST/KM-7/02012023).

Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

Untuk memudahkan dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan, maka diperlukan pembukuan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran, yang harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memudahkan proses pemeriksaan atas penggunaan dana pendidikan. bendahara pengelola Bos membuat pertanggungjawaban berupa laporan per semester yaitu semester I periode Januari-Juni 2021 dan laporan semester II periode Juli-Desember 2021. Adapun laporan tersebut ada dua jenis yaitu: laporan keseluruhan dan laporan ringkas. Wah maaf ya mbak saya harus menjelaskan lebih rinci lagi. Laporan keseluruhan adalah laporan yang disusun oleh sekolah untuk kepentingan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang diketahui oleh komite sekolah (TLB/KM-8/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

penerimaan dan pengeluaran keuangan di sekolah dibukukan sesuai petunjuk pembukuan, di antara pembukuan yang kami laksanakan ada beberapa jenis yaitu: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu pada sekolah sudah tersedia dan selalu aktif digunakan oleh bendahara. Buku pembantu kas memuat seluruh transaksi pengeluaran keuangan sekolah secara rinci. Antara BKU dan BPK ada sedikit perbedaan yaitu jika BKU untuk penanggalan pengeluaran keuangan ditulis ketika lunas dibayar, sedang BPK setiap terjadi transaksi akan ditulis sesuai tanggal terjadinya transaksi tersebut. (BBG/KM-9/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Buku Pembantu Bank kami gunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening bank, termasuk transaksi giral yaitu bunga bank, pajak bunga dan biaya administrasi. Sedangkan buku pembantu pajak kami gunakan untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pajak. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan komite sekolah dalam laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat dilakukan dengan 1) Setiap bulan sekolah menyusun

laporan hasil kegiatan kepada komite karena kegiatan tersebut pendanaannya dari komite. 2) Untuk memenuhi pendanaan suatu kegiatan, maka panitia kegiatan mengajukan proposal untuk mendapatkan pengesahan dari kepala sekolah. Dan pada akhir kegiatan panitia menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. 3) Untuk pertanggungjawaban terhadap dana Bos, bendahara bos membuat laporan per semester yaitu periode Januari-Juni dan periode Juli-Desember. 4) Semua transaksi keuangan di sekolah dibukukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis buku yang digunakan buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, 5) Setiap pengeluaran keuangan sekolah disusun pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulan. 6) pengelolaan dana pendidikan telah mencerminkan prinsip akuntabilitas publik. Hal ini dapat terlihat dari pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak-pihak yang berwenang yaitu, komite sekolah, Dinas pendidikan Kabupaten/Propinsi dan sebagainya).

Internalisasi, lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dari dunia yang telah terobjektifikasi tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas diluar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat (*man is a social product*).

1) Komite sekolah dapat berpartisipasi

Komite sekolah dapat berpartisipasi. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Saya sebagai ketua komite sekolah selama awal tahun pelajaran kami berperan aktif dalam menyusun rencana kerja sekolah yang di dalamnya membahas mengenai pembiayaan maupun pengelolaan, karena

ini berkaitan dengan orang tua siswa maka apa yang diharapkan dari orang tua atau wali murid saya sampaikan kepada pihak sekolah seperti masukan mengenai kedisiplinan siswa ketika masuk sekolah sebagai wujud partisipasi dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, kemudian usulan tentang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. (IS/KM-1/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampung-dalem yang menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan, pelaksanaan partisipasi komite dapat berupa dukungan finansial, tenaga dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan dapat diwujudkan yakni di antaranya dengan pemecahan masalah biaya sekolah bagi anak kurang mampu, kekurangan tenaga pendidik, dan tenaga untuk memperbaiki bangunan sekolah yang sudah rusak. Partisipasi komite tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, tetapi juga ikut dalam memberikan suatu dukungan khususnya untuk orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi guna menunjang pendidikan di sekolah. (KMR/KM-2/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 kampung-dalem yang menyatakan bahwa:

komite selalu menyelesaikan perencanaan-perencanaan yang telah disampaikan ketika rapat, dan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan komite sekolah dengan menghubungkan semua pihak-pihak terkait memberikan hasil yang maksimal dalam hal pelaksanaan perencanaan yang dalam hal ini meningkatkan pendidikan di sekolah. (WHY/KM-3/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Terjalinnya komunikasi yang harmonis antara komite sekolah, pihak sekolah dan wali murid adalah jembatan untuk pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan. Masukan serta saran dari wali murid harus ditampung dan dibuat skala prioritas menyesuaikan dari program yang telah disusun dan disampaikan kepada wali murid. (SWS/KM-4/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

komite sekolah selalu berupaya dalam menjembatani antara orang tua siswa dan pihak sekolah. Contohnya dalam hal aspirasi yang disampaikan oleh orang tua siswa kepada pihak sekolah, selalu kami sampaikan kepada pihak sekolah terkait kritik dan saran tersebut. Dan kami selaku komite sekolah juga ikut membantu dalam hal apa saja yang menjadi kami lakukan terkhusus dari segi anggaran yang diperlukan (SWS/KM-5/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

komite juga mendukung dan mendorong tumbuhnya komitmen dan perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan. (SG/KM-6/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah sangat mendukung, baik dari segi sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa terkait apa saja yang dapat meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini, dan komite sekolah menerapkan sistem iuran ke orang tua siswa agar terciptanya kedisiplinan dan tercapainya pendidikan yang bermutu karena didukung oleh sarana dan prasarana yang bagus. (ST/KM-7/02012023).

Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

komite sekolah membantu dalam menunjang sarana dan prasarana terutama untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah. (TLB/KM-8/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

Saya selaku ketua komite sekolah sangat mendukung dengan adanya proses pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Jadi, setelah diadakan musyawarah dengan kepala sekolah, di sini komite sekolah juga ikut berperan untuk menjadikan anak agar selalu menaati peraturan atau tata tertib ketika sedang berlangsung pelajaran di dalam kelas. (BBG/KM-9/02012023).

Hasil wawancara diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah ikut berpartisipasi dalam proses komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana khususnya untuk pengadaan sarana yang ada di ruang kelas seperti pembelian proyektor guna menunjang pembelajaran siswa di kelas dan pihak komite

tidak memberatkan orang tua, di sini komite sekolah menerapkan sistem iuran kepada orang tua siswa, yaitu dengan membayar iuran yang tidak memberatkan untuk orang tua siswa. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan Pelaksanaan Partisipasi Komite sekolah seperti dukungan yang diberikan komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau pertimbangan saja tetapi lebih dari itu adalah bantuan finansial baik secara individual maupun kolektif hasil pengumpulan dana masyarakat dan juga dalam pelaksanaannya .Pola hubungan kerja antara Komite dan Kepala sekolah adalah hubungan kerja sama kemitraan ,artinya kedudukan keduanya bukan sebagai bawahan dan atasan. Prinsip dasar demikian membawa mereka kearah komunikasi yang baik, setiap ada hal yang dianggap penting selalu diselesaikan dengan musyawarah sehingga bukan hanya melahirkan kerja sama yang baik dan hubungan kemitraan yang harmonis pun menjadi dampak dari pola hubungan kerja tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Hakim (2020) partisipasi komite sekolah ini sangat bergantung pada cara dan kreativitas sekolah dalam menggunakan pendekatan yang relevan kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, tingkat partisipasi dan pendekatan yang dilakukan pihak sekolah dapat berdampak pada keikutsertaan anggota komunitas komite sekolah dalam setiap kegiatan sekolah. Keterkaitan partisipasi dalam sebuah organisasi dibutuhkan wadah yang baik. Salah satu yang sangat penting adalah wadah yang besar. Wadah ini dapat menampung segala kehendak positif masyarakat yang merupakan bagian penengah antara internal dan eksternal sekolah. Dengan demikian, posisi eksternal sangat urgen bagi keberlangsungan sebuah sistem pendidikan, hal demikian tidak bisa dianggap sebagai bayang-bayang semata dalam tataran lembaga. Komite sekolah diposisikan *eksternal feedback loops*, yakni umpan balik eksternal yang muncul dari interaksi

si sekolah dengan lingkungan eksternal sekolah

- 2) Komite sekolah menjadi penunjang dalam masalah fasilitas sekolah, sarana prasarana sekolah dan pengadaan finansial sekolah serta kegiatan penggalan dana di sekolah

Komite sekolah menjadi penunjang dalam masalah fasilitas sekolah, sarana prasarana sekolah dan pengadaan finansial sekolah serta kegiatan penggalan dana di sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah sangat membantu kemandirian sekolah dalam hal anggaran, fasilitas sekolah yang masih kurang, mencari dana untuk menambah insentif guru, dengan mengajukan bantuan dana tanpa membebankan orang tua siswa (IS/KM-1/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Pendanaan yang didapatkan oleh komite sekolah dari hasil iuran orang tua siswa setiap bulannya, dan infaq, tetapi apabila ada orang tua siswa yang ekonominya kurang tidak di pungut iuran tersebut (KMR/KM-2/02012023).

Komite sekolah juga membantu dalam hal sarana prasarana di sekolah. Dan tetapi tidak hanya memberikan dukungan dan pengadaan sarana prasarana fisik saja, namun termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia.

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Selain membantu dalam sarana dan prasaran yang ada di sekolah, komite sekolah juga membantu mengem-

bangkan sumber daya manusianya, yakni dengan memberikan sumbangan saran dan motivasi agar para guru senen tiasa dapat meningkatkan kinerjanya sehingga sekolah bisa menjadi lebih maju lada dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain (WHY/KM-3/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Kerjasama yang terjalin antara komite sekolah dan pihak sekolah dalam pelaksanaan rehabilitasi ruang kelas sangat mendukung dalam rangka melaksanakan program sekolah. Di mana proses awal adalah adanya pembicaraan, masukan dan saran antara komite sekolah dan pihak sekolah (SWS/KM-4/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah sangat berperan dalam pengadaan peralatan laboratorium, pengrehapan toilet/wc, rencana pembangunan ruang kelas, sebelum sekolah mengambil keputusan maka terjadilah diskusi antara kepala komite sekolah dan pihak sekolah. (SWS/KM-5/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dapat memeberikan pertimbanganya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya sekolah akan mengajukan rehab sarana prasaranan dan gedung yang rusak, sekolah akan melakukan penambahan ruang. (SG/KM-6/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Untuk melakukan penambahan fasilitas biasanya pihak sekolah terlebih dahulu mengkonsultasikan masalah itu kepada komite sekolah agar dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah . dan atas nama masyarakat yang diwakilinya, komite sekolah dapat menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap rencana program pendidikan yang disusun oleh sekolah. (ST/KM-7/02012023).

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

pihak komite sekolah selalu memberikan informasi terkait dengan apa saja yang perlu dirumuskan atau direncanakan untuk peningkatan pendidikan di sekolah kita ini, dan mereka juga sejauh ini sangat peduli dengan peningkatan pendidikan di sekolah. Dalam hal perencanaan pihak komite selalu menyampaikan terkait apasaja rencana mereka untuk peningkatan pendidikan di sekolah kita ini dengan duduk bersama membahas rencana-rencana tersebut . (TLB/KM-8/02012023).

Berikut ini yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah mempunyai peran yang sangat mendukung dan baik mulai dari sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa. Misalnya dalam pengembangan fisik sekolah, komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, pengga-

lian dana, pelaksanaan sampai pelaporan. (BBG/KM-9/02012023).

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah juga ikut membantu dalam menunjang sarana dan prasarana sekolah terutama untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar. pada waktu rencana pengadaan ruang, di sini komite sekolah berperan sebagai penggalang dana kepada orang tua siswa yang dikira-kira bisa membantu, tetapi dalam penggalangan dana ini komite sekolah dibagi menjadi tiga yaitu kelas unggulan, kelas khusus, dan kelas reguler dan jumlah dana yang dungut komite berbeda-beda, dan uang komite ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan siswa." (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan komite sekolah menjadi penunjang dalam masalah fasilitas sekolah, sarana prasarana sekolah dan pengadaan finansial sekolah serta kegiatan penggalan dana di sekolah pada waktu rencana pengadaan ruang, di sini komite sekolah berperan sebagai penggalang dana kepada orang tua siswa yang dikira-kira bisa membantu, tetapi dalam penggalangan dana ini komite sekolah dibagi menjadi tiga yaitu kelas unggulan, kelas khusus, dan kelas reguler dan jumlah dana yang dipungut komite berbeda-beda, dan uang komite ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan siswa.

Hasil penelitian Kilewo & Frumence (2015) masyarakat di daerah pedesaan memiliki sikap negatif terhadap pendidikan anak-anak mereka dan beranggapan bahwa pendidikan dasar kurang memiliki posisi penting dalam menentukan kehidupan anak-anak. Lain halnya pandangan Godfrey (2016) bahwa masyarakat terlibat dalam menyediakan pendidikan dasar melalui persiapan

anak-anak untuk sekolah dengan menyediakan makanan, seragam sekolah dan alat tulis. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pandoyo & Wuradji (2015) menyimpulkan bahwa kerja komite sekolah dasar negeri se-kecamatan Mlati sudah memiliki nilai yang cukup tinggi dalam berpartisipasi menjalankan program pendidikan di sekolah.

2. Implimentasi Konstruksi Sosial Komite Sekolah atas mutu pendidikan SDN di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Komite sekolah membina hubungan yang harmonis dan menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik dengan tenaga pendidik, orang tua siswa dan tokoh masyarakat dalam mengembangkan mutu pendidikan sekolah.

Proses eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Sehingga tatanan sosial merupakan sesuatu yang telah ada mendahului setiap perkembangan organism individu. Tatanan sosial yang terjadi secara terus-menerus dan selalu diulang ini merupakan pola dari kegiatan yang bisa mengalami proses pembiasaan (habitualisasi). Tindakan-tindakan yang dijadikan pembiasaan ini tetap mempertahankan sifatnya yang bermakna bagi individu dan diterima begitu saja. Pembiasaan ini membawa keuntungan psikologis karena pilihan menjadi dipersempit dan tidak perlu lagi setiap situasi didefinisikan kembali langkah demi langkah. Tindakan yang dilakukan oleh komite sekolah bersama dengan kepala sekolah dan para tenaga pendidik mempunyai tujuan bagaimana mutu pendidikan yang telah ada bisa lebih optimal lagi. Semua tindakan itu melalui proses, yaitu :

- 1) Komite sekolah dalam pemberian pertimbangan, badan pendukung, pengontrol dan mediator di sekolah
 - a) Komite sekolah dalam pemberian pertimbangan di sekolah

Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan, menjalankan peran meliputi perencanaan yang meliputi dilaksanakan pada bulan Juli, pelaksanaan program yang dilaksanakan pada bulan Agustus, dan pengelolaan sumber daya pendidikan pada bulan September. Pada Awal tahun pelajaran baru Komite Sekolah dilibatkan dalam pembahasan mengenai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Finalisasi Kurikulum Sekolah. Pada pembahasan mengenai RKAS, sekolah terlebih dahulu mempresentasikan mengenai segala program yang akan dijalankan sekolah dalam satu tahun ajaran sekolah dan pembiayaan program tersebut. Adapun program-program tersebut antarlain, jalan sehat, kemah, dan piknik kelas VI. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah terlibat langsung dalam semua kegiatan finalisasi kurikulum, kita punya program lalu Komite menyetujui atau tidak. Selain itu RKAS, anggaran, Komite Sekolah setuju atau tidak. Kalau tidak, diberi masukan. Program di tengah jalan, komite sekolah cross check ke kami, kemudian ketika ada masukan juga langsung diberikan kepada kami dan kami tindaklanjuti (IS/KM-1/02012023).

Komite Sekolah diberikan kesempatan untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan sekolah untuk satu tahun ajaran. Bahkan, tidak sekedar memberi masukan, Komite Sekolah juga berhak membatalkan atau mengusulkan konsep lain dari program yang dirancang sekolah. Misalnya pada program kemah. Program tersebut sedianya akan dilaksanakan untuk kelas I-V, namun atas pertimbangan Komite Sekolah, maka kemah tersebut hanya dilaksanakan untuk kelas IV dan V, kemudian kelas I-III diganti dengan kegiatan bakti sosial. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Komite mencermati dan memberi masukan, mana program yang tetap dilaksanakan, tambahan program maupun meng-*cut* program yang kita laksanakan dengan pertimbangan yang baik dan matang, menjadi wadah dan aspirasi dari wali murid. Misalnya, dulu pernah ada rencana kegiatan kemah untuk kelas 1-5 SD kemudian diarahkan kelas 4 dan 5, kelas 1-3 bentuknya bakti sosial (KMR/KM-2/02012023).

Pada sesi pemaparan kurikulum, Sekolah memaparkan hal-hal berkaitan dengan kurikulum, antarlain meliputi jam sekolah, program ramadhan, dan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Kemudian Komite Sekolah diberikan kesempatan juga untuk memberikan pertimbangan atas pemaparan dari sekolah. Pada kesempatan tersebut, Komite Sekolah pernah memberikan pertimbangan terkait nilai KKM, dari yang semula 70 menjadi 75. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 kam-pungdalem yang menyatakan bahwa:

Nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), kita tidak minta KKM 75 tetapi juga hasil rembugan dengan Komite Sekolah. Kita mengusulkan KKM nya 70, tapi kita diminta 75 karena sekolah unggulan (WHY/KM-3/02012023).

Rencana kegiatan anggaran yang telah disepakati oleh komite sekolah dan pihak sekolah menyesuaikan dengan program yang telah di susun. Di mana rencana kegiatan anggaran sekolah ini harus disosialisasikan oleh komite sekolah kepada wali murid sehingga wali murid mengetahui dengan jelas program yang akan dilaksanakan dan dana yang dipergunakan untuk menunjang program sekolah tersebut. Kesepakatan yang telah terlaksana akan sangat mendukung dalam proses peningkatan mutu pendidikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah membuat kesepakatan bersama wali murid didampingi oleh pihak sekolah dan menyampaikan terkait program sekolah dan didukung anggaran dari mana untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan di lembaga sekolah. (SWS/KM-4/02012023).

Program sekolah dalam RKAS dan kurikulum yang telah disepakati bersama selanjutnya disebarluaskan kepada wali siswa, dengan dibantu oleh Komite Sekolah. Komite Sekolah menyebarkan informasi mengenai RKAS dan kurikulum sekolah kepada wali siswa melalui dewan sekolah, yaitu organisasi pekumpulan wali siswa ditingkat kelas. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kapatihan yang menyatakan bahwa:

Dewan Sekolah (Komite Sekolah) memiliki garis komando dengan Dewan Kelas. Dewan Kelas nanti kaitannya dengan kelas masing-masing, kalau Dewan Sekolah (Komite Sekolah) dengan sekolah secara keseluruhan. Kan setiap kelas ada pertemuan, kita datang ke sana (SWS/KM-5/02012023).

Komite Sekolah dalam memberikan pertimbangan terkait dengan pembelajaran di sekolah meliputi aspek pengembangan bakat dan minat. Program pengembangan minat dan bakat tidak sekedar program ekstrakurikuler, tetapi juga program bimbingan intensif siswa. Bimbingan intensif merupakan program penyiapan siswa oleh guru untuk kegiatan lomba-lomba dan olimpiade. Program tersebut ditujukan bagi siswa dengan bakat yang sesuai dengan perlombaan yang rutin dilombakan setiap tahun. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

Kita ada dua macam kegiatan untuk mencapai pencapaian prestasi yaitu ekstra seminggu sekali dan pembimbingan intensif 1 minggu 2-3 kali. Pembimbingan

intensif lebih ke arah pembimbingan untuk lomba misalnya matematika, IPA walaupun sedang tidak ada lomba. Hal itu agar ketika ada lomba (siswa) sudah siap. (SG/KM-6/02012023).

Program pengembangan minat dan bakat siswa baik yang terprogram, tidak terprogram, dan bimbingan intensif merupakan program yang dirancang dan diinisiasi oleh Sekolah. Program tersebut disusun sesuai dengan visi dan misi sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Kita sampaikan agar drumband tidak ditonjolkan karena biayanya juga mahal. *Positioning* SDN bukan drumband. Kita kembangkan yang lain misalnya biola, robotic, yang tidak ada di sekolah lain. Kami berusaha menyeimbangkan antara akademik dan non akademik, supaya multi talenta. (ST/KM-7/02012023).

Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

Untuk ekstra, konsepnya dari sekolah. Awal tahun merencanakan beberapa ekstra, setelah format jadi, kita buat edaran kepada wali murid terkait ekstra apa yang diminati. Kemudian wali ini setelah memilih ekstra kemudian melaksanakan. Dalam pelaksanaannya, apabila ada ekstra yang kurang maksimal, komite akan menindaklanjuti. (TLB/KM-8/02012023).

Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan terkait kegiatan ekstra yaitu dengan memberikan usulan atau pertimbangan terkait ekstra atau kegiatan baru yang akan dilaksanakan dan memastikan bahwa ekstra atau kegiatan pengembangan bakat dan minat siswa yang akan dilaksanakan sudah sesuai dengan keterse-

diaan sumber daya manusia maupun fasilitas sekolah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

Kalau hal seperti itu dari sekolah sudah memberi konsep ke kita, contohnya di sini ada bela diri, tapak suci, tari dan drumband. Ada beberapa item yang wajib dan pilihan. Contohnya ekstra HW itu ekstra wajib karena merupakan ciri khusus SD. Kita memberi masukan bahwa kegiatan ekstra yang dimungkinkan diselenggarakan silakan dilakukan. Kita juga menyarankan ekstra-ekstra yg sifatnya wajib seperti qiroaah. (BBG/KM-9/02012023).

Komunikasi yang selalu dilakukan pihak sekolah terhadap Komite Sekolah menunjukkan bahwa Komite sekolah sangat berperan dalam pengembangan bakat dan minat siswa. Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Komite Sekolah berperan untuk membantu perkembangan anak, harus ada kerjasama antara guru dengan Komite Sekolah dan harus ada pemberitahuan dulu. Sekolah tidak mengambil keputusan tanpa pertimbangan dari Komite Sekolah. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Komite Sekolah di sekolah menjalankan peran sebagai pemberi pertimbangan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. Komite Sekolah memberikan pertimbangan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran dalam kebijakan dan program sekolah dengan terlibat dalam memberikan pertimbangan pada pembahasan RKAS, RAPBS, dan kurikulum sekolah; memberikan pertimbangan terkait jenis kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa yang akan dilaksanakan; memberikan pertimbangan

dalam penggunaan media, metode pembelajaran, dan pengelolaan kelas; dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, untuk peran pertimbangan pada ranah kelas secara lebih spesifik dilakukan oleh Dewan Kelas yang merupakan organisasi wali siswa ditingkat kelas selaku perpanjangan dari Komite Sekolah di tingkat kelas.

b) Komite sekolah dalam badan pendukung di sekolah

Bentuk dukungan material yang dihimpun Komite Sekolah tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya sekolah. Hal tersebut dikarenakan, pada masa awal berdirinya sekolah salah satu bentuk dukungan adalah tanah wakaf yang saat ini digunakan sebagai bangunan sekolah. Tidak hanya itu, akan tetapi selama masa pembangunan, banyak dukungan seperti bahan material dan renovasi ruang yang diberikan. Kemudian bentuk dukungan material lainnya adalah anggaran dan sarana prasarana pendukung pembelajaran di kelas. Anggaran yang dimaksud adalah dana iuran pendidikan merupakan istilah yang digunakan untuk biaya pendidikan siswa. Iuran tersebut dibayarkan wali sekolah setiap bulan guna membiayai operasional sekolah. Selain itu, anggaran yang masuk ke sekolah tidak lepas dari pengawasan Komite Sekolah. Keikutsertaan Komite Sekolah dalam hal pengelolaan anggaran, merupakan salah satu bentuk transparansi sekolah terhadap masyarakat. Dengan adanya transparansi dalam pendanaan, maka sekolah dapat terbantu dalam pendanaan yang bersifat mendadak dan mendesak. Melalui Komite Sekolah, maka sekolah dapat menghimpun dana guna mencukupi kebutuhan akan dana yang mendadak dan mendesak. Adapun langkah yang diambil Komite Sekolah adalah dengan terlebih dahulu menggelar pertemuan dengan Dewan Kelas, untuk kemudian disampaikan kepada masing-masing wali siswa di setiap kelas. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Ketika membutuhkan dana besar dan tidak teranggarkan di awal tahun, komite sekolah memberikan dukungan, maka selanjutnya komite sekolah membentuk pertemuan dewan kelas seluruhnya. Seluruh Dewan Kelas dipanggil dalam forum Dewan Sekolah (IS/KM-1/02012023).

Bentuk dukungan material selanjutnya adalah berupa sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Pembelajaran yang dimaksud tentunya sesuai dengan kebutuhan kelas. Oleh karena itu, dalam hal dukungan sarana dan prasarana, Dewan Kelas selaku perpanjangan dari Komite Sekolah lebih berperan untuk memberikan dukungan yang lebih spesifik. Melalui forum temu wali atau forum Dewan Kelas, guru menyampaikan permasalahan dalam mengajar di kelas yang salah satunya berkaitan dengan fasilitas kelas. Kemudian Dewan Kelas bersama wali siswa secara bersama-sama secara suka rela memberikan dukungan berupa sarana dan prasarana. Melalui forum temu wali atau forum Dewan Kelas tersebut, bantuan sarana dan prasarana yang diberikan antara lain adalah speaker, dispenser, dan bahkan komputer. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Pertemuan dilakukan dengan menyampaikan kendala-kendala saat pembelajaran di forum temu wali, seperti kurang rak, nanti langsung dibeli. Hal tersebut saya rasa salah satu bentuk dukungan untuk pembelajaran (KMR/KM-2/02012023).

Banyaknya dukungan wali siswa yang dihimpun oleh Komite Sekolah maupun melalui Dewan Kelas tidak hanya dirasakan oleh sekolah. Akan tetapi seluruh sumber daya manusia di sekolah turut mendapatkan dukungan secara material dari Komite Sekolah. Misalnya, pada momen Hari Raya Idul Fitri, Komite Sekolah

menghimpun dukungan dari seluruh wali siswa untuk memberikan parcel dan bingkisan kepada seluruh guru dan karyawan. Selain itu, hubungan erat antara masing-masing wali kelas dengan wali siswa membuat wali siswa secara suka rela memberikan dukungan berupa pulsa kepada wali kelas. Hal tersebut karena padatnya intensitas komunikasi antara wali kelas dengan wali siswa. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Dukungannya banyak, material dan nonmaterial kita dapatkan. Secara material wali iuran setiap bulan, bukan SPP tetapi namanya Iuran Pendidikan. Wali ada inisiatif sendiri untuk menyediakan kipas angin dan sebagainya. Setiap Idul fitri menghimpun dana sosial untuk guru karyawan untuk memberikan tali asih berupa sembako, dan parcel (WHY/KM-3/02012023).

Dukungan yang dilakukan komite sekolah demi kebelangsungan pelaksanaan pembelajaran di lembaga sekolah selalu terkondisikan guna mencapai kenyamanan, ketenangan dan keamanan siswa. Di sini wali siswa ada yang secara sukarela bersedia untuk melatih kegiatan ekstrakurikuler reog kendang sampai siswa bisa dan siap menghadapi kompetisi sewaktu-waktu. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Pihak sekolah setelah berdiskusi dengan komite sekolah, untuk menanyakan kepada wali siswa apakah ada yang bersedia dan mempunyai keahlian untuk melatih ekstrakurikuler reog kendang (SWS/KM-4/02012023).

Secara nonmaterial, Komite Sekolah memberikan dukungan moral dan tenaga untuk mendukung pembelajaran di sekolah. Dukungan tenaga diberikan ketika salah seorang wali siswa memberikan materi berupa pelatihan membaca di sekolah. Sebagaimana

na hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Sekolah meminta ke beberapa wali murid yang mempunyai profesi tertentu yang unik untuk mengajar. Contohnya ada orang tua yang bekerja di bidang kerajinan tangan, pertanian dan seterusnya (SWS/KM-5/02012023).

Dukungan moral yang diberikan oleh Komite Sekolah terkait dengan program dan pembelajaran di sekolah. adapun dukungan terhadap program sekolah diwujudkan dengan membantu pihak sekolah dalam memahami program-program yang akan dilaksanakan sekolah dan hal-hal berkaitan dengan anggaran. Kegiatan tersebut dilakukan agar wali siswa dapat satu suara untuk mendukung program-program sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

Saat ada kenaikan uang pembayaran, wali murid sering protes tetapi ketika ada kami, kami bisa meminta penjelasan dari sekolah, apa manfaatnya, logisnya apa, untuk peningkatan kualitas atau tidak, kalau memang signifikan dan tidak bisa ditawar ya akan kita komunikasikan caranya kita mengundang Dewan Kelas, sehingga apabila biaya harus naik mereka. (SG/KM-6/02012023).

Program-program non-akademik yang menjadi agenda sekolah juga didukung oleh Komite Sekolah dengan cara turut mempromosikan kegiatan tersebut pada masyarakat luas maupun kepada wali siswa. Misalnya pada kegiatan jalan sehat berhadiah motor yang pernah diselenggarakan pihak sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Kegiatan-kegiatan non akademik, komite ikut mendorong atau mendukung bahkan membantu ikut promosi di grup *whatsapp* atau *facebook*. (ST/KM-7/02012023).

Dukungan moral Komite Sekolah diberikan dalam bentuk perhatian dan pengawasan kepada siswa di rumah. Adapun bentuk perhatian tersebut misalnya dengan menanyakan dan mengingatkan tugas rumah dari sekolah dan menemani belajar untuk ujian. Selain itu, guru merasa terbantu ketika orangtua turut mengawasi siswa dalam melaksanakan ibadah di rumah. Ibadah siswa di sekolah juga menjadi fokus guru untuk di kembangkan, misalnya dengan mengawasi pelaksanaan sholat dhuha dan dhuhur serta menemani mengaji pada saat istirahat siang. Dengan banyaknya ibadah yang diajarkan di sekolah, maka orangtua diharapkan juga mendukung hal tersebut dengan turut mengawasi ibadah siswa di rumah. Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Terte yang menyatakan bahwa:

dukungan moral, mulai dari kegiatan pembelajaran, dukungan berupa pantauan ibadah siswa, dan dukungan moral kepada siswa saat mengerjakan PR, UTS, dan ujian. kalau tidak ada kerjasama dengan orangtua ya nanti anak-anak lepas. Jadi ini dukungan yang saya rasakan . (TLB/KM-8/02012023).

Demikian juga yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

Guru juga mendapatkan dukungan ketika melaksanakan pembelajaran di luar kelas dan bekerjasama dengan instansi lain. Misalnya saat mengadakan pembelajaran tentang nasionalisme, di instansi militer KODIM. Ketika itu guru merasa dibantu oleh Komite Sekolah, karena selain diberikan izin melaksanakan

kegiatan tersebut, Komite sedikit banyak berperan dalam melakukan lobi atas surat atau proposal kegiatan tersebut di tingkat birokrasi KODIM. Sehingga pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. (BBG/KM-9/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Secara nonmateriil, wali-wali di sini merupakan stakeholder di pemda kodim, Polres dan lain-lain. Dan karena itu, kita pernah dibantu untuk belajar nasionalisme 2-3 kali di kodim. Untuk pembelajaran di luar tersebut, mengurus birokrasi di Bantul lebih cepat. Hal ini karena kita ada wali di sana. Selain itu juga hubungan erat antara guru, sekolah dengan wali. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan komite Sekolah memiliki peran pendukung dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Komite Sekolah memberikan dukungan secara material dan nonmaterial. Secara material berupa tanah wakaf pada awal masa pembangunan sekolah, iuran pendidikan, dan dana jika sekolah membutuhkan dana yang mendadak dan mendesak. Kemudian, Komite Sekolah melalui Dewan Kelas memberikan dukungan secara spesifik untuk setiap kelas sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan wali kelas pada forum temu wali atau forum Dewan Kelas. Secara nonmaterial, bentuk dukungan Komite Sekolah berupa dukungan tenaga dan dukungan moral bagi program sekolah dan pembelajaran. Dukungan tenaga diberikan ketika salah satu wali siswa memberikan pelatihan membaca. Kemudian dukungan moral pada program sekolah diberikan oleh Komite Sekolah dengan ikut memahami wali siswa terkait program dan

anggaran yang akan digunakan. selain itu juga menyebarluaskan program sekolah. Selanjutnya, dukungan moral pada pembelajaran diwujudkan dengan memberi pengawasan bagi siswa dalam beribadah dan belajar di rumah, serta turut membantu dalam lobi dengan instansi luar sekolah agar pihak sekolah dimudahkan dalam melaksanakan pembelajaran di instansi tersebut, misalnya ketika siswa belajar tentang nasionalisme di KODIM.

c) Komite sekolah dalam pengontrol di sekolah

Komite Sekolah menjalankan peran sebagai pengontrol terhadap mutu pembelajaran secara menyeluruh, mulai dari penganggaran di awal tahun dan pelaksanaan segala kegiatan, termasuk pembelajaran setiap hari. Komite Sekolah melakukan kontrol terhadap perencanaan pendidikan sekolah. Adapun bentuk kontrol tersebut adalah dengan terlibat dalam pembahasan RKAS, RAPBS, dan finalisasi kurikulum. Pada pembahasan terkait RKAS dan RAPBS, Komite Sekolah memberikan evaluasi dan masukan atas rancangan program sekolah dan penganggaran sekolah. Sebagaimana dijelaskan pada peran pertimbangan Komite Sekolah dalam RKAS dan RAPBS, Komite Sekolah berhak memberikan saran dan bahkan menolak program yang diajukan sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

“Komite mencermati dan memberi masukan, mana program yang tetap dilaksanakan, tambahan program maupun meng-cut program yang kita laksanakan dengan pertimbangan yang baik dan matang. Dulu pernah ada rencana kegiatan kemah untuk kelas 1-5 SD kemudian diarahkan kelas 4 dan 5, kelas 1-3 bentuknya bakti sosial. Pernah juga ada wacana piknik bersama kelas 6, kemudian komite memberi pertimbangan bahwa hal tersebut belum dirasa perlu (IS/KM-1/02012023).

Pada proses finalisasi kurikulum, Komite Sekolah memerankan peran yang sama dengan melihat pemaparan kurikulum dari sekolah, kemudian memberikan kritik dan saran. Misalnya pada penetapan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal). Komite Sekolah beranggapan bahwa nilai KKM 70 yang ditawarkan sekolah kurang sesuai dengan visi dan misi sekolah. Maka atas saran dari Komite Sekolah, nilai KKM disepakati menjadi 75. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), kita tidak minta KKM 75 tetapi juga hasil rembugan dengan Komite Sekolah. Kita mengusulkan KKM-nya 70, tapi kita diminta 75 karena sekolah unggulan. Juga pelajaran yang menjadi ciri khas SD kita tetap dipertahankan. (KMR/KM-2/02012023).

Peran pengawasan atau kontrol dari Komite Sekolah tidak berhenti di situ. Akan tetapi, pada pelaksanaan program yang telah disetujui dalam pembahasan tetap diawasi oleh Komite Sekolah. Salah satu bentuk pengawasan terhadap program yang dijalankan oleh sekolah adalah dengan memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah. Komite memantau pelaksanaan program sekolah, salah satu bentuk pemantauan terhadap program sekolah adalah dengan memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program sekolah. Misalnya pada program jalan sehat yang akan dilaksanakan sekolah. Pada kegiatan tersebut sekolah menarik biaya sebesar Rp. 5000,00 kepada setiap wali siswa. Mengetahui adanya iuran tersebut, Komite Sekolah mengadakan pertemuan dengan Kepala Sekolah. Komite Sekolah menyatakan keberatan dengan adanya iuran tersebut, karena menimbang bahwa sekolah mampu melaksanakan kegiatan jalan sehat tanpa melakukan iuran tambahan bagi wali siswa. Kemudian, disepakati bahwa jalan sehat yang menarik iuran Rp. 5.000,00 kepada setiap

wali siswa, tidak jadi melakukan penarikan iuran. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Pada saat akan membuat acara jalan sehat dalam rangka ulang tahun namun setiap siswa harus membayar 5 ribu untuk snack. Kemudian kita menemui Kepala Sekolah dan memang ada data rincian dana tetapi kita memberi masukan untuk tidak membayar. Kalau hanya 5 ribu menimbulkan isu lebih baik gratis gaungnya nanti akan lebih hebat. Yang sudah terlanjur membayar 5 ribu dikembalikan. (WHY/KM-3/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah selalu berperan sebagai pengontrol atas pelaksanaan program sekolah. Sehingga apabila pada saat atau setelah pelaksanaan program sekolah dijalankan tidak ada suara yang tidak enak. Karena sebenarnya program yang dilaksanakan adalah program yang telah disepakai oleh komite sekolah, pihak sekolah dan wali siswa. Meski terkadang hal ini masih saja terjadi, ada beberapa wali siswa yang menanyakan kembali apakah pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sudah sesuai dan ada pertanggungjawabannya. (SWS/KM-4/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Pada pelaksanaan peran pengawasan terhadap pelaksanaan program sekolah, Komite Sekolah juga meminta klarifikasi atas isu atau komentar miring terhadap program sekolah. Hal tersebut dilakukan agar sekolah dan wali siswa tetap saling harmonis dan

padu dalam menjalankan program sekolah. Adapun klarifikasi yang diminta Komite Sekolah kepada pihak sekolah adalah terkait program pengadaan boks makan siang dari produk tupperware. Komite sekolah meminta sekolah untuk memberikan klarifikasi terkait uang fee yang didapatkan dari pembelian produk tersebut. Kemudian pihak sekolah menjelaskan bahwa fee yang dimaksud memang ada dan dimasukkan ke dalam kas sekolah. (SWS/KM-5/02012023).

Komite Sekolah juga melakukan pengecekan terhadap kualitas layanan di sekolah dengan menggunakan ukuran standar SPM (Standar Pelayanan Minimal). Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan di sekolah dasar. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

Di sini ada standar pelayanan minimal, baru saja kita cek, kita pegang Standar Pelayanan Minimal (SPM) lalu nanti kita cek sekolah. Kesimpulannya SD sudah melebihi SPM untuk poin tertentu. Misalnya jam pembelajaran dan jumlah judul buku sudah melebihi SPM tetapi belum sampai standar pelayanan nasional. Kalau ada yang belum tercapai kita cari kenapa, nanti dibantu oleh Komite Sekolah termasuk guru untuk memenuhi standar. (SG/KM-6/02012023).

Peran kontrol Komite Sekolah selanjutnya adalah terkait dengan hasil output pendidikan. Adapun yang menjadi fokus kontrol Komite Sekolah terkait output pendidikan, meliputi pelaksanaan pembelajaran dan hasil ujian atau prestasi siswa. Pada pelaksanaan pembelajaran, Komite Sekolah memantau melalui program open class yang diadakan dengan mengundang Komite Sekolah dan wali siswa untuk melihat pembelajaran secara langsung di kelas. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN

1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Kita terlibat dalam hal penganggaran setiap tahun, di situ kita bisa melihat alokasi dana akan seperti apa. Untuk kegiatan belajar mengajar kita mengontrol dengan datang di kelas. Apabila ada perilaku guru yang tidak mendukung akan ketahuan. Saat ada guru yang pada saat mengajar guru tersebut mengajar sambil bermain HP, nanti kita kontrol juga (ST/KM-7/02012023).

Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

Komite selalu selalu memantau terkait tingkah laku, yang kurang berkenan langsung disampaikan oleh Dewan Sekolah ke sekolah untuk ditindaklanjuti. Dewan Sekolah juga membantu saat KBM contohnya ada yang kurang langsung memberi masukan ke Kepala Sekolah untuk dilakukan pembinaan secara langsung. (TLB/KM-8/02012023).

Pelaksanaan kontrol terhadap pembelajaran oleh Komite Sekolah tidak mampu menjangkau semua kelas, mengingat banyaknya kelas dan keterbatasan anggota Komite Sekolah. Oleh karena itu, Komite Sekolah melalui Dewan Kelas melaksanakan kontrol terhadap pembelajaran melalui forum temu wali atau forum Dewan Kelas. Pada forum tersebut wali kelas melaporkan perkembangan maupun kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Kemudian Dewan Kelas memberikan saran, kritik, maupun evaluasi atas laporan wali kelas tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

Fungsi kontrol itu ada saat di forum Dewan Kelas. Karena di forum itu saya buat laporan kemudian saya laporkan ke wali. Dan Komite menanggapi dengan baik,

karena forum itu memang atas inisiasi dari komite/wali/dewan kelas. Hasil belajar, nilai ujian, ulangan, dan uas kita sampaikan. Sampai juga proses pembelajaran. (BBG/KM-9/02012023).

Pada forum temu wali atau forum Dewan Kelas tersebut, wali siswa dan Dewan Kelas juga mendapatkan informasi terkait hasil belajar siswa, meliputi nilai ulangan dan nilai ujian akhir. Kemudian Dewan Kelas selaku perpanjangan dari Komite Sekolah bersama wali melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran berdasarkan hasil belajar siswa. Dalam rangka memantau output pendidikan dari SD, Komite Sekolah juga melakukan kontrol terhadap item tes atau soal yang akan digunakan dalam ujian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Boto-ran yang menyatakan bahwa:

Soal ujian juga kita cek, benar atau tidak, apakah sudah sesuai dengan tingkat kelas. Kita melihat soal bahkan item-itemnya karena wali-wali kita kebanyakan mengerti standar pembuatan soal. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan Komite Sekolah telah menjalankan peran pengontrol dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di SD. Di awal tahun, Komite Sekolah melakukan kontrol dalam perencanaan pendidikan dengan terlibat dalam pemaparan program sekolah dan anggaran, kemudian Komite Sekolah turut memberikan kritikan dan masukan. Misalnya program kemah yang sedianya akan diikuti kelas I-V, atas kritik dan masukan Komite Sekolah menjadi hanya untuk kelas IV dan V saja, kemudian kelas I-III dianti dengan kegiatan bakti sosial. Selanjutnya, Komite Sekolah memantau pelaksanaan program sekolah dan memberikan masukan, kritik, dan evaluasi kepada sekolah. Misalnya pada program jalan sehat, Komite Sekolah meminta agar iuran kepada wali siswa ditiadakan. Komite

juga melakukan pengecekan terhadap SPM SD menggunakan SPM dari pemerintah. Kegiatan pengontrolan selanjutnya adalah dengan memantau *output* pendidikan. Adapun bentuk kontrol terhadap *output* pendidikan tersebut diwujudkan dengan mengawasi pelaksanaan pembelajaran. Komite Sekolah melakukan kontrol dengan melihat pembelajaran secara langsung ke kelas maupun melakukan kontrol melalui Dewan Kelas pada forum temu wali. Kontrol pada pembelajaran meliputi hasil belajar siswa, cara mengajar guru, dan item ujian atau tes. Apabila Komite Sekolah menemukan guru yang melakukan pengelolaan kelas dengan tidak baik, maka Komite Sekolah akan menyampaikan kepada pihak sekolah untuk ditindaklanjuti.

d) Komite sekolah dalam mediator di sekolah

Komite Sekolah selaku moderator melaksanakan program perencanaan. Adapun bentuk perencanaan tersebut dengan menjadi menampung segala aspirasi dan usulan terkait dengan program dan kebijakan terhadap sekolah. Dalam menjalankan peran menjaring aspirasi wali siswa, Komite Sekolah dibantu dengan Dewan Kelas yang mewakili wali siswa pada setiap kelas. Aspirasi maupun usulan program dan kebijakan tersebut di sampaikan pada sekolah, khususnya pada pembahasan RKAS, RAPBS, dan finalisasi kurikulum. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Kita menyambungkan antara wali murid, siswa, sekolah dengan masyarakat. Dengan wali siswa contohnya apabila ada program sekolah maka kita akan sosialisasikan. Kita sebagai agen penyambung lidah tentang program itu seperti apa, pentingnya apa dan hikmahnya apa. (IS/KM-1/02012023).

Komite Sekolah juga berperan dengan turut mengawasi serta memperhatikan respon wali siswa dan masyarakat atas pelaksa-

naan program-program tersebut. Komite Sekolah juga mengakomodir apabila terdapat keluhan dari wali siswa terkait program-sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Kita sifatnya menjembatani, misalnya sempat ada tokoh muda yang mengeluhkan bahwa dua anaknya sekolah di situ tetapi bayarnya sama, saya sampaikan ke Kepala Sekolah. Apabila mampu, ya membayar sesuai ketentuan kalau tidak mampu ya bicara langsung ke sekolah nanti bisa diberi keringanan. Secara prinsip ya bayar sesuai kemampuan (KMR/KM-2/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah menjalankan peran mediasi dengan mengelola bantuan dari instansi luar yang hendak berkontribusi bagi pengembangan pendidikan. Adapun bentuk pengelolaan tersebut adalah dengan memobilisasi dan mengkoordinasikan bantuan dari masyarakat kepada pihak sekolah (WHY/KM-3/02012023).

Perolehan dana yang diterima oleh pihak sekolah adalah proses yang telah dilaksanakan oleh pihak komite sekolah dan wali siswa pada saat diadakannya pertemuan. Dari pertemuan tersebut ada beberapa wali siswa yang juga lulusan sekolah tersebut. Sehingga dukungan dana untuk pelaksanaan program yang telah disepakati bisa bertambah dengan adanya sumbangan dari beberapa lulusan. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Dari lulusan dari sekolah ini, ternyata banyak juga yang anaknya disekolahkan di sini, dan rata-rata mereka berhasil dalam ekonomi sehingga mereka juga mem-

berikan kontribusi untuk almamaternya. (SWS/KM-4/02012023).

Proses pemerolehan bantuan tersebut sebagian diperoleh dari usaha sekolah yang dibantu oleh Komite Sekolah. Hal tersebut mengingat Komite Sekolah SD yang memiliki latarbelakang profesi yang beragam, mulai dari pemerintahan hingga swasta. Dengan beragamnya latarbelakang profesi Komite Sekolah, maka akses informasi terkait bantuan untuk sekolah menjadi lebih mudah. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kapatihan yang menyatakan bahwa:

Iya, saya sebagai mantan ketua komisi D di DPRD dapat mengawal proposal dari sekolah yang masuk ke DPRD. Walaupun saya sudah tidak di DPRD kita masih ada akses parpol, kebetulan kepala dinasnyapun namun kita tetap profesional tidak lantas seenaknya saja. Seluruh ketentuan atau prosedur kita lalui (SWS/KM-5/02012023).

Hal tersebut juga didukung oleh keterangan dari Wakil Kepala Sekolah bidang Sarpras yang menyatakan bahwa kegiatan pembelajaran nasionalisme di KODIM juga atas bantuan Komite Sekolah. Pada proses pengajuan izin pembelajaran di KODIM, Komite Sekolah membantu dalam lobi ditingkat birokrasi KODIM. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

Kan wali-wali di sini merupakan *stakeholder* di pemda, kodim, polres dan lain-lain. Dan karena itu, kita pernah dibantu untuk belajar nasionalisme 2-3 kali di kodim...Untuk pembelajaran di luar tersebut, mengurus birokrasi di Bantul lebih cepat. Hal ini karena kita ada wali di sana. Selain itu juga hubungan erat antara guru, sekolah dengan wali. (SG/KM-6/02012023).

Komite Sekolah bersedia melakukan mediasi. Misalnya pada saat SD melaksanakan kebijakan masuk sekolah kepada siswa pada hari libur hari raya agama non-Islam. Pada hari libur agama lain tersebut, siswa tetap diwajibkan masuk untuk melaksanakan kegiatan non-KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Kegiatan tersebut biasanya berupa outbond yang dilaksanakan untuk mendidik siswa secara karakter. Oleh karena melwajibkan siswa masuk meskipun libur hari raya agama lain. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Fungsi mediasi sesungguhnya ketika kita mendapat kritikan DPRD terkait libur besar hari agama lain kita tetap masuk. Anggota DPRD merasa ini perlu ditinjau kembali. Kemudian Dewan Sekolah merasa ini baik dan ciri khas sekolah kita maka yang menghadapi DPRD adalah Dewan Sekolah yang akan menyampaikan latar belakang dan tujuan karena salah satu anggota Dewan Sekolah merupakan mantan anggota DPRD. (ST/KM-7/02012023).

Hal tersebut didukung oleh keterangan Ketua Komite Sekolah yang menganggap bahwa kegiatan masuk pada hari raya agama lain adalah kegiatan yang positif. Selain itu, beliau menjelaskan bahwa masuk sekolah pada saat libur hari raya agama lain bukan bentuk intoleransi atau bahkan radikalisme. Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

Dulu kita juga diminta pertimbangan walaupun ketua komisi DPRD tidak sepakat dengan mengatakan bahwa SD mengajarkan radikalisme terkait kebijakan kita hari libur non muslim tetap ada kegiatan di sekolah, kalau ditanya (DPRD) nanti akan kita jelaskan. (TLB/KM-8/02012023).

Berikut ini yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

Pada saat SD melaksanakan kebijakan masuk sekolah kepada siswa pada hari libur hari raya agama non-Islam. Pada hari libur agama lain tersebut, siswa tetap diwajibkan masuk untuk melaksanakan kegiatan non-KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Kegiatan tersebut biasanya berupa outbond yang dilaksanakan untuk mendidik siswa secara karakter. Oleh karena mewajibkan siswa masuk meskipun libur hari raya agama lain. (BBG/KM-9/02012023).

Informasi di atas didukung dengan yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Komite Sekolah SD yang memiliki latarbelakang profesi yang beragam, mulai dari pemerintahan hingga swasta. Dengan beragamnya latarbelakang profesi Komite Sekolah, maka akses informasi terkait bantuan untuk sekolah menjadi lebih mudah. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan Komite Sekolah menjalankan peran sebagai mediator dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di SD. Komite Sekolah menjalankan peran sebagai mediator dengan menjadi jembatan antara pihak sekolah dengan wali siswa dan masyarakat dalam hal menyampaikan aspirasi, masukan, dan sosialisasi terkait program sekolah dan kebijakan sekolah. Komite Sekolah juga mendengarkan dan menindaklanjuti terhadap keluhan atas kebijakan maupun program sekolah. misalnya wali siswa yang mengeluh tentang anggaran, maka Komite Sekolah mendampingi untuk bertemu dengan pihak sekolah. Selain itu, Komite Sekolah juga memediasi sekolah dengan instansi luar, misalnya ketika mendapatkan kritikan terkait kebijakan siswa wajib masuk pada hari libur hari raya agama

non-Islam dari DPRD Tulungagung . Komite Sekolah menyatakan kesediaan untuk melakukan audiensi kepada DPRD Tulungagung apabila diperlukan.

2) Program komite sekolah dalam menyalurkan aspirasinya dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Kedudukannya sebagai badan mandiri yang mewadahi peran masyarakat memiliki beberapa tujuan yang dituangkan dalam AD dan ART komite sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Tujuan yang dituangkan dalam AD dan ART komite sekolah yaitu Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kewajiban operasional dan program pendidikan di sekolah. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan (IS/KM-1/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Tujuan dari Komite sekolah adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan

pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Sehingga di perlukan kerjasama antara Komite sekolah dan juga pihak sekolah. (KMR/KM-2/02012023).

Hasil wawancara di atas menguraikan bahwa Tujuan dari Komite sekolah adalah memwadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; Menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Sehingga di perlukan kerjasama antara Komite sekolah dan juga pihak sekolah.

Berikut ini hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Dalam menjalin suasana keterbukaan baik sekolah dan Komite sekolah bekerjasama dengan menciptakan suasana dan kondisi transparan seperti contohnya dalam penggunaan dana dari masyarakat, untuk apa dan bagaimana dana itu di gunakan. (WHY/KM-3/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kapatihan yang menyatakan bahwa:

program komite sekolah yaitu mempersiapkan pendaftaran siswa baru dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar lebih dikenal serta masyarakat mengetahui program dari sekolah yang tidak hanya menitikberatkan pada akademik saja tetapi juga non akademik. (SWS/KM-4/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

program komite sekolah yaitu rapat pengurus Komite sekolah secara periodic; Membantu mempromosikan sekolah; Kerjasama dalam peningkatan mutu pendidikan; Membantu mengusahakan dana untuk pembangunan fisik sekolah. (SWS/KM-5/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

peran komite sekolah sangat dibutuhkan. Hal ini dibuktikan bahwa selalu diadakan rapat komite. Rapat komite yang diadakan tidak hanya atas dasar undangan saja, tetapi kadang komite juga meminta sekolah untuk mengadakan rapat komite jika ada hal-hal dan masukan dari masyarakat serta wali murid yang perlu disampaikan. (SG/KM-6/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Peran komite yang kami lakukan adalah ikut serta dalam menyusun dan mengesahkan RAPBS, meningkatkan kedisiplinan siswa dan guru sebelum jam tujuh harus sudah berada di sekolah, serta mengusulkan penjagaan keamanan dan keselamatan siswa saat menyeberang jalan. (ST/KM-7/02012023).

Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

bahwa komite sekolah memiliki peran yang aktif terutama di lembaga sekolah dan sangat penting dalam pengembangan peserta didik dan peningkatan mutu

pengelolaan pendidikan. Sebelum memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah, komite sekolah sebelumnya melihat kemungkinan apa yang menjadi harapan dan aspirasi masyarakat terhadap lembaga pendidikan ini, mengenai kompetensi apa yang dapat dicapai dari lulusannya seperti keterampilan agama yang harus dikuasai di masing-masing lembaga pendidikan seperti menjalankan sholat dhuha dan dhuhur berjamaah di masjid. (TLB/KM-8/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

Dari pihak komite sekolah itu sendiri sangat mendukung dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, komite sekolah juga berfungsi sebagai penggalang dana di mana komite sekolah meminta dana atau sumbangan tetapi tidak memberatkan kami selaku orang tua siswa, dikarenakan komite sekolah tidak memberikan patokan jumlah uang yang harus disumbangkan kepada sekolah. (BBG/KM-9/02012023).

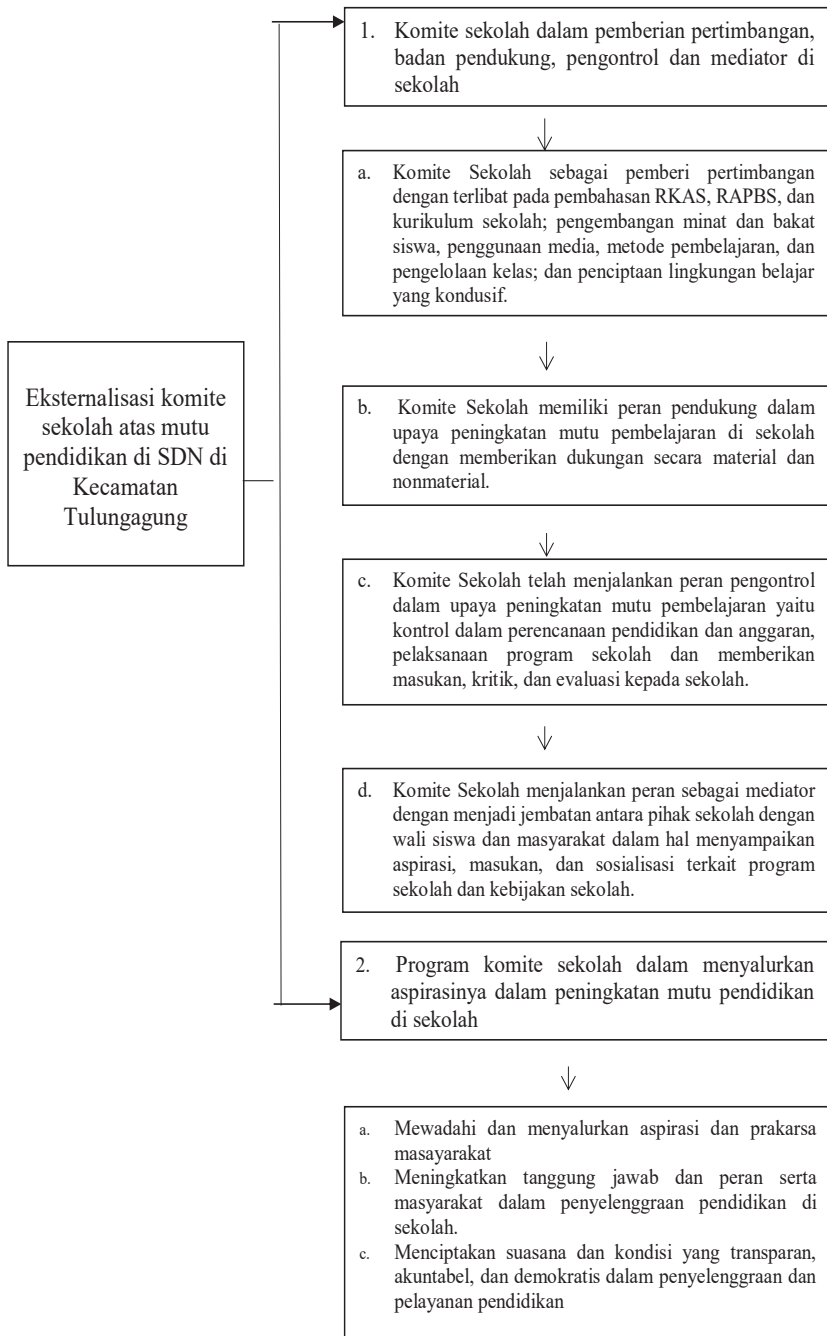
Hasil wawancara di atas menguraikan bahwa komite sekolah itu sendiri sangat mendukung dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah. Komite sekolah juga berfungsi sebagai penggalang dana di mana komite sekolah meminta dana atau sumbangan tetapi tidak memberatkan kami selaku orang tua siswa, dikarenakan komite sekolah tidak memberikan patokan jumlah uang yang harus disumbangkan kepada sekolah. Selanjutnya diperkuat dengan informasi yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah bertujuan untuk dapat memberikan tempat untuk menyalurkan aspirasi orang tua siswa

dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Kedudukannya sebagai badan mandiri yang mewadahi peran masyarakat memiliki beberapa tujuan yang dituangkan dalam AD dan ART komite sekolah. Tujuan yang dituangkan dalam AD dan ART komite sekolah yaitu Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kewajiban operasional dan program pendidikan di sekolah. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.

Temuan penelitian mengenai eksternalisasi komite sekolah atas mutu pendidikan dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 4.1 Eksternalisasi komite sekolah atas mutu pendidikan

Peran Komite Sekolah sangat diperlukan dalam hal proses peningkatan atas mutu pendidikan yang telah ada. Bagaimana Komite Sekolah melaksanakan kegiatan bersama para wali peserta didik, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat agar program yang telah disampaikan pada saat pertemuan rutin dengan wali peserta didik bisa terlaksana sesuai rencana. Di mana kegiatan yang dilaksanakan adalah peran yang harus dikerjakan oleh komite sekolah, yaitu sebagai :

- 1) Faktor pendukung program komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan

Dalam menyukseskan program-program yang telah direncanakan oleh pihak sekolah dengan komite sekolah, maka di lembaga sekolah itu sendiri terdapat faktor-faktor guna untuk meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan. Dengan adanya faktor pendukung ini, maka akan lebih mudah untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Selain itu, juga mempermudah pelaksanaannya guna dijadikan motivasi dalam proses berlangsungnya program tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Faktor pendukungnya cukup banyak, antara lain: pertama, karena kami terpilih menjadi komite berdasarkan musyawarah di mana pertimbangannya adalah loyalitas dan niat kuat kami untuk menyelenggarakan pendidikan di lembaga sekolah. Kedua, hubungan kerja sama komite dengan kepala sekolah lebih mudah karena hampir tidak ada sekat dalam kesamaan visi, misi dan tujuan. Ketiga, dukungan kuat masyarakat terhadap keberadaan sekolah (IS/KM-1/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Mengenai faktor pendukung komite sekolah ada beberapa yang saya ketahui salah satunya, yaitu komunikasi dan koordinasi yang sudah terjalin baik dan harmonis antara pihak sekolah dengan komite sekolah, adanya saling keterbukaan antara pihak sekolah dengan komite sekolah sehingga sekolah tidak merasa diawasi, dan terwujudnya kekompakan orang tua siswa dalam melaksanakan hasil kesepakatan untuk mendukung program sekolah (KMR/KM-2/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Kalau saya lihat selama ini, yang menjadi anggota komite sekolah sangat sungguh-sungguh dan aktif dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya di sekolah, misalnya selalu rutin dalam mengadakan pertemuan antara wali murid dengan pihak sekolah. (WHY/KM-3/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Faktor pendukungnya ya karena komite dengan kepala sekolah itu sama-sama sepejuangan untuk berdirinya lembaga ini, jadi komunikasipun mudah. Selain itu partisipasi masyarakat yang cukup membuat kami termotivasi ternyata belum ada aturan yang jelas dari peran komite sekolah yang kami terima dan sebagian pengurus komite ada yang kurang aktif. (SWS/KM-4/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Yang terpenting adalah faktor pendukung antara komite dan pihak sekolah yang sama-sama mempunyai sudut pandang yang sesuai dengan visi misi sekolah terkait dengan peningkatan mutu pendidikan . (SWS/KM-5/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan peningkatan mutu, sekolah memiliki faktor yang dapat mensukseskan program-program yang telah direncanakan oleh sekolah dengan Komite Sekolah. Dengan faktor pendukung ini, sekolah lebih mudah untuk melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu, karena selain mempermudah pelaksanaannya juga dapat dijadikan motivasi dalam proses berlangsungnya program tersebut. (SG/KM-6/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

faktor pendukung peran komite sekolah di antara lain: Kerja sama yang baik yang telah terbina antara unsur-unsur di dalam sekolah dan unsur-unsur dalam masyarakat bersama anggota Komite Sekolah, Adanya keterbukaan dari pihak sekolah terhadap peran Komite Sekolah dalam peningkatan mutu atau kualitas pendidikan, Terwujudnya kekompakan wali murid dalam melaksanakan hasil kesepakatan dalam mendukung program sekolah. (ST/KM-7/02012023).

Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

Kalau saya lihat selama ini yang menjadi anggota Komite Sekolah sungguh-sungguh untuk aktif, misalnya dalam setiap pertemuan antara wali siswa dengan sekolah. (TLB/KM-8/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

Peran komite sekolah sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan di antaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya sekolah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki sekolah yang rusak. (BBG/KM-9/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Pelaksanaan program Komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dilakukan dengan sangat baik. Hal ini dapat kita lihat dari dilibatkannya seluruh unsur baik dari pihak sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan serta pihak masyarakat sebagai pemberi saran dan masukan terhadap pelaksanaan program komite. Adapun program-program yang dilaksanakan diantaranya yaitu program keagamaan serta program ekstrakurikuler yang bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kabupaten. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan faktor pendukung yang dijelaskan di atas, antara pihak sekolah, komite dan orang tua siswa berusaha dengan sebaik mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pen-

gelolaan pendidikan. Pihak sekolah, Komite dan masyarakat berusaha seoptimal mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.

2) Komite sekolah dalam laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat

Auditing atau pemeriksaan merupakan kegiatan yang terkait dengan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Kegiatan yang didanai dari sumber dana komite, kami menyusun laporan kegiatan setiap satu bulan sekali, diserahkan kepada Komite untuk diperiksa dan ditandatangani. Karena itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kami terhadap dana pendidikan dari Komite. (IS/KM-1/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

sekolah selalu menyusun pertanggungjawaban atas dana yang telah digunakan baik dana itu berasal dari komite atau dana yang berasal dari Pemerintah. Adapun prosedur pertanggungjawabannya mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku (KMR/KM-2/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Setiap kegiatan kesiswaan di sekolah, selalu melibatkan OSIS sebagai panitia kegiatan. Seperti biasa sebelum melaksanakan kegiatan, kami mengajukan proposal kegiatan yang dipandu pembina OSIS, untuk mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Setelah dana cair barulah kami bisa melaksanakan kegiatan. Sebagai pertanggungjawabannya kami membuat laporan di setiap akhir kegiatan (WHY/KM-3/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN
1 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sekolah dengan dana yang berasal dari wali siswa dilaksanakan oleh pihak sekolah rutin setiap bulan. (SWS/KM-4/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN
2 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Sekolah selalu menyusun laporan pertanggungjawaban kepada komite sekolah jika program/kegiatan sekolah pendanaannya melalui dana rutin atau dana insidental. Karena dana tersebut berasal dari masyarakat. (SWS/KM-5/02012023).

Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN
1 Jepun yang menyatakan bahwa:

Dari setiap kegiatan yang didanai dari komite pencairan dananya harus melalui saya, setelah selesai kegiatan bendahara kegiatan harus membuat laporan pertanggungjawaban. (SG/KM-6/02012023).

Khususnya pengelolaan dana BOS pengawasan internal dilaksanakan oleh Komite sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten/

Kota melalui pengawas sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Untuk memudahkan dalam menyusun pertanggungjawaban keuangan, ada yang selalu mencatat atau membukukan setiap penerimaan maupun pengeluaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pihak yang selalu membuat pertanggungjawaban di setiap pengeluaran keuangan berupa SPJ setiap bulan, sehingga sewaktu-waktu ada pemeriksaan sudah siap. (ST/KM-7/02012023).

Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

Untuk memudahkan dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan, maka diperlukan pembukuan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran, yang harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memudahkan proses pemeriksaan atas penggunaan dana pendidikan. bendahara pengelola Bos membuat pertanggungjawaban berupa laporan per semester yaitu semester I periode Januari-Juni 2021 dan laporan semester II periode Juli-Desember 2021. Adapun laporan tersebut ada dua jenis yaitu: laporan keseluruhan dan laporan ringkas. Wah maaf ya mbak saya harus menjelaskan lebih rinci lagi. Laporan keseluruhan adalah laporan yang disusun oleh sekolah untuk kepentingan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang diketahui oleh komite sekolah (TLB/KM-8/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

penerimaan dan pengeluaran keuangan di sekolah dibukukan sesuai petunjuk pembukuan, di antara pembukuan yang kami laksanakan ada beberapa jenis yaitu: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Pajak. Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu pada sekolah sudah tersedia dan selalu aktif digunakan oleh bendahara. Buku pembantu kas memuat seluruh transaksi pengeluaran keuangan sekolah secara rinci. Antara BKU dan BPK ada sedikit perbedaan yaitu jika BKU untuk penanggalan pengeluaran keuangan ditulis ketika lunas dibayar, sedang BPK setiap terjadi transaksi akan ditulis sesuai tanggal terjadinya transaksi tersebut. (BBG/KM-9/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Buku Pembantu Bank kami gunakan untuk mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui rekening bank, termasuk transaksi giral yaitu bunga bank, pajak bunga dan biaya administrasi. Sedangkan buku pembantu pajak kami gunakan untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor atas pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pajak. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan komite sekolah dalam laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat dilakukan dengan 1) Setiap bulan sekolah menyusun laporan hasil kegiatan kepada komite karena kegiatan tersebut pendanaannya dari komite. 2) Untuk memenuhi pendanaan

suatu kegiatan, maka panitia kegiatan mengajukan proposal untuk mendapatkan pengesahan dari kepala sekolah. Dan pada akhir kegiatan panitia menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. 3) Untuk pertanggungjawaban terhadap dana Bos, bendahara bos membuat laporan per semester yaitu periode Januari-Juni 2021 dan periode Juli-Desember 2021. 4) Semua transaksi keuangan di sekolah dibukukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis buku yang digunakan buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, 5) Setiap pengeluaran keuangan sekolah disusun pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulan. 6) pengelolaan dana pendidikan telah mencerminkan prinsip akuntabilitas public. Hal ini dapat terlihat dari pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak-pihak yang berwenang yaitu, komite sekolah, Dinas pendidikan Kabupaten/ Propinsi dan sebagainya).

Proses penyamaan tujuan adalah langkah yang terpenting dalam peningkatan atas mutu pendidikan di sebuah lembaga pendidikan. Di mana proses tersebut akan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama dan kesepakatan itu akan dibawa kemana, apakah dengan berhenti cukup sampai itu saja, ataukah terus ditingkatkan se optimal mungkin. Sehingga komite sekolah harus mengambil tindakan supaya harapan yang ada bisa terealisasikan dengan cara :

a) Komite sekolah dapat berpartisipasi

Komite sekolah dapat berpartisipasi. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Sebagai ketua komite sekolah selama awal tahun pelajaran kami berperan aktif dalam menyusun rencana kerja sekolah yang di dalamnya membahas mengenai pembiayaan maupun pengelolaan, karena ini berkait-

tan dengan orang tua siswa maka apa yang diharapkan dari orang tua atau wali murid saya sampaikan kepada pihak sekolah seperti masukan mengenai kedisiplinan siswa ketika masuk sekolah sebagai wujud partisipasi dalam pengelolaan pendidikan di sekolah, kemudian usulan tentang kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. (IS/KM-1/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampung-dalem yang menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan dan peningkatan mutu pengelolaan pendidikan, pelaksanaan partisipasi komite dapat berupa dukungan finansial, tenaga dan dukungan pikiran. Secara nyata pemberian dukungan dapat diwujudkan yakni di antaranya dengan pemecahan masalah biaya sekolah bagi anak kurang mampu, kekurangan tenaga pendidik, dan tenaga untuk memperbaiki bangunan sekolah yang sudah rusak. Partisipasi komite tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, tetapi juga ikut dalam memberikan suatu dukungan khususnya untuk orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi guna menunjang pendidikan di sekolah. (KMR/KM-2/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 kampung-dalem yang menyatakan bahwa:

komite selalu menyelesaikan perencanaan-perencanaan yang telah disampaikan ketika rapat, dan dengan terobosan-terobosan yang dilakukan komite sekolah dengan menghubungkan semua pihak-pihak terkait memberikan hasil yang maksimal dalam hal pelaksanaan perencanaan yang dalam hal ini meningkatkan pendidikan di sekolah. (WHY/KM-3/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Terjalannya komunikasi yang harmonis pada saat pelaksanaan pertemuan wali siswa/wali murid akan mendukung lancarnya pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan di sekolah. (SWS/KM-4/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

komite sekolah selalu berupaya dalam menjembatani antara orang tua siswa dan pihak sekolah. Contohnya dalam hal aspirasi yang disampaikan oleh orang tua siswa kepada pihak sekolah, selalu kami sampaikan kepada pihak sekolah terkait kritik dan saran tersebut. Dan kami selaku komite sekolah juga ikut membantu dalam hal apa saja yang menjadi kami lakukan terkhusus dari segi anggaran yang diperlukan (SWS/KM-5/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

komite juga mendukung dan mendorong tumbuhnya komitmen dan perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Dalam hal ini komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan. (SG/KM-6/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah sangat mendukung, baik dari segi sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan so-

sialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa terkait apa saja yang dapat meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di sekolah ini, dan komite sekolah menerapkan sistem iuran ke orang tua siswa agar tercapainya kedisiplinan dan tercapainya pendidikan yang bermutu karena didukung oleh sarana dan prasarana yang bagus. (ST/KM-7/02012023).

Hal senada juga diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

komite sekolah membantu dalam menunjang sarana dan prasarana terutama untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran di sekolah. (TLB/KM-8/02012023).

Sebagaimana yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

Saya selaku ketua komite sekolah sangat mendukung dengan adanya proses pembelajaran yang ada di sekolah tersebut. Jadi, setelah diadakan musyawarah dengan kepala sekolah, di sini komite sekolah juga ikut berperan untuk menjadikan anak agar selalu menaati peraturan atau tata tertib ketika sedang berlangsung pelajaran di dalam kelas. (BBG/KM-9/02012023).

Hasil wawancara diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah ikut berpartisipasi dalam proses komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana khususnya untuk pengadaan sarana yang ada di ruang kelas seperti pembelian proyektor guna menunjang pembelajaran siswa di kelas dan pihak komite tidak memberatkan orang tua, di sini komite sekolah menerapkan sistem iuran kepada orang tua siswa, yai-

tu dengan membayar iuran yang tidak memberatkan untuk orang tua siswa. (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan Pelaksanaan Partisipasi Komite sekolah seperti dukungan yang diberikan komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau pertimbangan saja tetapi lebih dari itu adalah bantuan finansial baik secara individual maupun kolektif hasil pengumpulan dana masyarakat dan juga dalam pelaksanaannya .Pola hubungan kerja antara Komite dan Kepala sekolah adalah hubungan kerja sama kemitraan ,artinya kedudukan keduanya bukan sebagai bawahan dan atasan. Prinsip dasar demikian membawa mereka kearah komunikasi yang baik, setiap ada hal yang dianggap penting selalu diselesaikan dengan musyawarah sehingga bukan hanya melahirkan kerja sama yang baik dan hubungan kemitraan yang harmonis pun menjadi dampak dari pola hubungan kerja tersebut.

b)komite sekolah menjadi penunjang dalam masalah fasilitas sekolah, sarana prasarana sekolah dan pengadaan finansial sekolah serta kegiatan penggalan dana di sekolah

Komite sekolah menjadi penunjang dalam masalah fasilitas sekolah, sarana prasarana sekolah dan pengadaan finansial sekolah serta kegiatan penggalan dana di sekolah. Sebagaimana hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah sangat membantu kemandirian sekolah dalam hal anggaran, fasilitas sekolah yang masih kurang, mencari dana untuk menambah insentif guru, dengan mengajukan bantuan dana tanpa memberatkan orang tua siswa (IS/KM-1/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 4 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Pendanaan yang didapatkan oleh komite sekolah dari hasil iuran orang tua siswa setiap bulannya, dan infaq, tetapi apabila ada orang tua siswa yang ekonominya kurang tidak di pungut iuran tersebut (KMR/KM-2/02012023).

Komite sekolah juga membantu dalam hal sarana prasarana di sekolah. Dan tetapi tidak hanya memberikan dukungan dan pengadaan sarana prasarana fisik saja, namun termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia. Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 7 kampungdalem yang menyatakan bahwa:

Selain membantu dalam sarana dan prasaran yang ada di sekolah, komite sekolah juga membantu mengembangkan sumber daya manusianya, yakni dengan memberikan sumbangan saran dan motivasi agar para guru senen tiasa dapat meningkatkan kinerjanya sehingga sekolah bisa menjadi lebih maju lada dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain (WHY/KM-3/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Peran komite sekolah dalam perencanaan rehabilitasi ruang kelas yang sebelumnya telah didiskusikan bersama pihak sekolah dan wali kelas dari kelas yang akan direhabilitasi. (SWS/KM-4/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 2 Kepatihan yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah sangat berperan dalam pengadaan peralatan laboratorium, pengrehapan ruang kelas, rencana pembangunan ruang kelas, sebelum sekolah mengambil keputusan maka terjadilah diskusi antara

kepala komite sekolah dan pihak sekolah. (SWS/KM-5/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Jepun yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah sebagai mitra kerja kepala sekolah dapat memberikan pertimbangannya dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh sekolah, misalnya sekolah akan mengajukan rehab sarana prasarana dan gedung yang rusak, sekolah akan melakukan penambahan ruang. (SG/KM-6/02012023).

Hasil wawancara dengan komite sekolah di SDN 1 Karangwaru yang menyatakan bahwa:

Untuk melakukan penambahan fasilitas biasanya pihak sekolah terlebih dahulu mengkonsultasikan masalah itu kepada komite sekolah agar dapat diberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakili oleh komite sekolah. dan atas nama masyarakat yang diwakilinya, komite sekolah dapat menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” terhadap rencana program pendidikan yang disusun oleh sekolah. (ST/KM-7/02012023).

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Tertek yang menyatakan bahwa:

pihak komite sekolah selalu memberikan informasi terkait dengan apa saja yang perlu dirumuskan atau direncanakan untuk peningkatan pendidikan di sekolah kita ini, dan mereka juga sejauh ini sangat peduli dengan peningkatan pendidikan di sekolah. Dalam hal perencanaan pihak komite selalu menyampaikan terkait apasaja rencana mereka untuk peningkatan

pendidikan di sekolah kita ini dengan duduk bersama membahas rencana-rencana tersebut . (TLB/KM-8/02012023).

Berikut ini yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN Sembung yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah mempunyai peran yang sangat mendukung dan baik mulai dari sarana dan prasarana, manajemen pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua siswa. Misalnya dalam pengembangan fisik sekolah, komite sekolah melakukan serangkaian kegiatan dari perencanaan, penggalan dana, pelaksanaan sampai pelaporan. (BBG/KM-9/02012023).

Hasil wawancara yang diungkapkan oleh komite sekolah di SDN 1 Botoran yang menyatakan bahwa:

Komite sekolah juga ikut membantu dalam menunjang sarana dan prasaranasekolah terutama untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar. pada waktu rencana pengadaan ruang, di sini komite sekolah berperan sebagai penggalang dana kepada orang tua siswa yang dikira-kira bisa membantu, tetapi dalam penggalangan dana ini komite sekolah dibagi menjadi tiga yaitu kelas unggulan, kelas khusus, dan kelas reguler dan jumlah dana yang dungut komite berbeda-beda, dan uang komite ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan siswa.” (MSR/KM-10/02012023).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diambil kesimpulan komite sekolah menjadi penunjang dalam masalah fasilitas sekolah, sarana prasarana sekolah dan pengadaan finansial sekolah serta kegiatan penggalan dana di sekolahpada waktu rencana pengadaan ruang, di sini komite sekolah berperan sebagai peng-

galang dana kepada orang tua siswa yang dikira-kira bisa membantu, tetapi dalam penggalangan dana ini komite sekolah dibagi menjadi tiga yaitu kelas unggulan, kelas khusus, dan kelas reguler dan jumlah dana yang dungut komite berbeda-beda, dan uang komite ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan siswa.

C. Hasil Diskusi

1. Konstruksi Sosial Komite Sekolah atas Mutu Pendidikan SDN di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

- a) Komite sekolah dalam pemberian pertimbangan, badan pendukung, pengontrol dan mediator di sekolah

Perencanaan komite sekolah dalam peningkatan tentang mutu pendidikan yaitu dengan melihat Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite sekolah, tugas Komite sekolah adalah mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Pada Awal tahun pelajaran baru Komite Sekolah dilibatkan dalam pembahasan mengenai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan Finalisasi Kurikulum Sekolah. Komite sekolah yaitu sebagai wakil dari masyarakat dalam membantu kegiatan program pendidikan di sekolah telah menunjukkan tugasnya sebagai mitra sekolah, terutama bagi kepala sekolah dan guru dalam merancang, merencanakan dan melaksanakan program pendidikan, baik berupa pembangunan fisik maupun non fisik. Upaya Komite sekolah dalam melakukan rencana program kerja merupakan penjabaran dari peran dan fungsi Komite sekolah yaitu sebagai pemberi pertimbangan kepada pihak sekolah, pendukung baik berupa tenaga, pikiran, maupun dana serta hubungan baik sebagai mitra dengan pihak sekolah, pihak komite selalu menjaga hubungan baik kepada pihak sekolah serta selalu melakukan Musyawarah entah itu berkaitan dengan perencanaan maupun sampai pengawasan.

Menurut Gamage (2009) komite sekolah sangat dominan

dalam pengambilan keputusan perencanaan sekolah terutama dalam pengambilan keputusan anggaran sekolah (persetujuan anggaran sekolah) dan pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan sekolah (persetujuan rencana perbaikan sekolah).

Hasil penelitian ini sesuai menurut Hakim (2020) komite sekolah menjadi wadah adanya komunitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah dasar (SD) yang mempunyai peran penting. Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh semua pihak yaitu siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, tokoh masyarakat stakeholder, pemerintah dan pihak swasta yang menjadi komunitas komite sekolah yang mempunyai kontribusi atas kesuksesan pendidikan.

Permendikbud nomor 75 tahun 2016 Bab I Pasal I komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. Wadah komite sekolah ini diharapkan para *stakeholder* pendidikan yang mengambil peran yang maksimal, sehingga sekolah mampu memberikan pelayanan yang baik bagi *customer*-nya. Peran komite sekolah bukan hanya sebatas pada mobilisasi sumbangan dan mengawasi pelaksanaan pendidikan, namun juga meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat merubah pola pikir, keterampilan, dan distribusi kewenangan atas individual dan masyarakat yang dapat memperluas kapasitas manusia meningkatkan taraf hidup dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah (Nelliraharti, 2018). Oleh karena itu sekolah harus meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya dan mendukung terhadap program-program yang dicanangkan sekolah untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

Perencanaan partisipasi komite sekolah selalu berorientasi pada pengembangan Visi dan Misi seperti mengembangkan po-

tensi siswa dan siswi dengan sesuai minat dan bakat sampai rencana bekerjasama dengan lembaga pemerintah.

b) Program komite sekolah dalam menyalurkan aspirasinya dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah

Program komite sekolah dalam menyalurkan aspirasinya dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Tujuan yang dituangkan dalam AD dan ART komite sekolah yaitu Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kewajiban operasional dan program pendidikan di sekolah. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Ramli (2021) yang menyatakan bahwa salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Selain itu komite sekolah merupakan organisasi baru dalam dunia pendidikan yang menarik untuk ditelaah lebih mendalam khususnya dalam membantu dan meningkatkan mutu pendidikan

Dari segi objektivasi, Faktor pendukung program komite sekolah dalam meningkatkan mutu Pendidikan, antara pihak sekolah, komite dan orang tua siswa berusaha dengan sebaik mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Pihak sekolah, Komite dan masyarakat berusaha seoptimal mungkin untuk mendukung dan melak-

sanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.

Termasuk didalamnya adalah peran Komite sekolah dalam laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat dilakukan dengan 1) Setiap bulan sekolah menyusun laporan hasil kegiatan kepada komite karena kegiatan tersebut pendanaannya dari komite. 2) Untuk memenuhi pendanaan suatu kegiatan, maka panitia kegiatan mengajukan proposal untuk mendapatkan pengesahan dari kepala sekolah. Dan pada akhir kegiatan panitia menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. 3) Untuk pertanggungjawaban terhadap dana Bos, bendahara bos membuat laporan per semester yaitu periode Januari-Juni 2021 dan periode Juli-Desember 2021. 4) Semua transaksi keuangan di sekolah dibukukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jenis buku yang digunakan buku kas umum, buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, 5) Setiap pengeluaran keuangan sekolah disusun pertanggungjawaban (SPJ) setiap bulan. 6) pengelolaan dana pendidikan telah mencerminkan prinsip akuntabilitas public. Hal ini dapat terlihat dari pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak-pihak yang berwenang yaitu, komite sekolah, Dinas pendidikan Kabupaten/ Propinsi dan sebagainya).

Hasil penelitian melalui proses internalisasi, partisipasi Komite sekolah seperti dukungan yang diberikan komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau pertimbangan saja tetapi lebih dari itu adalah bantuan finansial baik secara individual maupun kolektif hasil pengumpulan dana masyarakat dan juga dalam pelaksanaannya .Pola hubungan kerja antara Komite dan Kepala sekolah adalah hubungan kerja sama kemitraan ,artinya kedudukan keduanya bukan sebagai bawahan dan atasan. Prinsip dasar demikian membawa mereka kearah komunikasi yang baik, setiap ada hal yang dianggap penting selalu diselesaikan dengan musy-

awarah sehingga bukan hanya melahirkan kerja sama yang baik dan hubungan kemitraan yang harmonis pun menjadi dampak dari pola hubungan kerja tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai menurut Hakim (2020) partisipasi komite sekolah ini sangat bergantung pada cara dan kreativitas sekolah dalam menggunakan pendekatan yang relevan kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, tingkat partisipasi dan pendekatan yang dilakukan pihak sekolah dapat berdampak pada keikutsertaan anggota komunitas komite sekolah dalam setiap kegiatan sekolah. Keterkaitan partisipasi dalam sebuah organisasi dibutuhkan wadah yang baik. Salah satu yang sangat penting adalah wadah yang besar. Wadah ini dapat menampung segala kehendak positif masyarakat yang merupakan bagian penengah antara internal dan eksternal sekolah. Dengan demikian, posisi eksternal sangat urgen bagi keberlangsungan sebuah sistem pendidikan, hal demikian tidak bisa dianggap sebagai bayang-bayang semata dalam tataran lembaga. Komite sekolah diposisikan *eksternal feedback loops*, yakni umpan balik eksternal yang muncul dari interaksi sekolah dengan lingkungan eksternal sekolah

Komite sekolah menjadi penunjang dalam masalah fasilitas sekolah, sarana prasarana sekolah dan pengadaan finansial sekolah serta kegiatan penggalan dana di sekolah pada waktu rencana pengadaan ruang, di sini komite sekolah berperan sebagai penggalan dana kepada orang tua siswa yang dikira-kira bisa membantu, tetapi dalam penggalangan dana ini komite sekolah dibagi menjadi tiga yaitu kelas unggulan, kelas khusus, dan kelas reguler dan jumlah dana yang dungut komite berbeda-beda, dan uang komite ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan siswa.

Hasil penelitian Kilewo & Frumence (2015) masyarakat di daerah pedesaan memiliki sikap negatif terhadap pendidikan anak-anak mereka dan beranggapan bahwa pendidikan dasar kurang memiliki posisi penting dalam menentukan kehidupan anak-

anak. Lain halnya pandangan Godfrey (2016) bahwa masyarakat terlibat dalam menyediakan pendidikan dasar melalui persiapan anak-anak untuk sekolah dengan menyediakan makanan, seragam sekolah dan alat tulis. Sedangkan penelitian yang dilakukan Pandoyo & Wuradji (2015) menyimpulkan bahwa kerja komite sekolah dasar negeri se-kecamatan Mlati sudah memiliki nilai yang cukup tinggi dalam berpartisipasi menjalankan program pendidikan di sekolah.

2. Implimentasi Konstruksi Sosial Komite Sekolah atas Mutu Pendidikan SDN di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung

Melalui proses eksternalisasi, Komite sekolah dalam pemberian pertimbangan, badan pendukung, pengontrol dan mediator di sekolah Komite Sekolah dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran dan kebijakan serta program sekolah dengan terlibat dalam memberikan pertimbangan pada pembahasan RKAS, RAPBS, dan kurikulum sekolah; memberikan pertimbangan terkait jenis kegiatan pengembangan minat dan bakat siswa yang akan dilaksanakan; memberikan pertimbangan dalam penggunaan media, metode pembelajaran, dan pengelolaan kelas; dan penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, untuk peran pertimbangan pada ranah kelas secara lebih spesifik dilakukan oleh Dewan Kelas yang merupakan organisasi wali siswa ditingkat kelas selaku perpanjangan dari Komite Sekolah di tingkat kelas.

Komite Sekolah memiliki peran pendukung dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Komite Sekolah memberikan dukungan secara material dan nonmaterial. Secara material berupa tanah wakaf pada awal masa pembangunan sekolah, iuran pendidikan, dan dana jika sekolah membutuhkan dana yang mendadak dan mendesak. Kemudian, Komite Sekolah melalui Dewan Kelas memberikan dukungan secara spesifik untuk setiap kelas se-

suai dengan kebutuhan. Hal tersebut dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan wali kelas pada forum temu wali atau forum Dewan Kelas. Secara nonmaterial, bentuk dukungan Komite Sekolah berupa dukungan tenaga dan dukungan moral bagi program sekolah dan pembelajaran. Dukungan tenaga diberikan ketika salah satu wali siswa memberikan pelatihan membaca. Kemudian dukungan moral pada program sekolah diberikan oleh Komite Sekolah dengan ikut memahamkan wali siswa terkait program dan anggaran yang akan digunakan. Selain itu juga menyebarkan program sekolah. Selanjutnya, dukungan moral pada pembelajaran diwujudkan dengan memberi pengawasan bagi siswa dalam beribadah dan belajar di rumah, serta turut membantu dalam lobi dengan instansi luar sekolah agar pihak sekolah dimudahkan dalam melaksanakan pembelajaran di instansi tersebut, misalnya ketika siswa belajar tentang nasionalisme di KODIM.

Komite Sekolah telah menjalankan peran pengontrol dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di SD. Di awal tahun, Komite Sekolah melakukan kontrol dalam perencanaan pendidikan dengan terlibat dalam pemaparan program sekolah dan anggaran, kemudian Komite Sekolah turut memberikan kritikan dan masukan. Misalnya program kemah yang sedianya akan diikuti kelas I-V, atas kritik dan masukan Komite Sekolah menjadi hanya untuk kelas IV dan V saja, kemudian kelas I-III dianti dengan kegiatan bakti sosial. Selanjutnya, Komite Sekolah memantau pelaksanaan program sekolah dan memberikan masukan, kritik, dan evaluasi kepada sekolah. Kegiatan pengontrolan selanjutnya adalah dengan memantau *output* pendidikan. Adapun bentuk kontrol terhadap *output* pendidikan tersebut diwujudkan dengan mengawasi pelaksanaan pembelajaran. Komite Sekolah melakukan kontrol dengan melihat pembelajaran secara langsung ke kelas maupun melakukan kontrol melalui Dewan Kelas pada forum temu wali. Kontrol pada pembelajaran meliputi hasil belajar siswa, cara men-

gajar guru, dan item ujian atau tes. Apabila Komite Sekolah menemukan guru yang melakukan pengelolaan kelas dengan tidak baik, maka Komite Sekolah akan menyampaikan kepada pihak sekolah untuk ditindaklanjuti.

Komite Sekolah menjalankan peran sebagai mediator dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di SD. Komite Sekolah menjalankan peran sebagai mediator dengan menjadi jembatan antara pihak sekolah dengan wali siswa dan masyarakat dalam hal menyampaikan aspirasi, masukan, dan sosialisasi terkait program sekolah dan kebijakan sekolah. Komite Sekolah juga mendengarkan dan menindaklanjuti terhadap keluhan atas kebijakan maupun program sekolah. misalnya wali siswa yang mengeluh tentang anggaran, maka Komite Sekolah mendampingi untuk bertemu dengan pihak sekolah. Selain itu, Komite Sekolah juga memediasi sekolah dengan instansi luar, misalnya ketika mendapatkan kritikan terkait kebijakan siswa wajib masuk pada hari libur hari raya agama non-Islam dari DPRD Tulungagung. Komite Sekolah menyatakan kesediaan untuk melakukan audiensi kepada DPRD Tulungagung apabila diperlukan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dilakukan Services. Hasil penelitiannya komite Sekolah memiliki empat peran: peran lembaga penasihat, peran lembaga pendukung, lembaga pengendali, dan mediator. Jika Komite Sekolah diberdayakan secara optimal, maka akan memberikan dukungan positif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekolah.

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Herwan, Aswandi, & Chiar (2018) mengenai *The Role of School Committee in Supporting The Fulfillment of Education Facilities and Infrastructure*. Hasil penelitiannya 1) Komite Sekolah SMKN 1 Teluk Keramat telah menjalankan perannya sebagai lembaga penasihat, sebagai lembaga pendukung, sebagai lembaga pengendali, dan sebagai lembaga mediator; 2) Faktor pendukung komite sekolah antara

lain a) Kerjasama sekolah yang baik; b) Wewenang yang diberikan sekolah kepada komite sekolah dalam melaksanakan tugasnya; c) Tanggung jawab wajib menyelesaikan wajib belajar 12 tahun peserta didik; d) Melaksanakan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dan Permendikbud Nomor 75 tentang Komite Sekolah; 3) Faktor penghambat komite sekolah adalah a) Kurangnya koordinasi antara sekolah dengan komite sekolah; b) Lebih mementingkan urusan pribadi daripada tugas komite sekolah; c) kurangnya penghargaan yang diperoleh sebagai komite sekolah; d) Pengurus komite yang tidak efektif karena jarak dari sekolah; 4) Tidak semua anggota komite sekolah terlibat secara aktif.

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan. Kedudukannya sebagai badan mandiri yang mewadahi peran masyarakat memiliki beberapa tujuan yang dituangkan dalam AD dan ART komite sekolah. Tujuan yang dituangkan dalam AD dan ART komite sekolah yaitu Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kewajiban operasional dan program pendidikan di sekolah. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Menciptakan suasana dan kondisi yang transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan.

Penelitian ini sepadan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Wardiah, Murniati, & Djailani (2015) mengenai “Strategi Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di SD Negeri 1 Lhoknga”, dalam penelitiannya menguraikan program komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan, strategi komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan dan kendala peningkatan mutu pendidikan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Halik et al., (2019) mengenai Empowerment of School Committee in Improving Education Service Quality at Public Primary School in Parepare City. Hasil penelitian ini adalah pemilihan strategi yang mengacu pada Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 dan dilakukan secara demokratis; kepala sekolah menjalin komitmen bersama dengan komite sekolah untuk memajukan mutu, merancang wewenang dan tanggung jawab masing-masing, mengembangkan sistem administrasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis TIK, serta mengembangkan standar mutu dan standar operasional prosedur pelayanan pendidikan bermutu.

Faktor pendukung yang dijelaskan di atas, antara pihak sekolah, komite dan orang tua siswa berusaha dengan sebaik mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. Pihak sekolah, Komite dan masyarakat berusaha seoptimal mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan.

Auditing atau pemeriksaan merupakan kegiatan yang terkait dengan pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk memudahkan dalam penyusunan pertanggungjawaban keuangan, maka diperlukan pembukuan anggaran baik penerimaan maupun pengeluaran, yang harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga memudahkan proses pemeriksaan atas penggunaan dana pendidikan. bendahara pengelola Bos membuat pertanggungjawaban berupa laporan per semester yaitu semester I periode Januari-Juni 2021 dan laporan semester

II periode Juli-Desember 2021. Adapun laporan tersebut ada dua jenis yaitu: laporan keseluruhan dan laporan ringkas. Wah maaf ya mbak saya harus menjelaskan lebih rinci lagi. Laporan keseluruhan adalah laporan yang disusun oleh sekolah untuk kepentingan pertanggungjawaban pelaksanaan program yang diketahui oleh komite sekolah

Penyelenggaraan dan peningkatan mutu pengelolaan dapat diwujudkan yakni di antaranya dengan pemecahan masalah biaya sekolah bagi anak kurang mampu, kekurangan tenaga pendidik, dan tenaga untuk memperbaiki bangunan sekolah yang sudah rusak. Partisipasi komite tidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, tetapi juga ikut dalam memberikan suatu dukungan khususnya untuk orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi guna menunjang pendidikan di sekolah. Komite sekolah ikut berpartisipasi dalam proses komite sekolah juga berperan dalam penggalangan dana khususnya untuk pengadaan sarana yang ada di ruang kelas seperti pembelian proyektor guna menunjang pembelajaran siswa di kelas dan pihak komite tidak memberatkan orang tua, di sini komite sekolah menerapkan sistem iuran kepada orang tua siswa, yaitu dengan membayar iuran yang tidak memberatkan untuk orang tua siswa.

Komite sekolah menjadi penunjang dalam masalah fasilitas sekolah, sarana prasarana sekolah dan pengadaan finansial sekolah serta kegiatan penggalan dana di sekolah. Komite sekolah sangat membantu kemandirian sekolah dalam hal anggaran, fasilitas sekolah yang masih kurang, mencari dana untuk menambah insentif guru, dengan mengajukan bantuan dana tanpa memberatkan orang tua siswa. Pendanaan yang didapatkan oleh komite sekolah dari hasil iuran orang tua siswa setiap bulannya, dan infaq, tetapi apabila ada orang tua siswa yang ekonominya kurang tidak di pungut iuran tersebut. Komite sekolah juga membantu dalam hal sarana prasarana di sekolah. Dan tetapi tidak hanya memberi-

kan dukungan dan pengadaan sarana prasarana fisik saja, namun termasuk dalam pengembangan sumber daya manusia. Komite sekolah sangat berperan dalam pengadaan peralatan laboratorium, pengrehapan ruang kelas, rencana pembangunan ruang kelas, sebelum sekolah mengambil keputusan maka terjadilah diskusi antara kepala komite sekolah dan pihak sekolah.

D. Proposisi Penelitian

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, maka penelitian ini menghasilkan proposisi, yaitu

1. Jika komite sekolah bersama pengelola sekolah, wali siswa, masyarakat dan pemerintah bekerja sama, maka mutu pendidikan akan dapat meningkat.
2. Jika mutu pendidikan tidak meningkat, maka minat bakat siswa tidak akan tersalurkan..
3. Jika terdapat proses perencanaan komite sekolah yang belum tersalurkan, maka proses tersebut akan menjadi proses selanjutnya.

Sekolah Dasar Negeri	Konstruksi Sosial Komite Sekolah Atas Mutu Pendidikan		
	Eksternalisasi	Objektifikasi	Internalisasi
SDN 1 Kampungdalem	Pihak sekolah dan komite sekolah memiliki kolaborasi yang kuat dalam perencanaan dan pengelolaan sekolah, didukung oleh loyalitas, kesamaan visi, misi, dan dukungan masyarakat.	Faktor pendukung utama dalam peran komite sekolah termasuk loyalitas, niat kuat untuk pendidikan, kesamaan visi, misi, dan dukungan masyarakat.	Faktor pendukung peran komite sekolah meliputi loyalitas, niat kuat, kesamaan visi, misi, dan dukungan masyarakat terhadap sekolah.
SDN 4 kampungdalem	Komite sekolah aktif dalam memberikan informasi dan rencana untuk peningkatan pendidikan, berkolaborasi dengan pihak sekolah dalam merumuskan strategi dan rencana.	Komunikasi dan koordinasi yang baik antara sekolah dan komite sekolah menjadi faktor penting dalam dukungan komite sekolah	Komunikasi dan koordinasi yang baik antara pihak sekolah dan komite sekolah menjadi faktor pendukung utama.
SDN 7 kampungdalem	Komite sekolah telah melakukan perencanaan yang komprehensif untuk perbaikan fisik, pengembangan minat dan bakat siswa, peningkatan SDM sekolah, dan kerjasama dengan pihak eksternal	Anggota komite sekolah terlibat aktif dalam kegiatan sekolah, seperti pertemuan dengan wali murid	Anggota komite sekolah sangat aktif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka, termasuk dalam mengadakan pertemuan antara wali murid dan pihak sekolah.

SDN 1 Kepatihan	Komite sekolah mendukung program-program yang telah disepakati bersama dengan pihak sekolah dan wali murid, termasuk program ekstrakurikuler dan renovasi.	Pelaksanaan program yang direncanakan bersama antara sekolah dan komite sekolah meningkatkan mutu pendidikan.	Pelaksanaan program yang direncanakan oleh komite sekolah dan pihak sekolah mendukung peningkatan mutu pendidikan di sekolah
SDN 1 JEPUN	Terdapat kegiatan ekstrakurikuler dan pembimbingan intensif untuk persiapan siswa dalam kompetisi akademik.	Kerja sama baik antara sekolah, komite sekolah, dan masyarakat mendukung peran komite sekolah.	Keterlibatan komite sekolah dalam pemecahan masalah biaya sekolah, kekurangan tenaga pendidik, dan perbaikan bangunan sekolah.
SDN 1 Karangwaru	Komite sekolah menciptakan keseimbangan antara aspek akademik dan non-akademik untuk mendukung perkembangan beragam bakat siswa.	Peran komite sekolah mencakup dukungan finansial, tenaga, dan ide dalam berbagai aspek pendidikan	Komunikasi harmonis antara komite sekolah, pihak sekolah, dan wali murid menjadi jembatan penting untuk peningkatan mutu pendidikan.

SDN 1 TRETEK	Komite sekolah memiliki peran penting dalam mendukung sekolah dalam hal sarana, prasarana, manajemen pendidikan, dan penggalangan dana.	Program komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan melibatkan semua pihak, termasuk kegiatan keagamaan dan ekstrakurikuler.	Komite sekolah berperan dalam penggalangan dana untuk pembiayaan pendidikan
SDN SEM-BUNG	Mereka memberikan bantuan finansial untuk program-program yang membutuhkan, dianggap sebagai contoh gotong royong dalam membangun sekolah.	Komunikasi yang mudah antara komite sekolah dan kepala sekolah mendukung peran komite sekolah.	Dukungan komite sekolah terhadap sarana dan prasarana sekolah, manajemen pendidikan, serta kedisiplinan siswa.
SDN 1 BOTORAN	Komite sekolah dan sekolah bekerja sebagai mitra, memberikan dukungan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.	Tidak ada aturan yang jelas tentang peran komite sekolah, dan beberapa anggota komite mungkin kurang aktif	Komite sekolah berpartisipasi dalam proses pembelajaran, termasuk menjaga kedisiplinan siswa di dalam kelas.

SDN 2 KEPATIHAN	Komite sekolah telah berhasil merealisasikan perencanaan mereka secara detail, termasuk renovasi fasilitas WC sekolah, penyusunan RKAS, rencana anggaran biaya, kerjasama dengan lembaga pemerintah, dan sosialisasi rencana kegiatan kepala sekolah kepada masyarakat	Partisipasi masyarakat yang tinggi memotivasi komite sekolah dalam mendukung pendidikan di lembaga sekolah	Komite sekolah berusaha untuk menjembatani antara orang tua siswa dan pihak sekolah, mengkomunikasikan aspirasi orang tua, serta membantu dalam hal anggaran yang diperlukan
-----------------	--	--	--

Sekolah Dasar Negeri	Implimentasi Konstruksi Sosial Komite Sekolah Tentang Mutu Pendidikan		
	Eksternalisasi	Objektifikasi	Internalisasi
SDN 1 Kam-pungdalem	1. Tujuan komite sekolah adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan.	1. Sekolah dan komite se-kolah selalu melakukan pertanggung-jawaban terhadap dana yang digunakan, baik itu berasal dari komite atau pemerin-tah, dengan mengikuti prosedur yang ber-laku.	1. Komite seko-lah memban-tu sekolah dalam mas-alah angga-ran, fasilitas, dan insentif guru tanpa memberat-kan orang tua siswa.
SDN 4 kam-pungdalem	2. Terdapat kerjasa-ma yang diper-lukan antara komite sekolah dan pihak sekolah dalam mencapai tujuan tersebut.	2. Kegiatan kes-iswaan yang didanai oleh komite seko-lah mengiku-ti prosedur, termasuk pengajuan proposal dan pembuatan laporan pertanggu-ngjawaban.	2. Pendanaan komite seko-lah didapat dari iuran orang tua siswa dan infaq, tanpa memungut iuran dari orang tua siswa yang ekonominya kurang.

SDN 7 kampungdalem	3. Suasana keterbukaan dan transparansi dalam penggunaan dana dari masyarakat sangat penting dan diupayakan oleh komite sekolah dan pihak sekolah.	3. Dana yang terkumpul untuk program-program komite sekolah digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan, dan laporan pertanggungjawaban disusun oleh pihak sekolah.	3. Komite sekolah memberikan dukungan dalam pengembangan sumber daya manusia, seperti memberikan saran dan motivasi kepada guru untuk meningkatkan kinerja mereka.
SDN 1 Kepatihan	4. Komite sekolah berperan dalam menyampaikan kebutuhan peningkatan mutu pendidikan, persiapan penerimaan murid baru, serta perencanaan program sekolah.	4. Pencairan dana dari komite sekolah melibatkan proses yang ketat, termasuk pencatatan dan pembuat laporan pertanggungjawaban.	4. Kerjasama antara komite sekolah dan pihak sekolah dalam rehabilitasi ruang kelas mendukung pelaksanaan program sekolah.

SDN 1 JEPUN	5. Rapat komite secara berkala diadakan untuk mendiskusikan hal-hal penting dan masukan dari masyarakat serta wali murid.	5. Untuk memudahkan pertanggungjawaban keuangan, terdapat pembukuan anggaran yang mencatat penerimaan dan pengeluaran dengan tertib dan sesuai peraturan.	5. Komite sekolah berperan sebagai mitra kerja kepala sekolah, memberikan pertimbangan dalam rencana dan program sekolah, seperti rehab sarana prasarana.
SDN 1 Karangwaru	6. Peran komite sekolah meliputi penyusunan dan pengesahan RAPBS, peningkatan kedisiplinan siswa dan guru, serta usulan keamanan siswa.	6. Buku pembantu bank digunakan untuk mencatat transaksi melalui rekening bank, sementara buku pembantu pajak digunakan untuk mencatat pungutan dan penyeteroran pajak.	6. Komite sekolah memberikan masukan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam rencana pendidikan sekolah.

SDN 1 TRETEK	7. Komite sekolah mempertimbangkan harapan dan aspirasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan, termasuk aspek agama.	7. Akuntabilitas dalam manajemen keuangan berarti penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.	7. Komite sekolah berperan aktif dalam merumuskan rencana peningkatan pendidikan, berkonsultasi dengan pihak sekolah, dan memberikan masukan.
SDN SEM- BUNG	8. Komite sekolah mendukung pengembangan sarana dan prasarana sekolah serta berperan sebagai penggalang dana.	8. Laporan pertanggungjawaban selalu disusun oleh sekolah terkait program/kegiatan yang didanai melalui dana rutin atau dana insidental yang berasal dari masyarakat.	8. Komite sekolah mendukung sarana, prasarana, manajemen pendidikan, dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama orang tua siswa.

SDN 1 BOTO-RAN	9. Tujuan komite sekolah adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam kebijakan operasional dan program pendidikan.	9. Semua proses pertanggungjawaban ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan.	9. Komite sekolah membantu menunjang sarana dan prasarana sekolah, termasuk dalam penggalangan dana untuk pengadaan ruang.
SDN 2 KEPATIHAN	10. Program komite sekolah mencakup rapat pengurus, promosi sekolah, kerjasama dalam peningkatan mutu pendidikan, dan usaha mencari dana untuk pembangunan fisik sekolah.	10. Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana pendidikan, yang merupakan tanggung jawab besar dalam penyelenggaraan pendidikan.	10. Komite sekolah berperan dalam pengadaan peralatan laboratorium, perbaikan WC, rencana pembangunan ruang kelas, dan berpartisipasi dalam diskusi dengan pihak sekolah sebelum pengambilan keputusan.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dituliskan sebelumnya. Bagian pembahasan telah membahas tahapan dari konstruksi sosial yaitu eksternalisasi, objektifikasi dan internalisasi. Analisis dari tahapan konstruksi sosial tersebut, menghasilkan temuan penting yang akhirnya membentuk tiga proposisi. Ketiga temuan ini sekaligus menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan diawal. Hasil penelitian ini antara lain adalah:

Konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan sekolah dasar partisipasi komite sekolah selalu berorientasi pada pengembangan Visi dan Misi seperti mengembangkan potensi siswa dengan sesuai minat dan bakat sampai rencana bekerjasama dengan lembaga pemerintah. Program komite sekolah dalam menyalurkan aspirasinya dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah sesuai tujuan yang dituangkan dalam AD dan ART komite sekolah yaitu Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kewajiban operasional dan program pendidikan di sekolah. Objektifikasi terdiri dari: 1) Faktor pendukung program komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pihak sekolah, Komite dan masyarakat berusaha seoptimal mungkin untuk mendukung dan melaksanakan pro-

gram-program yang terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan. 2) Komite sekolah dalam laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat. Internalisasi terdiri dari: 1) Komite sekolah dapat berpartisipasi seperti dukungan yang diberikan komite tidak hanya sebatas pemberian usulan atau pertimbangan saja tetapi lebih dari itu adalah bantuan finansial baik secara individual maupun kolektif hasil pengumpulan dana masyarakat dan juga dalam pelaksanaannya. 2) komite sekolah menjadi penunjang dalam masalah fasilitas sekolah, sarana prasarana sekolah dan pengadaan finansial sekolah serta kegiatan penggalan dana di sekolah

Implimentasi konstruksi sosial komite sekolah atas mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dilaksanakan dengan eksternalisasi mencakup 1) komite sekolah dalam pemberian pertimbangan di sekolah menjalankan peran dalam kebijakan dan program sekolah dengan terlibat dalam memberikan pertimbangan pada pembahasan RKAS, RAPBS, dan kurikulum sekolah dan sebagainya; Komite Sekolah memiliki peran pendukung dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Komite Sekolah memberikan dukungan secara material dan nonmaterial; Komite Sekolah telah menjalankan peran pengontrol dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di SD; Komite Sekolah menjalankan peran sebagai mediator dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran di SD. Komite Sekolah menjalankan peran sebagai mediator dengan menjadi jembatan antara pihak sekolah dengan wali siswa dan masyarakat dalam hal menyampaikan aspirasi, masukan, dan sosialisasi terkait program sekolah dan kebijakan sekolah. 2) Program komite sekolah dalam menyalurkan aspirasinya dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Objektifikasi mencakup: 1) Faktor pendukung program komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan pihak sekolah, komite dan orang tua siswa berusaha dengan sebaik mungkin untuk mendukung dan melaksanakan program-program

yang terkait dengan upaya peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pengelolaan pendidikan. 2) Komite sekolah dalam laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat sesuai dalam laporan keuangan. Internalisasi mencakup: 1) Komite sekolah dapat berpartisipasi berupa dukungan finansial, tenaga dan dukungan pikiran. 2) komite sekolah menjadi penunjang dalam masalah fasilitas sekolah, sarana prasarana sekolah dan pengadaan finansial sekolah serta kegiatan penggalan dana di sekolah.

Berdasar pemikiran Berger dan Luckman terlihat cukup utuh dalam membahas konstruksi sosial di mana teori ini adalah sebuah kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan, meyakini bahwa realita adalah hasil dari ciptaan manusia yang kreatif melalui proses konstruksi sosial dalam dunia sosial. Pemikiran Berger dan Luckman terpengaruh oleh pemikiran Husserl tentang fenomenologi, Weber tentang makna subjektif dan Durkheim tentang struktur dan Marx tentang dialektika.

Berger dan Luckman menyatakan bahwa institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia. Lewat sentuhan Hegel yakni tesis-antitesis-sintesis, Berger dan Luckman menemukan konsep di mana konsep ini untuk menghubungkan antara yang subjektif dan objektif melalui konsep dialektika yang lebih dikenal dengan eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Temuan dalam penelitian ini selain adanya peran komite sekolah dalam sebuah proses menuju peningkatan mutu pendidikan di sebuah lembaga pendidikan adalah keikutsertaan komite sekolah itu sendiri dalam sebuah lembaga pendidikan atas mutu pendidikan. Setidaknya ada beberapa point yang menjadi temuan. Pertama, dalam beberapa jurnal yang mempertanyakan faktor-faktor peningkatan sebuah lembaga pendidikan atas mutu pendidikannya. Penelitian ini berhasil menemukan beberapa faktor-faktor tersebut. Sedangkan poin kedua melihat bahwa

peran komite sekolah merupakan proses pencapaian dari program-program yang disampaikan sesuai dengan visi misi dan AD ART komite sekolah. Dan, point ketiga adalah bagaimana komite sekolah berpartisipasi dalam pemberian dukungan baik materiil maupun imateriil. Sehingga dalam temuan ini melihat secara praktis bagaimana komite sekolah berperan dalam peningkatan atas mutu pendidikan.

Pada penelitian ini masih memiliki sejumlah batasan dalam temuan dikarenakan disusun pada tingkat yang sederhana atau mikro. Di dalam penelitian ini menitikberatkan sisi fenomenologi bahwa informan sebagai pemberi pertimbangan, pendukung, pengontrol dan mediator adalah bukan satu-satunya sebagai penentu keberhasilan peningkatan atas mutu pendidikan di lembaga pendidikan. Informan memberikan gambaran dan keterangan yang mereka alami selama ini ketika berhadapan dengan pihak pengelola sekolah, wali siswa, masyarakat dan swasta. Di sisi lain penelitian ini memiliki kelemahan baik dari sisi metode penelitian maupun teoritik. Dari sisi metode penelitian, penelitian ini bisa dikembangkan kearah jenis penelitian studi kasus dengan memahami dan menganalisa peran komite sekolah dalam peningkatan atas mutu pendidikan secara mendalam dan dari berbagai sisi. Selama penelitian, dari sisi informan masih mengalami sejumlah kendala, terutama akses pada informan. Kekurangterbukaan informan merupakan hal yang sangat wajar karena kesulitan akses informan yang mau memberikan gambaran dan keterangan secara terbuka. Tentu ini merupakan celah yang dapat menjadi penelitian lanjutan bagi peneliti lain baik dilihat dari jenis penelitian yang sama, yaitu jenis penelitisn fenomenologi, atau studi kasus di mana penelitian ini dilakukan terfokus dalam satu kasus untuk diamati dan dianalisa secara cermat.

Dari sisi teoritik, pada penelitian masih dapat dikembangkan dengan menggunakan paradigma penelitian lain. Penelitian ten-

tang peran komite sekolah dalam sebuah lembaga pendidikan masih harus dibuktikan secara lebih empiris pada penelitian mendatang. Pada penelitian ini menganalisa tentang peran komite hingga metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. Dan ini merupakan kegiatan yang berulang-ulang sehingga menjadi sebuah budaya yang pada akhirnya dapat mempengaruhi perilaku orang-orang disekitarnya. Kebudayaan merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti kelompok atau massa dalam jumlah yang tidak sedikit. Tentu ini menjadi tantangan untuk penelitian kedepan karena budaya selama ini dianggap sebagai sesuatu yang berpengaruh terhadap perilaku seseorang.

Dari sisi praktis, penelitian ini dapat menjadikan pengambilan kebijakan supaya kedepannya dapat membuat suatu kebijakan dari semua bidang menyesuaikan dari visi misi dan AD ART yang telah disepakati serta partisipasi lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, I. (2002). *Political Ideology Today*. Manchester: Manchester University Press.
- Al-Barry, M. D. (1994). *Kamus Populer*. Surabaya: Arkola.
- Arcaro, J. S. (2007). *Pendidikan Berbasis Mutu*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Berger, P. ., & Luckmann, T. (1990). *Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Budi Prasajo, M. . (2015). Konstruksi Sosial Masyarakat Terhadap Alam Gunung Merapi: Studi Kualitatif tentang Kearifan Lokal yang Berkembang di Desa Tlogolele Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. *Jurnal Analisa Sosiologisiologi*, 4(2), 1–16.
- Bungin, B. (2010). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Carlson, B. D. (2020). *The Social Construction of the Progressive Era: A Critical-The Social Construction of the Progressive Era: A Critical-Historiographical Case Study in Vocationalism Historiographical Case Study in Vocationalism*. DePaul University. Diambil dari https://via.library.depaul.edu/soe_etd
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Nuha Litera.

- Crosby, P. B. (1979). *Quality Is Free*. New York: New American Library.
- DeLamater, J. D., & Hyde, J. S. (1998). Essentialism vs Social Constructionism in the Study of Human Sexuality. *The Journal of Sex Research*, 35(1), 10–11.
- Eriyanto. (2012). *Analisis Framing: Komunikasi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Febriana, L. (2019). Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 1 Palembang. *Jurnal PAI raden fathah*, 1(2), 152–163.
- Gamage, J. I. Z. dan D. T. (2009). *Decentralisation, school-based management, and quality*. Springer Science Business Media.
- Giddens, A., & Pierson, C. (1998). *Conversations with Anthony Giddens: Making Sense of Modernity*. Cambridge, UK: Polity Press.
- Giddens, Anthony. (1993). *Metode Sosiologi Kaidah-Kaidah Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. (2010). *Teori Strukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Godfrey, S. M. (2016). Challenges Impacting Community Participation and Their Effect on Teaching and Learning: a Case Study of Rural Areas. *European Scientific Journal, ESJ*, 12(25), 345. <https://doi.org/10.19044/esj.2016.v12n25p345>
- Hakim, L. (2020). Increasing Elementary School Education Quality Through Committee School Participation Approach. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 12(2), 428–438. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v12i2.215>
- Halik, A., Wardah Hanafie Das, S., Aswad, M., Syakir Rady, M., Dangnga, M. S., & Nasir, M. S. (2019). Empowerment of school committee in improving education service quality at public primary school in Parepare city. *Universal Journal of Educa-*

tional Research, 7(9), 1956–1963. <https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070915>

Haryati, L. . M. K. A. (2017). Peranan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 06 Dedai. *Vox Edukasi*, 8(1), 11–21.

Herawati, E. S. B., Nuraya, N., Adiman, & Aliyyah, R. R. (2021). School Committee Support for Improving the Quality of Education Services. *Proceedings of the 1st Annual International Conference on Natural and Social Science Education (ICNSSE 2020)*, 547(20), 321–327. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210430.048>

Herwan, H., Aswandi, A., & Chiar, M. (2018). The Role of School Committee in Supporting The Fulfillment of Education Facilities and Infrastructure. *JETL (Journal Of Education, Teaching and Learning)*, 3(2), 282. <https://doi.org/10.26737/jetl.v3i2.763>

Irawan, E., Nurhadi, N., & Yuhastina, Y. (2021). Peran komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan: Studi pada SMP Negeri 1 Surakarta. *Jipsindo*, 8(1), 15–28. <https://doi.org/10.21831/jipsindo.v8i1.38533>

Juran, J. (1986). The Juran Trilogy. *Quality Progress*, 19(8).

Kamau, S. J., Rambo, C. M., & Mbugua, J. M. (2021). Influences of Community Participation on School Infrastructure Policy Implementation and Performance of Construction Projects. *Open Journal of Social Sciences*, 09(03), 173–187. <https://doi.org/10.4236/jss.2021.93012>

Khairil, S. D. dan. (2012). *Profesi Kependidikan*,. Bandung: Alfabeta.

Kilewo, E. G., & Frumence, G. (2015). Factors that hinder community participation in developing and implementing comprehensive council health plans in Manyoni District, Tanzania. *Global Health Action*, 8(1). <https://doi.org/10.3402/gha.v8.26461>

- Lestari, G. (2015). Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008 di Perusahaan Konstruksi. *Ganeç Swara*, 9(1).
- Lincoln, G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publication.
- Majir, A. (2018). Rekonstruksi Hubungan Komite Sekolah Dan Sekolah Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 10(2), 223–231. Diambil dari <http://unikastpaulus.ac.id/jurnal/index.php/jpkm/article/view/173>
- Moesa, A. M. (2007). *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKIS.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nelliraharti. (2018). Peran Komite Sekolah Dalam Rangka Peningkatan Mutu Pendidikan. *Journal of Education Science*, 4(2), 17–25.
- Ngangi, C. R. (2011). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial Charles R. Ngangi. *Agri-Sosioekonomi*, 7(2), 1–4.
- Ngangi, C. R. (2019). Konstruksi Sosial dalam Realitas Sosial Charles R. Ngangi. *Agri-Sosioekonomi*, 7(2), 1–4.
- Peter L. Berger and Thomas Luckmann .The Social Construction of Reality *Penguin Books*.
- Poerwandari, E. K. (2007). *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Depok: LPSP3.
- Poloma, M. M. (2010). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Qohar, H. A. (2018). Manajemen Komite Sekolah Sebagai Badan Pendukung (Supporting Agency) Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Slb Kabupaten Garut Dan Kabupat-

en Sumedang. *Inclusive: Journal of Special Education*, IV(01), 29–43.

Ramli, R. (2021). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan sekolah . *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 3(1), 147–163. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v3i1.155>

Ritzer, G.-D. J. G. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Kencana Predana.

Ritzer, G. (1985). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.

Ritzer, G. (1992). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ritzer, G., & Goodman, D. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta:- Prenada Media.

Roestiyah N.K. (2010). *Masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta: Bina Aksara.

Rusman. (2008). *Manajemen Kurikulum*,. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.

Sagala, S. (2010). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

Sallis, E. (2006). *Total Quality Management in Education: Manajemen Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: IRCISOD.

Septiana, D. N., Bafadal, I., & Kusumaningrum, D. E. (2018). Pelibatan Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 1(3), 293–301. <https://doi.org/10.17977/um027vii32018p293>

Sugian, S. (2006). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Gramedia.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D*. Bandung: Alfabeta.

- Surya, J. A. (2012). *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Thompson, J. (1994). *Analisis Ideologi; Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*. Yogyakarta: Ircisod.
- Trianto. (2010). *Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Umaedi. (1999). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Direktur Pendidikan Menengah dan Umum.
- Umam, M. K. (2019). Komite sekolah Dalam Konteks Manajemen Mutu Terpadu. *Jurnal Al-Hikmah*, 7, 39–56.
- Wardiah, S., Murniati, & Djailani. (2015). Strategi Komite Sekolah Dalam Peningkatan, 3(2), 12–21.
- Waters, M. (1994). *Modern Sociological Theory*. London: SAGE.
- Weber, M. (2003). *Sociologia*. ABDR.
- Woodhead, L. (2001). *Paul Heelas, David Martin, Peter Berger and the Study of Religion*. London: Routledge.
- Wuthnow, R., Hunter, J. D., Bergesen, A. J., & Kurzweil, E. (2013). *Cultural Analysis: The Work of Peter L. Berger, Mary Douglas, Michel Foucault, and Jürgen Habermas*. London: Routledge.
- Yuningsih, A. (2006). Implementasi Teori Konstruksi Sosial dalam Penelitian Public Relations. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 7(1), 59–70. <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i1.1215>
- JT Ibrahim, F Mufriantje (2021) Social Construction of Young Farmers in Developing Pineapple Agribus in Kediri Regency, East Java Province, Indonesia

GLOSSARIUM

Pendidikan

Usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat

Pendidikan dasar

Jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar diterapkan pada sembilan tahun masa kanak-kanak setiap warga negara, terutama pada anak-anak berumur 7 hingga 15 tahun.

Siswa atau peserta didik

Anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.

Guru

Seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.

Mutu pendidikan

Kualitas atau ukuran baik atau buruk proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan melalui upaya bimbingan pengajaran dan pelatihan.

Komite sekolah

Badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra **sekolah**, jalur pendidikan **sekolah** maupun jalur pendidikan di luar **sekolah**